

Agus & Zakaria Ansori

SOSIOLOGI POLITIK

Filosofi, Kajian, Teori, dan Pemikiran Islam

FUSA.UIN.Mataram

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Agus & Zakaria Ansori

Sosiologi Politik: Filosofi, Kajian, Teori & Pemikiran Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, 2019
x +229 hlm.; 14.8 x 21 cm

ISBN:

Sosiologi Politik: Filosofi, Kajian, Teori & Pemikiran Islam

Penulis : Agus & Zakaria Ansori
Editor : Alwi Farhanudin
Layout : Abdul Karim
Desain Cover : Muhammad Amala Hanif

Cetakan I, Oktober 2019

Penerbit:

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram

bekerja sama dengan

El Hikam Press

Copyright © 2019, FUSA UIN Mataram
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Kata Pengantar

Rektor UIN Mataram

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira dan bangga diminta untuk memberikan kata pengantar pada buku yang ditulis oleh saudara Agus dan Zakaria Ansori dengan judul Sosiologi Politik: Filosofi, Kajian, Teori, dan Pemikiran Islam. Rasa gembira dan bangga karena akhir-akhir ini minat Dosen UIN Mataram menulis buku semakin meningkat. Sudah barang tentu keberadaan buku referensi sangat berguna bagi mahasiswa, dosen, peneliti dan praktisi politik dalam ikhtiar pengabdian pada bangsa dan negara.

Dinamika perkembangan global menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari ihsan akademisi. Perkembangan demokrasi yang semakin membaik, pemilu yang semakin terkelola dengan jujur, terbuka, dan adil, menjadi ruang yang sehat bagi partisipasi politik masyarakat.

Semua dinamika kepolitikan ini selayaknya direspon oleh akademisi untuk menjadi panggung dalam berkarya.

Ketika kebebasan dan persamaan hak sebagai jargon demokrasi ditampilkan tanpa pilter, yang muncul kemudian banyak orang berpeluang mempersoalkan tatanan sosial dan politik yang telah ada. Beberapa kelompok misalnya mulai mempersoalkan pilihan demokrasi yang kita anut, hingga mempersoalkan legitimasi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kehadiran buku ini, menurut hemat saya menjadi solusi bagi pendidikan politik agar membantu pemahaman mahasiswa maupun praktisi terhadap demokrasi, pemilu dan bagaimana berperan menjadi pemilih yang bertanggungjawab.

Buku ini patut diapresiasi, mengingat pembahasan buku ini sangat mendalam dimulai dari filofosi, konsep, kajian teori, dan menempatkan pemikiran Islam sebagai ciri khas buku-buku yang dikeluarkan oleh UIN.Mataram. Semoga sumbangsih pemikiran dari sdr. Agus, M.Si yang dituangkan dalam setiap lembaran buku ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi.

Mataram, November 2019

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag

Sambutan Dekan

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Universitas Islam Negeri Mataram

Segala pujian hanya menjadi hak Allah SWT. Shalawat dan salam kepada Nabi Mulia, Muhammad SAW. Eksistensi dari idealisme akademis civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, khususnya para dosen, tampaknya mulai menampakkan dirinya melalui karya-karya tulis mereka. Karya tulis yang difasilitasi oleh fakultas, seperti beberapa buah buku dalam berbagai disiplin keilmuan semakin mempertegas idealisme akademis tersebut. Kami sangat menghargai dan mengapresiasinya.

Dalam konteks bangunan intelektual yang sedang dan terus dikembangkan UIN Mataram melalui -Horizon Ilmu- juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karya-karya dosen tersebut, terutama dalam bentangan keilmuan yang saling mendukung dan terkait (*intellectual connecting*). Bagaimanapun, problem kehidupan tidaklah tunggal namunlah

sangat variatif. Karena itu, berbagai judul maupun tema yang ditulis oleh para dosen tersebut adalah bagian dari faktualitas-kemampuan-para dosen dalam merespon berbagai problem tersebut.

Kiranya, hadirnya beberapa buku tersebut harus diakui sebagai langkah maju dalam percaturan akademis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Kami sangat berharap tradisi akademis seperti ini akan terus kita kembangkan secara bersama-sama menuju suatu tahapan kelembagaan yang lebih maju.

Terimakasih kepada pihak fakultas yang telah memfasilitasi penulisan buku dan kepada para penulis atas kesempatan dan waktunya dalam menambah khazanah keilmuan.

Dekan,



M. Zaki

Daftar Isi

Kata Pengantar Rektor UIN Mataram.....	iii
Sambutan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama	v
Daftar Isi	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Urgensi Bagi Perkuliahan	3
B. Ruang Lingkup	4
BAB 2 SOSIOLOGI DAN ILMU POLITIK.....	5
A. Sejarah Kelahiran Sosiologi	8
B. Definisi dan Objek Kajian Sosiologi	17
C. Situasi Sosial Yang Mendorong Kelahiran Sosiologi	28
D. Definisi Politik.....	32
E. Ringkasan	41
BAB 3 FILOSOFI SOSIOLOGI POLITIK	45
A. Definisi Sosiologi Politik.....	46
B. Ruang Lingkup Sosiologi Politik.....	50
C. Sejarah Sosiologi Politik.....	52

D. Ringkasan	56
BAB 4 KEKUASAAN.....	58
A. Definisi Kekuasaan.....	60
B. Kekuasaan Dalam Perspektif Sosiologi dan Ilmu Politik	86
C. Pengelolaan Kekuasaan Elitis.....	90
D. Model <i>Powercube</i> (Kubus Kekuasaan)	94
E. Ringkasan	99
BAB 5 SOSIALISASI POLITIK.....	102
A. Definisi Sosialisasi.....	104
B. Definisi Sosialisasi Politik.....	108
C. Agen Sosialisasi Politik	112
D. Ringkasan	122
BAB 6 PARTISIPASI POLITIK.....	125
A. Definisi Partisipasi Politik	127
B. Tipologi Partisipasi Politik	134
C. Bentuk dan Hararki Partisipasi Politik	136
D. Alasan Apatisme Politik	138
E. Ringkasan	141
BAB 7 TEORI SOSIOLOGI POLITIK.....	143

A. Karl Marx (1818-1883).....	147
B. Individualisme, Holisme, dan Sistemisme.....	156
C. Fungsionalisme Struktural.....	162
D. Feminisme.....	165
E. Pierre Felix Bourdieu.....	171
F. Erving Goffman	177
BAB 8 PEMIKIRAN POLITIK ISLAM.....	181
A. Mazhab Islam Tentang Politik.....	181
B. Teori Kelompok Politik: Ibn Qutaibah	192
C. Teori Fungsi Sosial dan Masyarakat Politik: Ibn Sina ..	195
D. Teori Perubahan Sosial: Ibn Khaldun.....	198
E. Ringkasan	201
BAB 9 PARTAI POLITIK ISLAM.....	206
A. Definisi Partai Politik Islam.....	207
B. Tujuan dan Fungsi Partai Politik Islam	215
DAFTAR PUSTAKA	224
TENTANG PENULIS	229

Bab 1

PENDAHULUAN

Sosiologi dan ilmu politik merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda kajian, namun saling fungsional. Hasil penelitian dan kajian-kajian dari teori sosiologi, dapat digunakan oleh ilmuan dan praktisi politik untuk membaca gejala-gejala politik, seperti kekuasaan, perilaku politik, ideologi dan gerakan politik. Kesemuanya merupakan beberapa lahan kajian sosiologi dari sekian banyak lahan yang lain. Dalam diskursus sosiologi saat ini, fenomena kepolitikan memiliki daya tarik yang semakin diminati oleh mahasiswa maupun pembelajar sosiologi. Oleh karenanya, hampir semua perguruan tinggi yang membuka jurusan sosiologi dan ilmu politik yang ada di perguruan tinggi Islam, maupun jurusan Sosiologi Agama dan jurusan Pemikiran Politik Islam yang ada di perguruan tinggi Islam, menempatkan mata kuliah Sosiologi Politik atau Sosiologi Politik Islam sebagai mata kuliah wajib jurusan.

Meningkatnya minat mahasiswa dan pembelajar terhadap Sosiologi Politik juga menjadi fenomena pada jurusan Ilmu Politik, termasuk jurusan Pemikiran Politik Islam. Ilmuan politik menyadari betul fenomena kepolitikan merupakan fenomena kompleks dan memerlukan penjelasan dari disiplin ilmu lain. Gejala perilaku a-politik masyarakat seperti tidak memberikan suaranya dalam pemilihan umum, tidak mematuhi keputusan politik pemerintah seperti undang-undang hingga peraturan daerah, tidak percaya pada sistem politik yang telah digunakan negara, hingga gerakan-gerakan radikalisme melawan negara dan menentang ideologi politik negara. Kesemuanya ini merupakan gejala-gejala politik yang tidak hadir secara mandiri tetapi dikonstruksi oleh lingkungan baik lingkungan lokal, regional maupun global. Untuk membantu fenomena ini, diperlukan penjelasan-penjelasan sosiologis. Dalam usaha menjelaskan fenomena ini pula Ilmu Politik sebagai salah satu cabang ilmu sosial memerlukan kehadiran Sosiologi.

Dari diskursus intelektual di atas, Sosiologi Politik hadir memberikan solusi. Sosiologi Politik mengisi kekurangan dan kebutuhan Ilmu Politik, Demikian juga mengisi kelemahan dan kekurangan sosiologi dalam menjelaskan fenomena politik.

Sosiologi Politik merupakan pertemuan teoritis sekaligus pertemuan metodologis antara Sosiologi dan Ilmu Politik. Sosiologi politik ada di antara kajian Sosiologi dan Ilmu Politik. Sosiologi melihat gejala politik melalui perspektif sosiologi. Tema tersebut sekaligus menjadi objek forma dalam keseluruhan isi buku ini.

A. Urgensi Bagi Perkuliahan

Proses perkuliahan sebagai media transformasi nilai, budaya dan ilmu pengetahuan memerlukan kehadiran pola interaksi yang sejajar antara dosen dan mahasiswa. Untuk membangun pola interaksi dua arah secara berimbang, maka dosen tidak bisa lagi diposisikan sebagai subjek tunggal dan menempatkan mahasiswa sebagai objek yang pasif. Dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran modern idealnya harus sama-sama sebagai subjek atau sebagai komunikator sekaligus komunikan. Tugas utama dosen bukan sebagai penceramah, melainkan sebagai fasilitator di tengah-tengah diskursus ilmu pengetahuan itu. Dosen tidak seharusnya memandang mahasiswa sebagai objek yang harus menerima pikiran-pikiran dosen secara jamak. Tugas dosen yakni memfasilitasi

mahasiswa agar mereka mampu mengaktualisasikan potensi-potensi tersembunyi yang mereka miliki.

Membangun suasana pembelajaran interaktif sebagaimana digambarkan pada penjelasan di atas, memerlukan beberapa sumber daya pendukung. Dalam memenuhi kekurangan tersebut, buku ajar Sosiologi Politik ini diharapkan dapat menjadi pendukung proses belajar aktif mahasiswa.

B. Ruang Lingkup

Buku ini merupakan buku referensi bagi mahasiswa dan pembelajar Sosiologi Politik Islam. Buku ini memfokuskan pembahasannya pada tiga tema besar, yakni filosofi sosiologi politik dan kajiannya, teori sosiologi politik, dan pemikiran Islam tentang politik. Ketiga tema ini didistribusikan menjadi sembilan bab, yakni; (1) pendahuluan; (2) sosiologi dan ilmu politik; (3) filosofi sosiologi politik; (4) kekuasaan; (5) sosialisasi politik; (6) partisipasi politik; (7) teori sosiologi politik; (8) pemikiran politik Islam; (9) partai politik Islam.

Bab 2

SOSIOLOGI DAN ILMU POLITIK

Sosiologi dan politik, merupakan dua disiplin ilmu yang sekarang sedang berkembang. Keduanya memiliki perbedaan sekaligus hubungan saling melengkapi. Sosiologi memberi fokus kajian pada masyarakat secara umum, lebih khusus pada hubungan sosial, perilaku sosial, stratifikasi sosial, dan dinamika sosial. Politik menyangkut diskursus tentang pemerintahan atau negara, segala hal tentang urusan publik, kompromi atau konsensus, dan kekuasaan. Sebagai ilmu mandiri, ilmu politik mengkhususkan kajiannya pada penjelasan segala aspek kepolitikan, dan secara spesifik membahas kekuasaan, negara, demokrasi, partai politik, pemilu, dan lembaga-lembaga negara. Bab ini memperkenalkan konsep dasar terhadap dua disiplin ilmu tersebut sekaligus yaitu sosiologi dan ilmu politik. Pemahaman terhadap kajian dua disiplin ini membantu pembaca memahami pembahasan pada bab 2 beserta bab-bab selanjutnya.

Apabila dilakukan penelidikan secara historis, maka nampak bahwa perjalanan ilmu pengetahuan di awal abad 18 hingga pertengahan abad 19, masing-masing disiplin ilmu melakukan kajian secara mandiri tanpa terintegrasi dengan disiplin ilmu pengetahuan yang lain. Seiring perkembangan masyarakat, terjadi kompleksitas masalah dan tuntutan masyarakat akan solusi yang mereka hadapi, rupanya telah bermuara pada ketidakmampuan disiplin ilmu menjawabnya secara sendiri-sendiri. Dalam usaha menjawab permasalahan dan tuntutan masyarakat yang demikian, ilmu pengetahuan kemudian mulai berpikir melakukan kolaborasi dengan ilmu pengetahuan lain.

Kondisi sebagaimana digambarkan pada penjelasan di atas, juga dialami oleh sosiologi dan ilmu politik. Sebagai disiplin ilmu sosial yang mempelajari berbagai permasalahan dan perkembangan masyarakat, sosiologi menghadapi permasalahan yang tidak sederhana. Banyak fenomena sosial tidak mampu dijawab sendiri oleh disiplin ilmu ini. Seiring perubahan sosial yang demikian cepat, muncul masalah ekonomi, hukum, pendidikan, kriminalitas, dan politik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, lahirlah beberapa cabang sosiologi, seperti sosiologi ekonomi, sosiologi hukum, sosiologi

pendidikan, sosiologi kriminalitas, dan sosiologi politik. Demikian halnya dengan problem ilmu politik. Isu-isu politik global tentang gender, gerakan ideologi, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, dan lain-lain, mengharuskan ilmu politik tidak lagi membatasi kajiannya pada institusi politik, namun berkembang pada perilaku politik. Tulisan ini akan memberikan fokus perhatian pada perihal sosiologi politik guna menjawab kegelisahan akademik kedua disiplin ilmu di atas.

Hingga saat ini sudah terdapat banyak cabang lain dari sosiologi. Di beberapa perguruan tinggi yang memiliki jurusan sosiologi telah memperkenalkan beberapa cabang sosiologi, misalnya sosiologi lingkungan, sosiologi kedokteran, sosiologi gender, sosiologi industri, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi pembangunan, sosiologi keluarga, dan sosiologi pendidikan. Seiring tuntutan akan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan sosial, tentu sosiologi akan terus membuka caba-cabang kajiannya sesuai permasalahan yang mendesak harus mendapat jawaban segera dengan pendekatan sosiologis. Karena itu, tugas utama para sosiolog (ahli sosiologi) adalah melakukan

kajian secara berkelanjutan terhadap pelbagai isu yang berkembang.

A. Sejarah Kelahiran Sosiologi

Sosiologi sebagai disiplin ilmu yang kini banyak diminati masyarakat, lahir melalui perjalanan sejarah panjang. Beberapa ahli yang sering disebutkan dalam literatur sosiologi sebagai orang-orang yang tergolong perintis sosiologi adalah Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber. Kesemuanya ini dikelompokkan sebagai pemikir-pemikir sosiologi klasik. Hingga saat ini, sosiologi juga memiliki pemikir-pemikir modern hingga postmodern. Meskipun diantara para ahli sosiologi masih berbeda pendapat tentang pembagian ini. Sebagian mengatakan sosiologi modern dan postmodern adalah sama yang di sebut sosiologi kontemporer. Sebagian lain mengatakan sosiologi postmodern merupakan kelanjutan dari sosiologi modern. Penulis tidak ingin terjebak pada perdebatan teknis yang demikian. Prinsipnya adalah pemikiran-pemikiran sosiologi saat ini merupakan antithesis pemikiran sosiologi sebelumnya atau dapat pula merupakan kelanjutan dari pemikiran sosiologi sebelumnya. Dengan kata lain, pemikiran sosiologi modern

merupakan antithesis atau kelanjutan dari pemikiran sosiologi klasik, sementara pemikiran sosiologi postmodern merupakan antithesis atau kelanjutan pemikiran sosiologi modern. Pemikir sosiologi yang muncul pasca sosiologi klasik cukup banyak, sebut saja misalnya ada nama-nama seperti Michel Foucault, Pierre Felix Bourdieu, Anthony Giddens, hingga Jean Baudrillard. Tentu saja nama-nama lainnya dapat diidentifikasi oleh pembaca, apa yang disebutkan ini hanya beberapa di antara nama-nama yang banyak.

Meskipun demikian, pendiri sosiologi adalah ahli fisika berkebangsaan Prancis, bernama Auguste Comte. Mengenai kapan pastinya sosiologi lahir, masih terjadi informasi yang belum seragam. Catatan Wardi Bachtiar dalam bukunya *Sosiologi Klasik*, menyebutkan, sosiologi lahir sebelum akhir abad ke-18.¹ Sementara referensi lainnya hanya menyebutkan kelahiran sosiologi berasal dari pikiran Auguste Comte (1798-1857).² Auguste Comte mencetuskan idenya memberi nama

¹ Wardi Bachtiar, Prof. Dr. *Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parsons* (PT.Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.4. Secara implisit Bachtiar menyebutkan, pada abad -19 dikenal dengan abad emperis, Psikologi, Antropologi, Ekonomi, Geografi, Ilmu Hukum, Ilmu Politik dan Sosiologi lahir sebelum abad-18.

² Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori, dan Metodologi* (Pustaka Pelajar, 2012), hlm.1.

fisika sosial (*social fhisic*) sebagai nama ilmu yang mengkhususkan kajiannya pada masyarakat. Sebuah buku ajar sosiologi yang disuguhkan oleh Sunyoto Usman, Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang merupakan dosen penulis pada saat penulis mengambil mata kuliah Pengantar Sosiologi tahun 1994 silam, menyebutkan nama fisika sosial itu diubah sendiri oleh Comte menjadi *sociology*. Perubahan nama itu karena istilah *social physics* pada waktu yang hampir bersamaan ternyata dipergunakan oleh ahli statistik sosial dari Belgia bernama Adophe Quetle. Agar tidak terjadi kesamaan nama dengan kajian ilmu lain, Comte kemudian menggantinya sendiri menjadi *sociology*.

Buku yang di tulis oleh Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati lebih tegas menyebutkan kapan persisnya sosiologi lahir. Menurut mereka, nama *sociology* yang disematkan oleh Comte muncul tahun 1839, tetapi secara akademik kata mereka, sosiologi lahir tahun 1842 ketika bukunya Comte terbit³. Judul buku Comte yang diyakini sebagai referensi pertama tentang sosiologi adalah *Positive-*

³ Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* Edisi Revisi (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.4

Philosophy. Buku ini membawa nama besar Auguste Comte disematkan sebagai bapaknya sosiologi hingga saat ini.

Atas jasa menemukan nama *sociology* sebagai disiplin ilmu yang mempelajari masyarakat, Comte dikenal sebagai pendiri sosiologi, meminjam istilah Sunyoto Usman, Comte telah diberi “gelar” sebagai bapaknya sosiologi.⁴ Sebagian ilmuwan menyebut, Comte sebagai *godfather* (wali) atau leluhurnya atau nenek moyangnya sosiologi. Dalam konsepsi yang dibangun Comte, kata *sociology* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *socio* dan *logos*. Kata, *socio*, artinya tetangga, temandan masyarakat. Sedangkan *catalogos* artinya ilmu atau ilmu pengetahuan. Maka sosiologi, kata Comte adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan segala hal yang berhubungan dengan masyarakat.

Auguste Comte lebih di kenal sebagai pendiri sosiologi. Sedangkan tokoh yang dipandang lebih banyak menyumbangkan pemikiran tentang sosiologi sesungguhnya yakni Emile Durkheim. Ia merupakan pemikir sosiologi yang sangat produktif. Bukunya yang paling banyak digunakan oleh pembelajar sosiologi hingga saat ini adalah *The Division of*

⁴ Sunyoto Usman, *Sosiologi; Sejarah, Teori Dan Metodologi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), hlm 2.

Labor in Socistey, tahun 1968. Buku ini lahir sebagai ikhtiar Durkheim untuk mengungkap fenomena pembagian kerja. Dalam buku Pengantar Sosiologi (2000) yang ditulis oleh Kumanto Suharto dapat ditemukan pernyataan Durkheim tentang manusia. Durkheim mengungkapkan “*manusia modern ditandai oleh gejala dikenalnya pembagian kerja yang lebih jelas antara laki-laki dan perempuan. Pada masyarakat industri yang semakin memperlihatkan meningkatnya penggunaan mesin sebagai pengganti tenaga manusia, menyebabkan pembagian kerja terjadi berdasarkan spesialisasi*”.⁵ Prinsip dari penggunaan mesin oleh organisasi adalah mengurangi jumlah manusia sebagai tenaga kerja, dan akhirnya melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang memiliki sumber daya manusia terbaik.

Apabila ditinjau dari perspektif permasalahan sosial, sifat industrialisasi yang mengandalkan tenaga mesin memunculkan berbagai masalah sosial baru. Negara-negara berkembang dengan tingkat fertilitas (angka kelahiran) yang begitu tinggi,

⁵ Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*, (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2000), hlm.5. Tujuan kajian Durkheim dalam bukunya tersebut untuk mengetahui factor penyebab pembagian kerja. Durkheim menemukan bahwa gejala pembagian kerja dijumpai pada semua bidang kehidupan manusia, baik di pernigaan, pertanian, maupun bidang kehidupan lain seperti politik, kesenian, bahkan keluarga.

menyebabkan kepadatan penduduk tidak berbanding lurus dengan pendidikan dan kompetensi. Akibatnya, akses penduduk yang tidak memiliki pendidikan memadai ini terbatas dalam mendapatkan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran, pada akhirnya menjadi dampak ikutan dari rendahnya pendidikan. Dan dalam kondisi tingginya pengangguran, angka kemiskinan, kriminalitas, anak jalanan, pemulung, prostitusi seks, dan berbagai penyakit sosial lainnya menjadi persoalan yang kini menghantui negara-negara berkembang.

Penelitian yang pernah penulis lakukan tahun 1998 hingga 1999 tentang pembinaan remaja di Panti Karya Remaja menemukan data yang menunjukkan krisis moneter dan ekonomi yang dialami Indonesia awal tahun 1997 telah menambah angka kemiskinan 53 persen dan meningkatkan angka putus sekolah anak dan remaja sekitar 35 persen. Fenomena kemiskinan dan angka putus sekolah ini menyebabkan bertambahnya jumlah anak yang tinggal di jalanan.⁶Data ini memperkuat argumentasi, bahwa

⁶ Agus, *Pengaruh Sistem Pembinaan di Panti Terhadap Pembentukan Sikap Kemandirian Remaja Binaan Panti Karya Remaja*, (Yogyakarta, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, 1999), hlm.2

permasalahan ekonomi memberi sumbangan terhadap munculnya berbagai masalah sosial.

Masalah sosial akhirnya menjadi “lingkaran setan” yang sulit diatasi bahkan terus tumbuh seiring pertumbuhan industrialisasi. Negara, kemudian tidak hanya disibukkan oleh bagaimana meningkatkan pembangunan dan mencari pendapatan. Konsentrasi negara lebih terfokus pada bagaimana menyelesaikan atau setidaknya mengurangi masalah sosial. Hampir semua calon pemimpin politik menjanjikan solusi atas masalah sosial dalam kampanye politik mereka, demikian pula hampir semua rezim pemerintah membuat klaim bahwa mereka berhasil mengurangi masalah sosial, khususnya masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi pada saat bersamaan, publik juga terus menyaksikan fenomena masalah sosial di lingkungan mereka, bukan berkurang melainkan bertambah jumlah dan polanya.

Di Indonesia, perkembangan sosiologi termasuk masih lambat apabila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu politik, ilmu pemerintahan maupun ilmu komunikasi. Pada masa pemerintahan Belanda, nampaknya sosiologi merupakan disiplin ilmu yang tabu diperbincangkan, terlebih untuk diajarkan di perguruan tinggi. Penulis menduga

kehawatiran pemerintah Belanda sangat berlebihan. Sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji struktur sosial, perubahan sosial, hingga perilaku sosial bisa jadi dikhawatirkan dapat berdampak pada munculnya sikap kritis bangsa Indonesia terhadap Belanda. Sikap kritis masyarakat pribumi tentu dapat menjadi ancaman serius bagi kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, segala media yang dapat membangkitkan sikap kritis tersebut harus dibonsai jika tidak bisa dimusnahkan, termasuk belajar sosiologi.

Meskipun demikian, dalam catatan Elly M. Setiadi dan Usman Kolip melalui bukunya Pengantar Sosiologi, sempat menyinggung sebuah nama perguruan tinggi yang pernah mengajarkan sosiologi sebelum Perang Dunia II. Perguruan tinggi tersebut adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jakarta. Sayangnya pengajaran sosiologi di perguruan tinggi ini kata mereka, belum menjadi disiplin ilmu mandiri, melainkan hanya sebagai salah satu mata kuliah pelengkap di Fakultas Hukum. Dosen yang mengajarkan mata kuliah sosiologi juga bukan ilmunan yang memiliki disiplin ilmu sosiologi, melainkan disiplin ilmu lain. Hal ini disebabkan karena pada saat itu belum ada sarjana di Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan sosiologi. Bahkan pada tahun 1934 atau sekitar

tahun 1935, mata kuliah sosiologi di perguruan tinggi ini dihilangkan, karena dipandang tidak memiliki kontribusi terhadap ilmu hukum.⁷ Keresahan ini dapat dipahami mengingat pengajar ilmu hukum ketika itu masih beraliran hukum positiv, di mana mereka memandang kajian ilmu hukum hanya sebatas melihat peraturan-peraturan yang berlaku secara sah. Kajian ilmu hokum ketika itu belum merambah pada perilaku hukum. Konsekuensinya, ilmu hukum belum memerlukan kajian-kajian sosiologis dan karena itu kemudian mata kuliah sosiologi tidak diperlukan.

Setelah Perang Dunia II, sosiologi sebagai disiplin ilmu mulai dipelajari di Yogyakarta. Pada tahun 1946 Akademi Ilmu Politik yang kemudian menjadi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mata kuliah sosiologi diajarkan oleh Prof.Mr.Sunario Kolapaking. Mata kuliah ini diajarkan pada jurusan Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri, dan publistik. Sejak tahun 1950-an mulai banyak orang Indonesia belajar sosiologi di luar negeri dan sejak itu mulai muncul buku-buku sosiologi yang di tulis oleh orang Indonesia. Sebut saja misalnya ada nama Mr.Djody Gondokusumo yang menulis tentang

⁷ Elly M.Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakda Dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya* (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.16-17

Penegertian Dasar Sosiologi, Hasan Shadily menulis buku Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia.⁸ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati menulis Sosiologi Suatu Pengantar juga menerangkan pada tahun 1962 muncul buku dengan judul *Social Changes in Yogyakarta* yang merupakan hasil karya dari Selo Soemardjan⁹. Dan saat ini Universitas Gadjah Mada (UGM) mengajarkan disiplin ilmu sosiologi sebagai disiplin ilmu mandiri pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Tidak hanya UGM, hampir semua perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia memiliki jurusan Sosiologi. Dan di era ini, hampir semua jurusan dalam perguruan tinggi di Indonesia mengajarkan mata kuliah Sosiologi. Demikianlah sejarah singkat perjalanan Sosiologi sebagai disiplin ilmu mandiri yang banyak diminati saat ini.

B. Definisi dan Objek Kajian Sosiologi

Setelah memahami sejarah kelahiran sosiologi, pertanyaan yang muncul adalah apa definisi sosiologi, atau setidaknya apa yang dipelajari oleh sosiologi ? Tentu saja terminologi yang disuguhkan oleh Comte di atas masih sangat abstrak, pembaca

⁸ Ibid, hlm.17

⁹ Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm. 51.

akan mengalami kesulitan untuk membedakannya dengan disiplin ilmu yang lain. Ilmu pengetahuan lain, seperti ilmu politik, negara, ekonomi, hingga ilmu alam, juga mempelajari masyarakat, atau setidaknya menempatkan masyarakat sebagai objek kajiannya. Lantas sebagian orang kemudian bertanya, apa yang membedakan sosiologi dengan disiplin ilmu yang lain. Tengoklah misalnya tema tentang masyarakat miskin. Hampir semua disiplin ilmu, seperti ekonomi, psikologi, antropologi, dan banyak ilmu-ilmu lain, juga memberi perhatian terhadap tema kemiskinan masyarakat. Persoalannya kemudian, di mana letak fokus sosiologi sehingga bisa memberi garis pembatas yang lebih jelas dengan disiplin ilmu lain. Pertanyaan ini seringkali menjadi “kegalauan” setiap orang yang pertama kali mempelajari sosiologi, khususnya dikalangan mahasiswa semester satu hingga semester tiga.

Tidak mudah mendapatkan jawaban tunggal atas pertanyaan di atas. Sebagaimana juga tidak mudah menemukan makna tunggal tentang masyarakat itu sendiri. Misalnya saja, sosiologi sering dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang hubungan sosial dan konsekuensinya. Dalam perspektif ini, manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat sosial senantiasa melakukan hubungan sosial dengan manusia lain. Dalam

hubungan sosial itu, ada beragam konsekuensi, baik harmonis maupun konflik, setara atau dominasi, fungsional atau disfungsional. Sosiologi hadir untuk menjelaskan fenomena sosial tersebut.

Karya Oman Sukmana, mengutip pendapat dari beberapa pemikir baik tokoh dari luar negeri maupun dalam negeri tentang definisi sosiologi. Berikut dipaparkan beberapa pendapat ahli yang dikutip Sukmana. Paparan narasi pendapat para ahli inidiharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana sosiologi didefinisikan oleh banyak ahli.

a. Pitirin Sorokin

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tiga hal; (1) hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala sosial yang lain. Misalnya antara gejala keluarga dan gejala agama, antara gejala agama dan gejala ekonomi, antara gejala budaya dan gejala kemiskinan; (2) hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Misalnya, gejala geografis dan gejala aliran beragama, gejala biologis dan sikap manusia; (3) ciri umum dari semua gejala sosial. Misalnya ciri umum kemiskinan struktural dan

kemiskinan kultural, ciri umum masyarakat kota dan masyarakat desa.

b. Roucek dan Warren

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.

c. Willaim F.Ogburn dan Meyer F.Nimkoff

Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial

d. J.A.A.Van Doorn dan C.J.Lammers

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil

e. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaedah sosial atau norma sosial, kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama. Misalnya pengaruh timbal balik antara kehidupan sosial dan kehidupan politik

f. Mayor Polak

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antara manusia dan manusia, manusia sebagai individu dan kelompok. Sosiologi bukan mempelajari apa yang diharuskan, tetapi apa yang ada, selanjutnya apa yang ada menjadi bahan untuk bertindak dan berusaha

g. Hassan Shadilly

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antar-manusia yang menguasai kehidupan.

Selain definisi-definisi di atas, Guru Besar UNAND Prof.Dr.Damsar dalam bukunya *Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi* mengutip dua pendapat ahli dalam mendefinisikan Sosiologi, sebagai berikut;¹⁰

a. David B.Brinkerhoft dan Lynn K.White (1989)

Brinkerhoft dan White memahami “sosiologi sebagai studi sistematis tentang interaksi sosial manusia. Fokus studi sosiologi adalah pola-pola interaksi; bagaimana pola tersebut tumbuh kembang, bagaimana

¹⁰ Prof.Dr.Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.1-6

dipertahankan, dan bagaimana pola interaksi itu berubah”. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial?. Soeryono Soekanto (dalam Burhan Bungin, 2013), mendefinisikan “interaksi sosial sebagai hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang dengan orang, perorangan dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi”.¹¹

b. Paul B.Horton dan Chester L.Hunt (1987)

Horton dan Hunt mendefinisikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Sedangkan ketika mendefinisikan tentang masyarakat, Horton dan Hunt menyatakan, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, mendiami suatu wilayah mandiri,

¹¹ H.M.Burhan Bungin, Prof.Dr.S.Sos, M.Si, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.55

memiliki kebudayaan yang sama, sebagian kegiatannya dalam kelompok tersebut.¹²

Semua definisi di atas cenderung melihat pekerjaan para sosiolog atau ahli sosiologi pada dua aspek, yakni memahami pola dan kecenderungan-kecenderungan proses hubungan sosial itu berlangsung, dan melihat efek atau konsekuensi ketika individu melakukan hubungan sosial dengan individu lain, atau dengan kelompok lain. Jika ini batasan tentang sosiologi, maka pekerjaan para sarjana sosiologi terlalu sederhana. Karena itu, kemudian menarik untuk mendefinisikan sosiologi sebagai, “*analisis sistematis tentang struktur tindakan sosial*”. Definisi ini ditemukan dalam karya Sunyoto Usman, seorang Guru Besar Sosiologi UGM melalui bukunya Sosiologi; Sejarah, Teori Dan Metodologi, tahun 2012.¹³

Definisi terakhir, nampaknya lebih terukur dan sistematis dibanding yang pertama. Dengan menggunakan definisi yang kedua ini, kita dapat menemukan setidaknya empat elemen terminologi tentang sosiologi. *Pertama*, sosiologi mengkaji tindakan sosial bukan tindakan individual. Tindakan sosial

¹² Prof. Dr. Damsar, *ibid*, hlm.5

¹³ Sunyoto Usman, *ibid*, 4-5

merupakan tindakan yang diperuntukkan bagi orang lain atau merupakan respons atas tindakan orang lain. Tindakan sosial menekankan pada hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi. Ketika ada seorang yang menangis tanpa sebab, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang terganggu, namun orang tersebut terus menangis sejadi-jadinya di dalam kamarnya sendiri, maka sudah dipastikan itu bukan wilayah kajian sosiologi. Namun apabila gadis itu menangis karena dilamar oleh sang pujaan hati, dan budaya masyarakat setempat mengharuskan gadis menangis sebagai tanda menerima lamaran, maka itu merupakan wilayah kajian sosiologi. Dengan demikian, menjadi lebih mudah membedakan wilayah kajian sosiologi dengan psikologi.

Kedua, tindakan sosial yang dikaji sosiologi adalah berstruktur. Artinya, sosiologi berusaha mencari jawaban atas penyebab dari suatu tindakan sosial. Sosiologi tidak hanya membuat deskripsi yang bersifat umum, lebih dari itu Sosiologi mencari tau faktor apa yang paling dominan menyebabkan suatu tindakan sosial oleh seseorang atau kelompok tertentu. Ketika sosiolog melihat fenomena pemilu misalnya, maka akan muncul pertanyaan seputar mengapa sebagian orang mau memilih dalam sebuah pemilu, sementara yang lain tidak. Apa

yang mengkonstruksi tindakan memilih seseorang. Apa alasan individu memilih calon tertentu atau partai politik tertentu. Mengapa individu bersangkutan tidak memilih calon atau partai politik yang lain. Mengapa kelompok tertentu sangat religius, sementara kelompok lain tidak atau kurang taat beribadah. Bagaimana elit agama mempengaruhi pola pikir masyarakat, dan seterusnya Mencari tau atas faktor yang membentuk tindakan manusia tersebut menjadi tugas kajian sosiologi.

Ketiga, dalam melakukan kajian terhadap tindakan sosial, sosiologi bersifat analitis. Yang dimaksud dengan penjelasan analitis adalah, sosiologi menjelaskan fenomena yang dikajinya dengan menggunakan teori atau metodologi yang telah teruji kebenarannya. Jadi sosiologi tidak melakukan deskripsi tanpa dasar pijakan teori dan metodologi. Dengan cara yang demikian, sosiologi bukan dongeng yang tidak ilmiah-empiris, sebaliknya sosiologi berusaha lebih taat terhadap aturan teori dan metodologi. Namun demikian, sosiologi bukan ilmu pengetahuan yang bekerja di belakang meja, bukan pula ilmu yang sibuk memperdebatkan teori. Sosiologi juga adalah ilmu pengetahuan terapan yang harus melihat dunia empiris.

Keempat, kajian sosiologi bersifat sistematis. Yang dimaksud dengan kajian sosiologi bersifat sistematis adalah sosiologi menempatkan dirinya sebagai disiplin ilmu yang mengikuti aturan-aturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil kajian sosiologi masih dapat diperdebatkan dilakukan kajian lebih mendalam sebagai perbandingan.

Dengan konsepsi sosiologi di atas, nampak kajian sosiologi menjadi begitu luas. Tindakan sosial yang dikaji sosiologi bisa di mulai dari kelompok, masyarakat hingga suatu bangsa. Keluarga, budaya, organisasi masyarakat, organisasi partai politik, birokrasi merupakan institusi-institusi sosial yang menjadi kajian menarik bagi sosiologi. Masyarakat pedesaan, hingga masyarakat perkotaan merupakan objek-objek kajian sosiologi yang didalamnya ada beragam tipe perilaku sosial. Bahkan sosiologi juga melakukan kajian terhadap hubungan sosial antara dokter dengan pasien, pasien dengan dukun, guru dengan murid, borjuis dengan proletariat. Untuk menjawab persoalan di bidang kriminalitas pemikiran sosiologi juga kerap diperlukan. Sosiologi merambah segala segi kehidupan sosial manusia, mulai dari ekonomi, politik, hingga kehidupan beragamanya.

Dengan memerhatikan paparan di atas, nampak ruang lingkup kajian sosiologi menjadi sangatlah luas apabila dibandingkan dengan ilmu sosial lain. Luasnya cakupan kajian sosiologi karena ilmu ini menemfokuskan dirinya untuk mempelajari tentang masyarakat. Dalam usaha memudahkan penjelasan pada pembaca, sebaiknya kita membaca bukunya Oman Sukmana, dengan judul *Sosiologi dan Politik Ekonomi*. Sukmana menjelaskan objek kajian sosiologi adalah masyarakat.¹⁴

Sosiologi juga menyumbangkan pemikirannya dalam menjawab berbagai kebutuhan terhadap pembangunan suatu bangsa. Fenomena pembangunan yang kerap memunculkan masalah-masalah sosial baru, tentu disamping dampak-dampak positif lainnya, mengharuskan perencana pembangunan membutuhkan pandangan sosiologi baik sebelum menetapkan pembangunan maupun pada tahapan pelaksanaan pembangunan hingga tahap pemanfaatan hasil pembangunan.

¹⁴ Oman Sukmana, *Sosiologi dan Politik Ekonomi* (UMM Press, 2005), hlm.5. Dengan meminjam pendapat Mac Iver dan Page, Ralph, Sukman mendefinisikan tentang masyarakat dengan cara melihat unsure-unsurnya. Adapun unsure-unsur masyarakat adalah; (a) manusia yang hidup bersama, minimal dua orang atau lebih; (b) bercampur untuk waktu yang lama. Terjadi interaksi social dan timbulnya peraturan-peraturan yang mengatur hidup bersama; (c) terdapat kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan; (d) merupakan suatu sisteem hidup bersama.

Perubahan sosial yang disebabkan oleh pembangunan, atau disebabkan oleh bekerjanya faktor-faktor kultural juga tidak lepas dari kajian sosiologi. Singkatnya, sosiologi mempelajari seluruh fenomena sosial dalam kehidupan manusia.

C. Situasi Sosial Yang Mendorong Kelahiran Sosiologi

Sosiologi lahir dari dua situasi sosial yang cukup penting pengaruhnya, yaitu revolusi industri Inggris dan revolusi Prancis. Sebelum revolusi di dua negara ini, masyarakat Eropa hidup dalam sistem sosial feodalistik. Di dalam karya Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, penulis menemukan deskripsi mengenai kondisi masyarakat feodalistik tersebut. Mereka menggambarkan empat indikator untuk menyebut feodalistik masyarakat Eropa waktu itu, sebagai berikut:

1. Dari sisi ekonomi, masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan
2. Penentuan stratifikasi sosial terbuka didasarkan pada kepemilikan alat-alat produksi tradisional, yakni tanah. Jadi individu yang memiliki tanah paling luas menempati kelas sosial paling tinggi
3. Maka pola hubungan ekonomi didominasi oleh hubungan antara tuan tanah dengan penggarap

4. Sedangkan stratifikasi sosial tertutup, ditentukan berdasarkan gelar kebangsawanan. Bangsawan memiliki kedudukan sosial lebih tinggi jika dibandingkan dengan individu non-bangsawan¹⁵

Sementara di Prancis, akibat kediktatoran pemerintahan Lois XIV yang berbentuk kerajaan, muncul ketidakadilan. Puncak dari kediktatoran pemerintahan Lois XIV menimbulkan kemarahan rakyat. Secara beringsas, rakyat kemudian mengempur penjara Bastille sebagai lambang kesewenangan pemerintahan kerajaan pada saat itu. Penulis membayangkan situasi Prancis saat itu memiliki kemiripan dengan situasi Indonesia tahun 1998. Kemarahan rakyat Indonesia terhadap kediktatoran pemerintahan Soeharto ketika itu berakhir dengan keterpaksaan Soeharto meletakkan jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Yang membedakannya, Prancis adalah kerajaan, sedangkan Indonesia adalah Republik. Prancis melakukan revolusi sedangkan Indonesia melakukan reformasi. Namun, semangat pergerakannya adalah sama, menciptakan hubungan pemerintah dan rakyat yang lebih baik.

Cita-cita revolusi rupanya tidak terwujud dengan baik. Berbagai permasalahan sosial baru muncul pasca revolusi.

¹⁵ Elly M.Setiadi & Usman Kolip, *ibid*, hlm.9

Revolusi Inggris telah menyebabkan perubahan fundamental bagi masyarakat, khususnya terkait gaya hidup, pengangguran, hingga kemiskinan. Kehadiran industri yang identik dengan mesin sebagai pengganti tenaga kerja, telah mampu menghemat tenaga kerja. Akibat ikutan dari fenomena efisiensi tenaga kerja adalah tingginya angka pengangguran. Sudah barang tentu, ketika pengangguran sudah cukup besar, kriminalitas mulai muncul, stres sosial tidak bisa dihindari. Masyarakat mulai mengalami kesulitan bertahan hidup, kecuali bagi yang memiliki kapital kuat. Singkat kata, revolusi industri Inggris, menimbulkan kompleksitas masalah sosial. Pada sisi lain, revolusi Prancis juga menimbulkan masalah, khususnya dari pendukung status quo yang tidak mau mengaku hasil revolusi. Keinginan pendukung status quo untuk kembali berkuasa menimbulkan situasi politik Prancis tidak stabil.

Kehadiran sosiologi diperlukan guna memberi solusi atas permasalahan sosial di atas. Melalui kemampuannya melakukan diagnosa sosial, sosiologi dipandang mampu menyelesaikan segala permasalahan sosial. Dengan pemahaman yang demikian, sosiologi dianggap menjadi “dokter sosial” bagi segala penyakit masyarakat. Sosiolog (ahli sosiologi) dianalogikan seperti dokter dalam ilmu kedokteran.

Yang membedakannya, sosiolog menjadikan masyarakat sebagai laboratoriumnya, sementara kedokteran tidak.

Logika berpikir yang demikian menempatkan posisi sosiologi sebagai disiplin ilmu yang semakin diperlukan seiring beragam permasalahan sosial yang muncul pada masyarakat modern. Dalam berbagai literatur ilmu sosial, sering ditemukan proposisi bahwa masyarakat modern dengan ciri industrialnya identik dengan masalah sosial. Jika pada masyarakat tradisional dengan sumber ekonomi agraris, permasalahan sosial masih sederhana, maka pada masyarakat industrial permasalahan masyarakat semakin kompleks. Sifat spesialisasi kerja rupanya menyebabkan individu menjadi a-sosial. Segala urusan kehidupan dianggap mampu diselesaikan dengan uang. Maka manusia mulai menjauhkan diri dari hubungan sosial dengan manusia lainnya. Watak manusia modern ini kemudian menjadi identik dengan egoisme dan mau menang sendiri. Pandai memberi kritik, namun miskin solusi. Manusia kemudian menjadi angkuh, sombong, meninggalkan nilai-nilai harmoni sosialnya. Manusia tampil menjadi makhluk yang begitu garang dan mengandalkan rasionalitasnya semata. Segala urusan seolah mampu diselesaikan dengan logika empiris-ilmiah.

Dalam formasi sosial yang demikian, peran institusi sosial seperti keluarga, agama, dan komunitas menjadi dipinggirkan. Agama kehilangan kemampuan mengendalikan perilaku umat, keluarga gagal menjadi lembaga pendidikan moral bagi anggotanya, lingkungan sosial tidak lagi berfungsi sebagai kontrol sosial atas perilaku individu. Tentu saja jika terus dilakukan identifikasi, ada ribuan bahkan jutaan permasalahan sosial di masyarakat modern yang membutuhkan pemikiran dan meminta solusi dari sosiologi. Dalam situasi ini, sosiologi kemudian menjadi disiplin ilmu yang semakin banyak diminati. Hampir semua perguruan tinggi baik yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah Departemen Agama di Indonesia sekarang mengajarkan sosiologi. Yang ingin penulis katakan adalah, sosiologi kini telah tampil sebagai ilmu mandiri yang mengalami kemajuan pesat di Indonesia.

D. Definisi Politik

Perbincangan tentang konseptualisasi politik telah berlangsung cukup lama, namun sama halnya dengan ilmuwan sosiologi, para ilmuwan politik juga tidak memiliki kesepakatan soal epistemologi tunggal tentang politik. Politik dapat

dipahami dari persektif politik realis dan perspektif politik normatif. Sebagai perspektif realis, politik bisa bermakna kekuasaan, yaitu seputar bagaimana cara mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Praktisi politik seringkali menempatkan kekuasaan sebagai tujuan politik. Dalam pemahaman ini, tugas utama politisi hanyalah sampai pada kekuasaan, meskipun dengan berbagai cara dan semua cara dipandang halal. Politisi sejati, menurut perspektif ini adalah politisi yang cerdas bukan yang pandai. Politisi sejati adalah politisi yang bisa berperan seperti srigala sekaligus kancil. Kuat dan keras, sekaligus licin dan cerdas. Politisi sejati adalah yang dapat berperan seperti “katak berenang”. Cobalah kita memperhatikan katak berenang, Cara katak berenang, agar sampai dipermukaan adalah sikut kiri-sikut kanan, injak bawah, dan jilat atas. Meskipun ajaran politik ini tidak mempedulikan aspek etika, namun realitas politik di seluruh lokus politik hampir sama.

Berbeda dengan politik realis, politik normatif menempatkan posisi politik sebagai instrumen atau alat, bukan tujuan. Maka politik dipahami sebagai usaha atau ikhtiar mencapai tujuan yang disepakati bersama dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Maka politik lebih dekat untuk

dipahami sebagai kebijakan (*policy*). Dengan demikian politik itu tidak jahat, sebaliknya, politik bertujuan mulia. Pertanyannya, siapa yang mendefinisikan makna mulia, lantas siapa yang diperlukan agar tujuan mulia dari politik dapat tercapai.

Jawabnya adalah kekuasaan. Politik memerlukan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Politisi membutuhkan kekuasaan agar dapat membuat kebijakan politik guna mencapai tujuan bersama. Politisi tidak akan dapat membuat *policy*, apabila tidak menduduki jabatan politik (katakanlah DPR/D) yang disamakan dengan kekuasaan. Maka, kekuasaan itu bukan tujuan melainkan alat, agar dapat membuat *policy*. Tentu saja seseorang yang berada di luar pemerintah (Presiden, DPR, Gubernur, DPRD) tidak akan dapat berbuat untuk menghadirkan tujuan mulia dari politik, apabila tidak memiliki kekuasaan. Maka dalam perspektif ini, posisi kekuasaan bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat.

Terdapat banyak batasan tentang politik yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Robert Dahl. Dahl mendefinisikan politik dengan metode yang lebih teknis, dengan mengungkapkan politik sebagai “*who gets what, when and*

how”, artinya siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana.¹⁶ Dalam kajian politik, kata “siapa” bisa merujuk pada sekelompok orang yang memberikan suara atau kontestan dalam pemilu. Contoh bentuk konsep ini, para fungsionaris memberikan visi dan misi politik partainya, atau para elit politik membicarakan suatu kebijakan politik yang berpengaruh pada masyarakat umum, atau bisa saja sekelompok masyarakat memperbincangkan visi, misi dan program calon kepala daerah. Kesemua contoh ini merupakan sebagian kecil dari aktivitas politik, tentu saja menjadi wilayah kajian ilmu politik.

Dalam bukunya dengan judul asli “*Politics4th edition*” Andrew Heywood mengungkapkan, makna politik itu amat luas. Politik adalah aktivitas, melalui mana masyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka. Lebih lanjut, Heywood menjelaskan makna politik dari beberapa sudut pandang, sebagai berikut.¹⁷

¹⁶ Elly M.Setiadi & Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, diterbitkan oleh Kencana Prenada Group, 2013 : hlm.136

¹⁷ Andrew Haywood, Politik Edisi Keempat (Pustaka Pelajar, 2013), hlm.5-16

1. Politik sebagai seni pemerintahan

Politik merupakan seni pemerintahan, yaitu penyelenggaraan kontrol di masyarakat melalui pembuatan dan penegakan keputusan bersama. Kata politik berasal dari kata “polis”, artinya “negara kota atau kota-praja”. Maka politik adalah semua hal yang menyangkut polis, atau bentuk modernnya adalah semua hal yang menyangkut negara. Dari rumusan ini tergambar bahwa orang di sebut “berkecimpung dalam politik” ketika mereka memegang jabatan publik, atau memasuki dunia politik.

Dengan penjelasan di atas, dapat disebutkan narasi bahwa mempelajari politik adalah mempelajari pemerintahan, atau lebih luas lagi, mempelajari penyelenggaraan kekuasaan. Pandangan Heywood di atas, di dukung oleh ilmua politik Amerika Serikat David Easton (1979), yang mendefinisikan politik sebagai “alokasi nilai secara otoriter”.Ketika negara di urus secara otoritatif, cenderung memunculkan persepsi politik itu sebagai sesuatu yang negatif. Persepsi ini dipertegas oleh Lord Acton (1834-1902). Ia mengatakan “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut benar-benar korup”. Pertanyaannya bagaimana cara menghindari pemerintahan yang korup?.

Bagi penulis, mengelola pemerintahan merupakan manajemen. Dan salah satu fungsi manajemen yang diperlukan adalah fungsi pengendalian. Cara efektif mengendalikan pemerintahan adalah dengan metode pembatasan dan distribusi kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menunjuk pada pembatasan masa jabatan terhadap jabatan-jabatan politik strategis, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden termasuk pembatasan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun distribusi kekuasaan menunjuk pada distribusi kekuasaan secara horisontal dan vertikal. Secara horizontal kekuasaan dapat di bagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan kekuasaan vertikal misalnya kekuasaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

2. Politik sebagai urusan publik

Politik adalah sebuah aktivitas etis yang berkenaan dengan usaha menciptakan sebuah masyarakat yang adil. Inilah yang oleh Aristoteles disebut sebagai “ilmu pengetahuan pokok”. Konseptualisasi tentang urusan publik dapat beragam ukuran. Bagi penulis, urusan publik dilihat dari beberapa parameter, seperti; sumber pembiayaannya adalah

publik, produknya adalah kepentingan publik, penyelenggaranya adalah organisasi publik.

3. Politik sebagai kompromi dan konsensus

Politik adalah sebuah cara untuk memecahkan konflik, yaitu dengan kompromi, perdamaian dan negosiasi, daripada melalui kekuatan atau senjata terhunus. Politik adalah aktivitas di mana kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam sebuah unit pemerintahan tertentu, didamaikan dengan member mereka bagian dalam kekuasaan sebanding dengan peran mereka bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup seluruh masyarakat. Definisi di atas secara hakiki ingin menjelaskan makna politik sebagai pembagian kekuasaan. Biasanya dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok, konflik kekuasaan selalu terjadi. Dan kepentingan-kepentingan kelompok harus didamaikan, tetapi mereka tidak bisa begitu saja dihancurkan. Maka politik merupakan solusi bagi problem tatanan atau ketertiban yang memilih perdamaian daripada kekerasan dan pemaksaan.

4. Politik sebagai kekuasaan

Pandangan ini merupakan yang paling luas dan paling radikal. Pandangan ini beranggapan politik berlangsung di

sema aktivitas sosial dan di setiap sudut dari aktivitas manusia. Politik merupakan jantung dari semua aktivitas social kolektif, formal maupun informal, publik maupun privat, di semua kelompok, hingga lembaga dan masyarakat. Politik berlangsung di setiap level interaksi sosial, keluarga, organisasi hingga negara. Disini politik didefinisikan sebagai kekuasaan; kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, apapun caranya. Maka lagi-lagi disinilah politik didefinisikan sebagai “*who gets what, when and how*”, artinya siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana.

Persoalan selanjutnya, seperti apa ilmu politik itu? Miriam Budiardjo mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan.¹⁸ Jadi segala kajian yang mendalami fenomena kepolitikan merupakan ilmu politik. Lebih lanjut Miriam Budiardjo membagi kajian ilmu politik kedalam empat kelompok, sebagai berikut:

- I. Teori politik
 - a. Teori politik
 - b. Sejarah perkembangan ide-ide politik

¹⁸ Miriam Budiardjo, Prof, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.13

- II. Lembaga-lembaga politik
 - a. Undang-Undang Dasar
 - b. Pemerintah Nasional
 - c. Pemerintah Daerah dan Lokal
 - d. Fungsi ekonomi dan social dari pemerintah
 - e. Perbandingan lembaga-lembaga politik
- III. Partai politik, golongan-golongan, dan pendapat umum
 - a. Partai-partai politik
 - b. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi
 - c. Partisipasi warga Negara dalam pemerintah dan administrasi
 - d. Pendapat umum
- IV. Hubungan internasional
 - a. Politik internasional
 - b. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional
 - c. Hukum internasional

Beberapa ilmuan lain mendefinisikan ilmu politik secara universal. Ikhsan Darmawan, mendefinisikan ilmu politik sebagai kumpulan pengetahuan logis dan sistematis tentang politik. Darmawan menegaskan, salah satu cara pandang ilmu politik dalam melihat politik adalah politik sebagai proses penentuan kebijakan dari sekian banyak alternatif

kemungkinan yang tersedia.¹⁹ Pada bagian selanjutnya Darmawan meminjam pandangan Roger Soltau dalam mendefinisikan ilmu politik. Menurut Soltau, ilmu politik adalah studi yang mempelajari tentang politik.²⁰ Apabila dilakukan konversi dengan pandangan Heywood tentang makna politik, maka ilmu politik merupakan studi yang mempelajari tentang pemerintahan, urusan publik, kompromi dan konsensus, serta studi tentang kekuasaan.

E. Ringkasan

Sosiologi secara universal merupakan ilmu tentang masyarakat. Dan sosiologi secara spesifik merupakan analisis sistematis tentang struktur tindakan sosial. Masih dalam pengertian yang spesifik, sosiologi juga menyangkut kajian tentang hubungan gejala social dan non-social, stratifikasi sosial, interaksi sosial, perubahan sosial (dinamika sosial), interaksi sosial, hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, hingga hubungan kelompok dengan kelompok.

¹⁹ Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik* (Jakarta, PT.Kompas Media Nusantara, 2015), hlm.2

²⁰ *Ibid*, hlm. 5

Politik merupakan konsep yang menjelaskan siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana, proses dimana masyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum. Politik juga dijelaskan dari beberapa sudut pandang, yaitu; politik sebagai seni pemerintahan, politik sebagai urusan publik, politik sebagai kompromi dan konsensus, dan politik sebagai kekuasaan. Sebagai disiplin ilmu, ilmu politik membahas; teori politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, golongan-golongan, dan pendapat umum, serta hubungan internasional.

Memperbincangkan politik dalam Islam sebaiknya merujuk pada Al-Quran dan praktik politik Nabi Muhammad SAW. Misi politik Islam adalah menyebarkan *amar ma`ruf nahi munkar*, dan cara kerja politik Islam adalah toleran, mengedepankan kepemimpinan moral, peduli pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perihal politik dalam pandangan Islam di Indonesia, terdapat tiga kelompok mazhab, yaitu mazhab Formalisme Islam, mazhab Substansialisme Islam, dan mazhab Sekularisme Islam. Mazhab pertama tidak menerima kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Syariat Islam. Menurut mazhab ini, jika Pancasila di rubah dengan Syariat

Islam, maka akan turun berkah Tuhan dan segera turun kemakmuran, yang disebut dengan prinsip *baladun tayibatun warabun ghafur*. Yang lebih diutamakan adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu dijewantahkan dalam kehidupan politik, bukan terjebak pada formalisme sebagaimana mazhab pertama. Mazhab ini memiliki empat argumentasi, *Pertama*, tidak ada bukti yang tegas bahwa al-Quran dan sunnah mewajibkan kaum muslim untuk mendirikan negara Islam. *Kedua*, kelompok substansial mengakui bahwa Islam memberikan seperangkat prinsip-prinsip sosial-politik. seperti; keadilan (*justice*), kejujuran (*honesty*), terbuka (*transparency*), tanggung jawab (*responsible*), musyawarah (*agreement*). *Ketiga*, karena Islam dipandang sebagai agama yang kekal, maka pemahaman kaum muslim terhadap Islam tidak boleh dibatasi hanya kepada pengertian formal dan legalnya. *Keempat*, kelompok substansial meyakini bahwa Allah mengetahui kebenaran mutlak.

Adapun mazhab sekulerisme Islam secara tegas memisahkan antara urusan Islam dengan urusan negara. Islam mengurus soal ibadah kepada Tuhan. Sedangkan negara memiliki urusan tentang soal dunia, seperti kemiskinan,

keamanan, pendidikan, kesehatan. Negara tidak ikut-ikutan mengurus soal ibadah atau keimanan masyarakat.

Bab 3

FILOSOFI SOSIOLOGI POLITIK

Memahami konsep dasar terhadap makna, ruang lingkup dan sejarah suatu disiplin ilmu, merupakan kebutuhan utama sebagai pondasi memperdalam ilmu pengetahuan tersebut. Pada pembahasan bab sebelumnya, telah didiskusikan seputar makna Sosiologi dan Politik. Catatan hasil diskusinya menunjukkan, meskipun dua disiplin ilmu ini berbeda, namun memiliki kedekatan dan keterkaitan ketika menjelaskan fenomena kepolitikan. Pertanyaan mendasarnya kemudian adalah; apa definisi sosiologi politik ?, apa saja ruang lingkup bahasan sosiologi politik ?, dan bagaimana sejarah kelahiran sosiologi politik ?. Bab tiga disajikan untuk menemukan jawaban dasar atas pertanyaan-pertanyaan di atas.

Sudah barang tentu ada banyak literatur yang memberikan ulasan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, diskusi pada bab ini bukan dimaksudkan untuk menemukan definisi,

ruang lingkup, dan sejarah tunggal. Sebagaimana beberapa ilmuwan sosial dan politik lainnya, tulisan ini meyakini suatu proposisi bahwa tidak ada terminologi tunggal dalam ilmu sosial. Karena itu, tulisan ini hanya memberikan garis-garis haluan sebagai peta jalan melakukan kajian lebih mendalam tentang tematik di atas. Harapannya akan ada pembahasan lebih mendalam yang dilakukan ilmuwan atau mahasiswa berikutnya.

A. Definisi Sosiologi Politik

Dari penelusuran definisi sosiologi dan politik di atas, dapat didefinisikan sosiologi politik sebagai disiplin ilmu yang mempelajari dua fenomena sekaligus yakni fenomena sosiologis dan fenomena politik. Oleh para ilmuwan sosiologi yang mengkhususkan kajiannya terhadap politik, mereka menyebutkan sosiologi politik sebagai pertemuan kajian antara politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, atau antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik.

21

Objek matria Sosiologi Politik yakni perkawinan teori dan metodologi Sosiolog dan Ilmu Politik. Sedangkan batasan

²¹ Basrowi, Sukidin, Suko Susilo, Sosiologi Politik (Ghalia Indonesia, 2012), hlm.5

objek formanya pada deskripsi, analisis, dan penjelasan tentang gejala sosial politik, terutama menyangkut bagaimana proses terbentuknya kekuasaan dan pola-pola distribusinya dalam masyarakat, bagaimana sosialisasi politik dan komunikasi politik membangun partisipasi politik. Disamping itu, sosiologi politik juga memfokuskan perhatiannya pada sikap dan perilaku politik masyarakat, terutama menyangkut persoalan tentang bagaimana masyarakat mersepon kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa, dan bagaimana masyarakat bersikap dalam pemilihan umum.

Karya Budi Suryadi mengungkapkan sosiologi politik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik.²² Dengan demikian posisi sosiologi politik merupakan jembatan teoritis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik. Sederhananya sosiologi politik merupakan wilayah pertemuan antara sosiologi dan ilmu politik, sebagaimana tampak pada gambar berikut.

²² Budi Suryadi, S.Sos,M.Si, Sosiologi Politik : Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep, diterbitkan oleh IRCiSoD Jogjakarta, 2007 : hlm.7



Gambar 3.1. Wilayah Sosiologi Politik

Gambar di atas menjelaskan bahwa area kajian sosiologi politik adalah menghubungkan antara gejala sosiologis dan gejala politik, menghubungkan antara fenomena masyarakat dengan fenomena negara atau kekuasaan. Singkatnya, sosiologi politik merupakan pertemuan teoritis sekaligus metodologis antara sosiologi dan ilmu politik. Pemahaman ini diperkuat oleh pandangan Basrowi, Sukidin, Suko Susilo, dengan membuat simpulan pengertian sosiologi politik sebagai berikut:

1. Sosiologi politik mempelajari masalah interaksi dan interlesi yang berhubungan dengan negara (*state*)
2. Sosiologi politik mempelajari interaksi dan interlesi yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*)

3. Sosiologi poltiik mempelajari masalah interaksi dan interelasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*)
4. Sosiologi politik mempelajari masalah interaksi dan interelasi yang berhubungan dengan kebijakan (*policy*)
5. Sosiologi politik mempelajari masalah interaksi dan interelasi yang berhubungan dengan pembagian (*distribution*) dan atau alokasi (*allocation*).²³

Dengan melihat paparan definisi di atas, nampaknya kajian sosiologi politik menempatkan sosiologi sebagai referensi untuk mempelajari fenomena kepolitikan. Sosiologi merupakan instrumentteoritis dan metodologis dalam mempelajari politik, baik menyangkut kekuasaan, negara, maupun pemerintahan. Sosiologi politik dapat membantu ilmuan politik atau praktisi politik untuk mengungkap tipologi kekuasaan, gerakan-gerakan sosial, kontestasi ideologi dalam perebutan kekuasaan, hingga distribusi kekuasaan kedalam kelas-kelas sosial. Sosiologi politik juga dapat membantu ilmuan politik dan praktisi politik dalam memetakan perilaku memilih. Dengan begitu, maka hasil kajian sosiologi digunakan sebagai input bagi politisi

²³ Basrowi, Sukidin, Suko Susilo, *ibid*, hlm 6

dalam menyusun strategi politik dan menjadi referensi utama bagi ilmuwan politik dalam mempelajari objek kajiannya.

B. Ruang Lingkup Sosiologi Politik

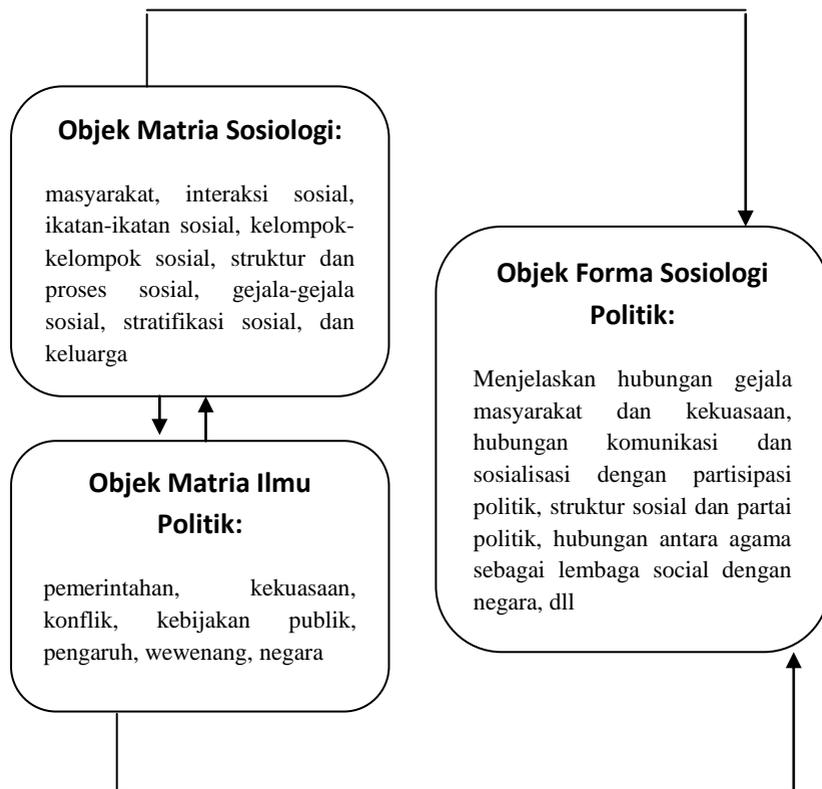
Pandangan para ahli tentang ruang lingkup (objek) kajian sosiologi politik masih beragam. Berikut dipaparkan beberapa sumbangan pemikiran para ahli yang penulis kutip dari dari bukunya Basrowi, Sukidin, Suko Susilo .

1. Tom Bottomoro (1992) mengungkapkan cakupan sosiologi politik, sebagai berikut; (a) pembahasan mengenai demokrasi dan kelas-kelas sosial; (b) pembahasan mengenai gerakan-gerakan sosial, partai politik, dan aksi politik; (c) pembahasan mengenai tipe-tipe sistem politik; (d) pembahasan mengenai perubahan politik dan konflik; (e) pembahasan mengenai terbentuknya negara-negara, nasionalisme, dan pembangunan
2. Maurice Duverger (1993), menyebutkan ruang lingkup sosiologi politik adalah; pertama, pembahasan mengenai struktur politik, terdiri atas; (a) struktur fiskal, (b) struktur sosial. Kedua, pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab antagonisme politik, meliputi;

- (a) sebab-sebab individual; (b) sebab-sebab kolektif; (c) antagonisme menuju integrasi; (d) integrasi dan kekuasaan.
3. Michael Rush dan Philip Althoff, mengungkapkan ruang lingkup kajian sosiologi politik adalah; (a) sosiologi politik; (b) partisipasi politik; (c) perekrutan politik; (d) komunikasi politik.

Apabila melihat jenis objek kajian ilmu pengetahuan secara umum, maka ada dua macam objek kajian yang harus ada untuk dapat di sebut sebagai ilmu pengetahuan, yakni objek matria dan objek forma. Objek matria merupakan muatan fisik dari disiplin ilmu. Maka dapat dibuat identifikasi objek matria kajian sosiologi, seperti; masyarakat, interaksi sosial, ikatan-ikatan sosial, kelompok-kelompok sosial, struktur dan proses sosial, gejala-gejala sosial, stratifikasi sosial, dan keluarga. Sedangkan objek matria ilmu politik, seperti; pemerintahan, kekuasaan, konflik, kebijakan publik, pengaruh, wewenang, negara. Objek forma merujuk pada apakah pokok persoalan yang ingin di jawab oleh suatu disiplin ilmu. Maka objek forma sosiologi politik adalah ingin menjawab bagaimana gejala-gejala sosiologis mempengaruhi gejala-gejala politik. Untuk

memudahkan pemahaman tentang objek kajian sosiologi politik dapat di lihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2. : Pemetaan Objek Kajian Sosiologi Politik

C. Sejarah Sosiologi Politik

Hingga saat ini sudah terdapat banyak penulis sosiologi politik yang membahas sejarah kelahiran disiplin ilmu ini.

Salah satunya adalah buku yang di tulis oleh A.A.Said Gatara dan Moh.Azulkih Said , tahun 2007. Mereka mengemukakan;

“sosiologi politik lahir dari dinamika tradisi logika dialektika dalam perkembangan *scientific*, yakni tesis, antithesis, dan sintesis. Sosiologi politik lahir dari sintesis ilmu sosiologi dan ilmu politik, yang telah berkembang sebelumnya. Bahkan proses sintesis ilmu, seperti penggabungan sosiologi dan politik menjadi sosiologi politik, telah menggejala dikalangan ilmuan. Mereka mulai banyak memikirkan cara melihat suatu realitas dengan analisis prespektif penggabungan disiplin ilmu. Misalnya, politik ekonomi, psikologi politik, sosiologi ekonomi, komunikasi politik, sosiologi komunikasi, dan sebagainya”.²⁴

Dalam usaha menjawab persoalan masyarakat yang semakin kompleks, nampaknya hampir setiap disiplin ilmu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kajian secara mandiri. Fenomena ekonomi tidak dapat dijelaskan secara ansih dengan jendela ilmu ekonomi. Oleh karena fenomena ekonomi berhimpitan dengan stratifikasi sosial, budaya, struktur sosial, hingga perubahan sosial, maka muncul sintesis sosiologi ekonomi. Ketika fenomena komunikasi di baca sebagai salah satu persyaratan dalam hubungan sosial, maka muncullah sintesis Sosiologi Komunikasi. Demikian halnya

²⁴ A.A.Said Gatara & Moh.Dzulkih Said, Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian (Bandung, Pustaka Setia, 2007), hlm.41

dengan fenomena politik, ketika kekuasaan sebagai salah satu entitas dalam masyarakat, maka penjelasannya memerlukan pemikiran sosiologi. Guna menjawab kebutuhan ini lahirlah Sosiologi Politik. Dengan demikian, Sosiologi Politik lahir dari sintesis atas sosiologi dan politik.

Pertanyaannya, kapan persisnya sosiologi politik lahir ?. Tidak mdah menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Ilmuwan sosiologi nampaknya belum menemukan kata sepakat tentang kapan persisnya sosiologi politik lahir. Sebagai referensi awal, penulis menawarkan pendapat A.A.Said Gatara & Moh.Dzulkihah Said. Mereka memberi bayangan sosiologi politik lahir sekitar paska abad ke-19, terutama setelah konsep sosiologi yang diperkenalkan oleh Augiste Comte tahun 1839 mulai mendapat posisi di beberapa perguruan tinggi dan di kalangan ilmuwan sosial.

Pada awalnya ada dua pemikiran ilmuwan sosial tentang sosiologi politik. *Pertama*, sosiologi politik di anggap sebagai ilmu tentang negara. *Kedua*, sosiologi politik di anggap sebagai ilmu tentang kekuasaan. Karya Maurice Duverger tahun 1985, menegaskan bahwa kategori kedua lebih berkembang luas daripada yang pertama. Menurut Duverger, konsep sosiologi politik sebagai ilmu negara mempertalikan antara kata “politik”

dan kata “negara”. Disini sosiologi politik diklasifikasikan dalam ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada hakekat dari masyarakat-masyarakat yang dipelajari yang turunannya membahas negara-bangsa (*nation-state*).²⁵

Singkatnya, perbedaan pandangan di atas memberi implikasi pada dua bidang kajian sosiologi politik. *Pertama*, perspektif yang menjadikan sosiologi politik sebagai kajian tentang negara. Perspektif ini beranggapan bahwa negara sebagai suatu jenis masyarakat yang sempurna, bebas dari setiap kelompok yang lain, namun menguasai segala-galanya. Negara di pandang sebagai “berdaulat”. Oleh karena itu, pemerintah negara mempunyai sifat khusus yang tidak dimiliki oleh pemimpin jenis-jenis kelompok lain dengan apa yang di sebut kedaulatan.

Kedua, perspektif yang menjadikan sosiologi politik sebagai ilmu tentang kekuasaan, berpandangan bahwa kekuasaan sebagai aktivitas yang dilaksanakan oleh negara adalah berbeda dari yang dilakukan oleh kelompok lain. Dengan demikian, pembahasan kekuasaan dalam perspektif yang kedua, bukan hanya bertalian dengan negara, tetapi juga

²⁵ Maurice Duverger, 1985, Sosiologi Politik, Terjemahan Daniel Dhakidae, Rajawali Press

kekuasaan yang melekat dalam kelompok-kelompok lainnya, mulai dari bagaimana kekuasaan itu di peroleh atau di rebut, dipegang, dan dipertahankan. Perspektif ini lebih melihat pada bagaimana proses kekuasaan itu di capai, sehingga pembahasannya diarahkan pada bentuk-bentuk sosialisasi, partisipasi, rekrutmen, komunikasi, dan sebagainya.

Dalam usaha mendapatkan pembahasan sosiologi politik yang lebih komprehensif, sebaiknya dua perspektif di atas tidak perlu dipertentangkan. Negara dan kekuasaan merupakan dua konsep yang berbeda namun memiliki keutuhan sekaligus keterhubungan. Membahas negara tidak dapat dilepaskan dari tema kekuasaan, demikian sebaliknya. Tulisan ini menawarkan konsepsi tentang sosiologi politik sebagai cabang ilmu sosiologi yang mengkhususkan kajiannya pada negara dan kekuasaan.

D. Ringkasan

Secara historis, sosiologi politik lahir pada pasca abad ke-19 sebagai sintesis atas ilmu sosiologi dan ilmu politik. Sosiologi politik lahir dari proses mempertemukan penjelasan-penjelasan sosiologi dan ilmu politik. Para ahli sosiologi politik, menggunakan sosiologi sebagai alat untuk membuat

telaah terhadap fenomena kepolitikan. Dengan demikian cara berpikir sosiologi politik adalah menggunakan sosiologi sebagai perspektif dalam melihat fenomena kepolitikan. Sosiologi politik, juga merupakan area yang menghubungkan antara gejala sosiologis dan gejala politik, menghubungkan antara fenomena masyarakat dengan fenomena kekuasaan dan negara, dan area pertemuan teoritis maupun metodologis antara sosiologi dan ilmu politik.

Ruang lingkup kajian sosiologi politik adalah; sosialisasi politik, partisipasi politik, kekuasaan, komunikasi politik, demokrasi, partai politik, dan pemilu. Meskipun demikian, ahli sosiologi politik juga dapat menjawab beberapa isu mutakhir, seperti kontestasi ideologi di area politik, masyarakat multikultural, *civil society* dan demokrasi, hingga isu-isu seputar agama dan politik. Dewasa ini misalnya isu radikalisme berbasis ideologi agama sedang mencuat kepermukaan. Hampir seluruh negara-negara dibelahan dunia sedang mengalami ketakutan terhadap serangan terorisme. Dan pemerintah negara-negara dunia sedang mencari konstruksi kebijakan mengatasi persoalan ini. Sosiologi politik dapat hadir dan memberikan tawaran solusi-solusi alternatif guna menyelesaikan keresahan tersebut.

Bab 4

KEKUASAAN

Kekuasaan, merupakan tema utama dalam studi ilmu politik. Begitu kuatnya pendalaman tentang kekuasaan, menyebabkan ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan yang dilabelkan sebagai disiplin ilmu tentang kekuasaan. Tidak berlebihan kemudian ketika masyarakat berniat belajar tentang ilmu politik, yang ada dalam benak mereka adalah mereka ingin belajar tentang kekuasaan. Kebanyakan mahasiswa yang di tanya mengenai motivasi mereka mengambil jurusan ilmu politik memberikan testimoninya kurang lebih menyebutkan, mereka ingin mempelajari seluk beluk tentang kekuasaan, cara kerja kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan dikelola.

Perbincangan tentang kekuasaan merupakan tematik yang tidak pernah luntur, karena pada dasarnya sejarah peradaban dan sejarah kebudayaan manusia, merupakan refleksi dari kekuasaan. Kekuasaan ada di mana saja, kapan saja, dan dalam

semua jenis hubungan sosial manusia. Kekuasaan ada dalam keluarga, komunitas, masyarakat, bangsa, dan negara. Kekuasaan melekat pada sifat dan perilaku manusia rasional. Oleh karena itu, setiap manusia yang memiliki rasio atau akal sehat, mesti didalamnya ada kebutuhan akan kekuasaan. Yang membedakan manusia satu dengan yang lain hanyalah bobot kekuasaan yang sedang dia butuhkan, dan motivasi mendapatkan kekuasaan.

Dalam perbincangan penulis dengan beberapa kelompok masyarakat, seringkali terlontar pertanyaan seputar apa motivasi seseorang yang secara ekonomi sudah di atas garis kemapanan, tetapi mereka masih memerlukan kekuasaan di lembaga legislatif atau lembaga eksekutif ?. Pertanyaan ini muncul atas beberapa fenomena, misalnya seseorang yang sudah sukses sebagai pembisnis tetapi masih bersedia mengeluarkan asset-aset ekonominya sebagai biaya politik dalam pencalonan anggota DPR, DPRD atau kepala daerah. Apabila dibuat perhitungan matematika, antara gaji yang akan dia peroleh sebagai anggota parlemen, misalnya masih jauh lebih besar dibandingkan penghasilan sebagai pengusaha. Namun mereka masih harus memerlukan kekuasaan kursi tersebut. Tentu jawaban atas pertanyaan ini masih sangat

debatebel, penulis memberikan saran agar penanya mempelajari kembali apadefinisi dan manfaat kekuasaan itu, serta bagaimana motivasi manusia mendapatkan kekuasaan.

A. Definisi Kekuasaan

Kekuasaan merupakan konsep yang begitu terbuka untuk didefinisikan, bahkan kekuasaan itu sendiri membuka dirinya untuk dimaknai dari banyak sudut pandang. Hingga saat ini, belum ditemukan definisi tunggal tentang kekuasaan. Redefinisi yang terus-menerus terhadap kekuasaan tentu harus diletakkan sebagai energi yang secara simultan memproduksi beragam makna tentang kekuasaan. Dengan reproduksi secara terus-menerus, tentu dapat memperkaya literasi tentang tema seputar kekuasaan itu.

Salah satu tokoh ilmuwan sosial terkemuka yang bicara tentang kekuasaan adalah Thomas Hobbes tahun 1651. Hobbes merupakan tokoh yang hidup disepular tahun 1588-1679. Namun ilmuwan sesudah Hobbes hingga saat ini menjadikan konsep Hobbes sebagai *buleprint* dalam memaknai kekuasaan. Hobbes sendiri memposisikan kekuasaan itu sebagai instrumen yang dapat menjadikan kehidupan seseorang yang memilikinya

menjadi lebih bagus.²⁶ Pemilik kekuasaan akan mendapatkan kemajuan dalam banyak aspek, baik perekonomian, status sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan memiliki kekuasaan, maka seseorang akan mendapatkan akses ekonomi lebih terbuka dibandingkan orang kebanyakan. Ketika seorang pengusaha mendapatkan kekuasaan di DPR/D, maka ia akan mendapatkan akses berbisnis lebih terbuka di situ, oleh karena ia menguasai anggaran negara serta peruntukannya. Demikian halnya ketika seseorang menjabat sebagai kepala daerah, maka sebagai pengambil kebijakan, ia dapat lebih leluasa mengarahkan sebagian dari sumber daya daerah untuk kehidupan keluarga atau koleganya.

Pembacaan kekuasaan dengan menggunakan perspektif Hobbes di atas memang cenderung menaruh curiga atau prasangka terhadap kekuasaan. Meskipun demikian, realitas politik era ini tidak dapat dinapikkan, sebagian politisi masih terperangkap oleh politik pragmatis. Menjadi politisi masih berorientasi membangun pondasi ekonomi menjadi lebih baik. Tak pelak, banyak politisi menggunakan jurus “aji mumpung”, artinya mumpung berkuasa, maka menjadi keharusan

²⁶ Zainuddin Maliki, *Sosiologi Politik Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik* (Gajdjah Mada University, 2010), hlm.6

memaksimalkan masa kekuasaan mengumpulkan sebanyak-banyaknya aset dari keuntungan mengelola sumber daya negara. Akibatnya, ada anggota parlemen memiliki perusahaan dan mengarahkan kebijakan publik pada keuntungan perusahaan, dan berbagai strategi politik pragmatis lainnya. Dampak ikutan dari massifnya perilaku politik pragmatis di atas, kebutuhan rakyat nyaris tidak terurus dengan baik, dan pada akhirnya layar televisi selalu disuguhkan oleh penangkapan oknum anggota parlemen atau oknum kepala daerah oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Menghilangkan kekuasaan dalam kehidupan sosial manusia juga merupakan hal yang mustahil dilakukan. Hobbes mengatakan, manusia itu tidak mungkin dapat menghindarkan diri dari kebutuhan akan kekuasaan yang absolut. Jika manusia adalah pemangsa atas manusia yang lain sebagaimana diyakini Hobbes, maka tertib sosial membutuhkan adanya kekuasaan yang absolut pula. Jika di dalam masyarakat tidak ada penguasa absolut, Hobbes khawatir masyarakat akan menjadi seperti hutan rimba, dimana penghuninya akan saling memakan satu dengan yang lain. Sifat saling menguasai dan ingin mendapatkan lebih besar, merupakan sifat yang melekat dalam diri manusia secara alamiah. Tengoklah misalnya berapa

banyak orang yang menjadi korban saling bunuh sesama saudara karena perebutan warisan harta. Ketika orang tua mereka sudah meninggal, dan tidak ada penguasa absolut dalam keluarga tersebut, orang kemudian bisa berkelahi memperbutkan harta warisan hingga saling membunuh. Gambaran karakteristik manusia yang demikian menyebabkan sifat manusia dalam kondisi tertentu tidak ubahnya seperti karakteristik hewan. Karena itu, sebagian ilmuwan sosial sepakat membuat analogi manusia seperti binatang bermasyarakat. Hobbes kemudian menyatakan manusia merupakan srigala bagi manusia yang lain (*man is in a state of war of all against all*).²⁷

Ilmuan lain yang memberikan sumbangan pemikiran tentang kekuasaan adalah Montesquieu (1689-1755). Ia merupakan salah satu tokoh yang mengkritik pemikiran Hobbes khususnya ketika Hobbes menganalogikan manusia merupakan srigala bagi manusia yang lain. Bagi Montesquieu, hanya manusia yang tinggal di kebudayaan primordial yang mudah terlibat perkelahian, karena pada masyarakat primordial sikap hidup manusia masih dipandu oleh instink melindungi diri sendiri dan kegiatan reproduksi. Pada beberapa tahun yang lampau, masyarakat pedesaan harus membawa senjata tajam

²⁷ Ibid, hlm.6

dalam setiap kali keluar rumah, misalnya ketika mereka ke sawah atau ke pasar. Berdasarkan situasi dilingkungan sosial mereka saat itu, mereka membawa senjata tajam bepergian rumah untuk menjaga dirinya dari serangan manusia lainnya. Dengan demikian manusia pada masa primordial menafsirkan setiap lingkungan sosialnya penuh kejahatan dan keinginan untuk saling menguasai. Sedangkan pada masyarakat perkotaan, fenomena-fenomena tersebut sudah tidak terlihat seiring dengan perubahan sosial yang terus terjadi

Bagi Montesquieu, manusia dipengaruhi oleh banyak iklim, seperti agama, hukum, pemerintahan, berbagai macam peristiwa atau tradisi. Kata Montesquieu, secara esensial semua hal tersebut membentuk spirit. Dan spirit-spirit ini yang mempengaruhi bagaimana sebuah bangsa itu membangun dan menggunakan kekuasaan dalam pemerintahan. Montesquieu kemudian membagi empat tipologi kekuasaan negara republik, yang terdiri dari demokrasi dan aristokrasi, monarki, dan despotism.²⁸ Maliki menampilkan penjelasan Montesquieu, sebagaimana tabel 4.1.

²⁸ Ibid, hlm.7

Tabel 4.1. Model Kekuasaan Montesquieu

	Demokrasi	Aristokrasi	Monarki	Despotism
Karakter pemerintahan (jml. orang yang mengendalikan kekuasaan)	Kekuasaan menyebar di tangan semua orang	Kekuasaan tersebar di tangan beberapa orang	Kekuasaan berada di tangan satu orang	Kekuasaan berada di tangan satu orang
Prinsip pemerintahan	Menghormati penegakan hukum, setiap warga mengabdikan kepada kepentingan umum	Menghormati penegakan hukum, setiap warga mengabdikan kepada kepentingan umum	Penghargaan terhadap individu didasarkan pada status hirarki	Ketakutan
Ukuran	Kecil	Kecil	Moderat	Besar
Semangat bangsa	Kesederajatan partisipatif	Kesederajatan partisipatif	Diskriminasi dan ketidakadilan	Kesederajatan, rasa takut, impotence, dan non-partisipasi
Tingkat stabilitas dan moderasi	Tidak stabil dan tidak moderat dalam menggunakan kekuasaan	Tidak stabil dan tidak moderat dalam menggunakan kekuasaan	Tidak stabil, tidak moderat dalam penggunaan kekuasaan	Tidak stabil, tidak moderat dalam penggunaan kekuasaan

Sumber: Zainuddin Maliki, 2010, hlm.7

Tabel di atas ingin menjelaskan bagaimana kekuasaan dikelola menurut empat doktrin bentuk

pemerintahan. Meskipun Montesquieu mengatakan tiga karena demokrasi dan aristokrasi menjadi satu kelompok.

1. Doktrin Demokrasi

Doktrin demokrasi mengatakan karakter kekuasaan pemerintahan harus tersebar di tangan semua orang. Oleh karena itu, benar juga katanya Huntington, bahwa semua pemimpin politik strategis harus diisi melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat. Penegasan Huntington ini sinergi dengan doktrin demokrasi yang dikemukakan Montesquieu.

Untuk mewujudkan konsepsi di atas, beberapa negara demokrasi sudah mulai menyelenggarakan pemilihan pemimpin-pemimpin politik strategis mereka secara langsung oleh rakyat. Indonesia merupakan negara yang mengamini secara ansih doktrin tersebut. Di rezim reformasi ini, yang dipilih rakyat tidak hanya DPR/D sebagaimana rezim pemerintahan sebelumnya, tetapi presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta walikota dan wakil walikota juga dipilih langsung oleh rakyat. Dengan pemilihan langsung oleh rakyat, maka semua orang memiliki kekuasaan itu. Meskipun demikian, pola kekuasaan juga dipengaruhi oleh praktek sistem politik suatu negara.

Di Indonesia, meskipun sistem politik yang digunakan adalah presidensial, namun rakyat hanya memiliki kekuasaan pada saat pemilu, setelah itu rakyat menjadi penonton, untuk tidak disebut sebagai objek demokrasi. Dalam sistem politik Indonesia hari ini, tidak ada mekanisme yang disediakan untuk rakyat dalam melakukan kontrol langsung pada pemimpin politik yang mereka beri mandat ketika pemilu dahulu. Ruang rakyat untuk membuat kontrol politik hanya kurang lebih tiga menit ketika mereka berada dalam bilik suara pada suatu pemungutan suara. Sementara pemungutan suara hanya terjadi setiap lima tahunan. Sistem yang demikian, mengindikasikan ketidakmampuan bangsa untuk membangun karakter pemerintahan demokratis.

Dari sisi prinsip-prinsip umum pemerintahan, doktrin demokrasi menegaskan negara harus menghormati penegakan hukum, dan setiap warga mengabdikan kepada kepentingan umum. Doktrin ini lebih merupakan spirit kerja penyelenggara negara sekaligus spirit kehidupan sebuah bangsa yang mestinya terinternalisasi dalam kedirian setiap warga. Ketika internalisasi spirit ini telah menjadi nilai, maka prinsip pemerintahan yang demikian menjadi habitus bangsa. Mewujudkan konstruksi ideal semacam ini memerlukan waktu

panjang dan komitmen politik seluruh komponen bangsa. Dalam posisi yang demikian, demokrasi memperlihatkan dirinya tidak lebih dari sekedar nilai daripada sebagai prosedur. Sebagai nilai, demokrasi menjadi berwatak universal dan terkesan subjektif. Demokrasi akhirnya tidak memiliki indikator kinerja yang dapat digunakan untuk membuat evaluasi perkembangan dari masa ke masa. Dalam titik nadi yang demikian, demokrasi kemudian menjadi perspektif mengelola pemerintahan dan kehidupan bersama.

Pada aspek ukuran, demokrasi akan terbangun dengan baik apabila dipraktikkan dalam wilayah kecil. Keberhasilan demokrasi negara Athena, misalnya, dapat dimaklumi mengingat jumlah warga negaranya terbatas yakni sekitar 350.000 orang. Bagaimana menerapkan doktrin demokrasi pada negara-negara dengan penduduk besar, tersebar di wilayah kepulauan, dan terdiri dari banyak suku, agama, bahasa. Strategi politik yang paling sederhana membangun demokrasi dengan format skala kecil yang hingga saat ini diyakni, yaitu melalui manajemen desentralisasi dan pemberian otonomi kepada unit-unit dibawah pemerintah pusat. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengambil pilihan terhadap manajemen ini. Sejak tahun 1999, melalui undang-undang

nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kemudian diganti oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004, dan terakhir melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Indonesia mendistribusikan kekuasaan ke daerah kabupaten/kota dan provinsi.

Dalam hal pengelolaan hubungan-hubungan sosial, demokrasi membangun doktrin kesedarajatan partisipatif. Demokrasi tidak mengenal supraordinat dan subordinat dalam manajemen hubungan sosial para warga negara atau warga negara dengan pemerintah. Bagi demokrasi, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam politik, pemerintahan dan hukum. Demokrasi menentang keras dominasi antar kelas, demokrasi juga menentang hegemoni kekuasaan atas kelompok yang lain.

2. Doktrin Aristokrasi

Dari sisi karakter pemerintahan, aristokrasi mengajarkan kekuasaan tersebar di tangan beberapa orang. Apabila demokrasi menekankan pada posisi yang sama pada semua orang, maka aristokrasi meyakini kekuasaan tidak perlu harus diberikan pada semua orang, tetapi cukup oleh beberapa orang yang merepresentasikan semua orang. Aristokrasi merupakan

doktrin yang lebih meyakini sistem perwakilan daripada keterlibatan langsung semua orang. Maka aristokrasi lebih dekat dengan sistem perwakilan dari pada pemilihan langsung. Apabila aristokrasi ditanya soal pemilihan kepala daerah langsung misalnya, maka aristokrasi cenderung tidak setuju. Bagi aristokrasi, pemilihan kepala daerah oleh parlemen (anggota DPRD) masih lebih baik dibandingkan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dengan begitu, tidak semestinya negara ini menghabiskan energi, anggaran dan harus terjebak pada pengkotak-kotaan di tengah pemilihan kepala daerah langsung. Pemilihan oleh DPRD dipandanginya adalah sah dan dapat menghemat anggaran negara dan biaya politik bagi peserta pemilu..

Terhadap prinsip-prinsip umum pemerintahan, aristokrasi menghormati penegakan hukum dan setiap warga mengabdikan kepada kepentingan umum. Aristokrasi sangat menentang keserakahan ekonomi pemimpin-pemimpin politik terpilih. Aristokrasi juga menentang keras kesewenang-wenangan penguasa dan masyarakat sipil. Aristokrasi membangun doktrin bahwa hukum adalah pahlawan yang harus di junjung tinggi, siapapun warga negara tidak ada yang kebal terhadap hukum, dan siapapun penyelenggara negara, tugas utamanya adalah

untuk kepentingan umum, bukan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

Dalam memandang tingkat stabilitas dan moderasi, aristokrasi meyakini tidak ada aktor yang dapat menjalankan kekuasaan dengan stabil dan tidak moderat. Oleh karena kekuasaan tersebut di pegang beberapa orang, maka dapat muncul berbagai kemungkinan. Misalnya saja, kelompok-kelompok yang berkuasa berbagi kekuasaan secara adil berdasarkan kesepakatan mereka. Dan kekuasaan yang telah terbagi tersebut dijaga dan dibatasi aksesnya terhadap orang lain, sehingga kekuasaan hanya berkembang dalam satu dinasti tertentu. Jika ini yang terjadi maka bentuk pemerintahan aristokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tidak jelas pendiriannya. Karena itu, secara teknis, aristokrasi termasuk yang jarang digunakan di dunia yang lain.

3. Doktrin Monarki

Menurut doktrin monarki, karakteristik pemerintahan yang ideal adalah apabila kekuasaan berada di tangan satu orang. Pemerintahan akan menjadi lebih efektif dan lebih menjanjikan stabilitas politik apabila kekuasaan tidak di bagi-bagi, melainkan dipegang oleh satu orang. Dalam tradisi monarki,

biasanya penerus dari kekuasaan yang ada berdasarkan keturunan. Maka monarkhi tidak mengenal pemilihan sebagai cara mengisi kekuasaan politik.

Monarki memiliki prinsip pemerintahann yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap individu, dan penghargaan tersebut didasarkan pada status hirarki. Dalam monarki loyalitas warga negara secara personal pada penguasa, seperti raja. Penguasa diposisikan sebagai simbol negara yang memiliki banyak kebermaknaan. Karena itu, dalam pemerintahan monarki penguasa politik selain disakralkan juga dipandang sebagai utusan Tuhan yang harus dijaga untuk keselamatan bersama.

Meskipun banyak mendapat krtik dari pemikir-pemikir kontemporer, monarki dapat menunjukkan keberhasilannya di beberapa negara. Sebut saja misanya Brunai Darussalam, merupakan salah satu negara yang pembangunannya dikategorikan berhasil, termasuk stabilitas politik tetap terjaga dengan baik. Demikian halnya dengan Malyasia, Inggris dan banyak negara-negara monarki lainnya yang pertumbuhan ekonomi masyarakatnya dikategorikan gemilang. Dengan demikian, bagi monarki, apa yang dibayangkan oleh demokrasi tidak lebih dari ilusi, hanya menyuguhkan janji manis yang tak

kunjung terwujud. Di beberapa negara demokrasi, justru yang terjadi adalah mereka gagal meresolusi konflik, hingga terancam oleh gejala disintegrasi. Demikian, kritik monarki terhadap demokrasi.

Selain Montesquieu, tokoh sosiologi klasik yang menjadi rujukan perbincangan kekuasaan dalam sosiologi politik adalah Max Weber. Dalam bukunya *The Theory of Social and Economic Organization* (1947), Weber menyatakan, "kekuasaan adalah kemungkinan seseorang dalam relasi sosialnya berada dalam posisi bisa menjalankan apa yang diinginkan, meskipun menghadapi resistensi".²⁹ . Jika menelisik dengan seksama definisi ini, ada dua aspek yang ditonjolkan oleh Weber dalam memandang kekuasaan. *Pertama*, adalah "**kehendak**", merujuk pada yang diinginkan oleh seseorang. *Kedua*, adalah "**power**", merujuk pada kewenangan atau otoritas.

Power dapat menjadi instrument bagi seseorang dalam menjalankan kehendak-kehendaknya. Sebagai contoh, seorang kepala daerah hanya akan dapat mewujudkan kehendaknya untuk mengentaskan kemiskinan melalui kewenangan yang dimilikinya. Sebagai kepala daerah, ia memiliki kewenangan

²⁹ Ibid, hlm.10

menggerakkan birokrasi, dan memutuskan anggaran daerah untuk program-program pengentasan kemiskinan. Dengan begitu, maka posisi kekuasaan dalam politik adalah untuk mewujudkan kehendak.

Bagi Weber, kekuasaan dapat digunakan untuk memaksa orang lain meskipun terjadi resistensi. Di mata Weber, meskipun orang lain tidak setuju terhadap keinginan penguasa, penguasa tetap dapat memaksakan kehendaknya karena adanya kekuasaan yang dimiliki. Misalnya birokrat tidak setuju dengan kehendak kepala daerah mengalokasikan anggaran sebesar 20 % dari APBD untuk program pengentasan kemiskinan. Sementara kepala daerah mengatakan bahwa keputusan politik ini harus dijalankan. Maka sebagai implementator kebijakan, seluruh pejabat birokrasi di daerah bersangkutan harus merealisasikan kehendak kepala daerah bersangkutan. Dengan logika berpikir yang demikian, kekuasaan dapat menjadi alat pemaksaan kehendak.

Dalam pikiran Weber, kekuasaan itu dipraktekkan melalui dua cara, yakni kekuasaan sah dan kekuasaan paksaan. Kekuasaan sah merupakan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan wewenang yang dimiliki. Sedangkan kekuasaan paksaan adalah kemampuan untuk menguasai atau

mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan melalui cara yang tidak sah. Misalnya, seorang Kepala Daerah mendesak Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKDP) untuk membangun jembatan dengan cara penunjukkan langsung dan membuat perintah kepada Kepala SKPD tersebut agar yang di tunjuk adalah perusahaan milik keluarga si kepala daerah. Interpensi kepala daerah tersebut, jelas merupakan kekuasaan yang dijalankan dengan paksaan, karena kepala daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interpensi pelaksanaan program pada ranah teknis, apalagi interpensi tersebut mengandung maksud untuk memperkaya diri sendiri atau keluarga.

Lantas apa sesungguhnya definisi kekuasaan itu ?. Damsar, menyebutkan kekuasaan adalah kemampuan menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, kekuasaan bisa bersumber dari dalam diri atau bersumber dari luar. Yang bersumber dari dalam diri tentu saja adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki, sedangkan yang berasal dari luar karena penghormatan atau kedaulatan yang diberikan oleh anggota kelompok yang dikuasai. Muhtar Haboddin mengutip

pendapat beberapa ahli membagi kekuasaan kedalam dua makna, yaitu kekuasaan sebagai kekuatan dan kekuasaan sebagai pengaruh.

1. Kekuasaan sebagai kekuatan

Dalam pengertian ini kekuasaan dipandang sebagai proses dominasi, proses membangun hegemoni, dan proses menciptakan kekuatan fisik. Kekuasaan dipandang sah dilakukan meskipun dengan paksaan. Dengan begitu, kekuasaan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang dikuasai. Adapun beberapa ahli yang member pandangan senada dengan kekuasaan sebagai kekuatan terangkum pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Definisi Kekuasaan Sebagai Paksaan

Pemikir	Definisi
Yohanes Laba Maram dan Tadjudin N.Effendi (2006)	Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok individu untuk membatasi keinginan kelompok lain, dan mencegah keinginannya dikuasai oleh kelompok tersebut
Assip K.Flectheim (1952)	Kekuasaan adalah keseluruhan kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan di pilih. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.
Miriam Budiardjo	Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara

Pemikir	Definisi
(1990)	yang oleh yang bersangkutan tidak akan di pilih. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya
Jean Baechdler (2001)	Kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan untuk memaksakan kehendak sendiri pada orang lain
Maurce Duverger (1982)	Kekuasaan adalah kekuatan untuk mengatur masyarakat
I Marsana Windhu (1992)	Kekuasaan adalah kemampuan atau kewenangan untuk menguasai orang lain, memaksa dan mengendalikan mereka sampai mereka patuh, mencampuri kebebasannya, dan memaksakan tindakannya dengan cara-cara khusus
Margaret Poloma (1984)	Kekuasaan adalah kemampuan orang atau sekelompok orang memaksakan kehendaknya, dalam bentuk penghukuman dengan memperlakukan sanksi negatif
Robert M.Maciver (1961)	Kekuasaan adalah kemampuan mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan cara member perintah, maupun secara tidak langsung dengan menggunakan segala alat dan cara yang tersedia
William Outwaite (2008)	Kekuasaan adalah kemampuan untuk memproduksi atau member kontribusi pada hasil, menyumbangkan sesuatu kepada dunia
Maggie Human (2002)	Kekuasaan adalah bagian dari hakekat bahasa sebagai salah satu instrument dominasi
Haryatmoko (2003)	Kekuasaan adalah seluruh struktur tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, persuasi atau bisa juga melalui paksaan dan larangan
Thomas Santoso (2002)	Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi sebagian atau semua perlawanan, untuk mengadakan perubahan-perubahan pada pihak

Pemikir	Definisi
	yang memberikan oposisi
Straust-Hupe (1956)	Kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain
Wright Mills (1956)	Kekuasaan adalah dominasi yang artinya kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentanginya
Charles F. Andrian (1992)	Kekuasaan adalah penggunaan sejumlah sumber daya (asset dan kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain
JJA Van Doorn (1957)	Kekuasaan adalah kemungkinan membatasi alternative-alternatif tingkah laku orang-orang atau kelompok-kelompok lain sesuai dengan tujuan-tujuan seseorang atau suatu kelompok
P Valkenburgh (1968)	Kekuasaan adalah kemampuan membatasi alternative-alternatif tingkah laku dari orang atau kelompok yang lain
Anton M Mulyono (1995)	Kekuasaan adalah kemampuan atau kesanggupan orang lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, dan charisma atau kekuatan fisik
Rusiami (1998)	Kekuasaan adalah kemampuan atau kewenangan untuk menguasai orang lain, memaksa dan mengendalikan mereka sampai mereka patuh, mencampuri kebebasannya dan memaksakan tindakan-tindakannya dengan cara-cara tertentu
Hugh Miall, dkk (2002)	Kekuasaan adalah kemampuan untuk memerintah, melaksanakan dan memaksakan kepada pihak lain
James Lull (1998)	Kekuasaan adalah kemampuan seorang individu untuk menjalankan kehendaknya atas yang lain
James E Dougherty dan Robert L Pfalzgraff (1995)	Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggerakkan orang ke arah suatu kegiatan yang dikehendaki, melalui persuasive, kerjasama, dan paksaan
Stewart R Clegg	Kekuasaan adalah pemberlakuan control

Pemikir	Definisi
(1996)	terhadap berbagai sumber daya yang bernilai
Eko Prastyo (1996)	Kekuasaan adalah penggunaan daya paksa untuk membuat orang banyak mengikuti dan mematuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan seorang pemimpin

Sumber: Muhtar Haboddin, 2017:hlm 15

2. Kekuasaan sebagai pengaruh

Apabila pada konsep pertama, kekuasaan ditafsirkan sebagai pemaksaan, maka makna kekuasaan pada konsep yang kedua lebih santun dan lebih humanis. Kekuasaan dipahami sebagai pengaruh, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain. Dengan meletakkan kata “pengaruh”, maka persyaratan dari kekuasaan adalah adanya persetujuan dari pihak yang dikuasai. Persetujuan itu lahir dari proses saling mempengaruhi antara penguasa dan yang dikuasai. Haboddin mengutip pandangan beberapa ilmuwan untuk menjelaskan definisi kekuasaan sebagai pengaruh pada tabel 4.3

Tabel 4.3. Definisi Kekuasaan Sebagai Pengaruh

Pemikir	Definisi
Stephen P Robbins (1996)	Kekuasaan adalah suatu kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B, sehingga B melakukan sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan
Robert C.Plano dkk	Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengubah atau mempengaruhi tingkah laku

Pemikir	Definisi
(1985)	orang lain dalam cara yang diinginkan
Nelson Polsby (1963)	Kekuasaan adalah kapasitas seorang pelaku untuk melakukan sesuatu yang mempengaruhi pelaku lain, yang mengubah kemungkinan pola peristiwa-peristiwa tertentu di masa depan
Miriam Budiardjo (2008)	Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok sehingga tingkah orang lain tersebut sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu
Muhtar Mas`odd an Nasikun (1987)	Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pikiran dan tingkah laku orang atau sekelompok orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya
Keith Faulks (2010)	Kekuasaan adalah berupa pembentukan sikap dimana A secara langsung mengubah sikap B melalui koersi atau manipulasi dan pembentukan konteks
Alan C Isaak (1985)	Kekuasaan ditujukan untuk; (1) mempengaruhi tingkah laku orang lain; (2) mengontrol orang lain; (3) membuat orang lain bersedia melakukan sesuatu
Harold D Laswell dan Abraham Kaplan (1950)	Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan
Soerjono Soekanto (1990)	Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut
Ramlan Surbakti	Kekuasaan adalah kemampuan menggunakan

Pemikir	Definisi
(1992)	sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat
Robert Dahl (1980)	Kekuasaan adalah apabila A mempunyai kekuasaan atas B sejauh dia sedikit banyak mengubah
A Hoogerwerf (1985)	Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi tingkah laku orang lain sesuai dengan tujuan sang aktor sendiri
J.H.Rapar (1988)	Kekuasaan adalah kesanggupan untuk meyakinkan orang lain agar orang yang telah diyakinkan itu melakukan apa yang telah diyakininya sesuai dengan kehendak orang yang melakukan persuasi itu
Hans J Morgenthau (1990)	Kekuasaan sebagai suatu hubungan antar dua actor politik di mana aktor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan actor B
Miftah Thoha (1983)	Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah orang atau kelompok lain dengan caranya sendiri
Walter S.Jones (1993)	Kekuasaan adalah suatu sarana untuk menancapkan pengaruh atas aktor-aktor lainnya yang bersaing menggapai hasil yang paling sesuai dengan tujuan masing-masing
Yahya Muhaimin dkk (1985)	Kekuasaan adalah hubungan psikologi antara subjeek dan objek sedemikian rupa sehingga subjek bisa mempengaruhi pikiran dan tingkah laku objek tersebut.

Sumber : Muhtar Haboddin, 2017: hlm.9-10

Pertanyaan berikutnya adalah darimana sumber kekuasaan. Jawaban atas pertanyaan ini menjadi penting bagi politisi untuk membaca potensi kekuasaan sekaligus untuk merawat kekuasaan yang dimilikinya. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu perenungan terhadap pendapat Max Weber yang membagi sumber kekuasaan kedalam tiga tipologi, sebagai berikut.

Pertama, kekuasaan tradisional, yaitu kekuasaan yg didasarkan atas tradisi, kebiasaan dan kekuatan zaman dulu. Sebagai contoh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan langsung menjadi Gurebrnur tidak melalui pemilihan oleh rakyat. Masyarakat Yogyakarta meyakini, kesultanan sebagai simbol yang mempersatukan masyarakat dan menjaga nilai-nilai tradisi masyarakat Yogyakarta. Karena itu, agar tidak kehilangan keistimewaan di Yogyakarta, perundang-undangan tentang keistimewaan Yogyakarta mendaulat penguasa kesultanan (Raja Kraton Yogyakarta) otomatis menjadi Gubernur.

Max Weber masih membagi tipologi kekuasaan tradisional menjadi tiga, yakni; (1) otoritas *gerontokrasi*, yaitu masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang tua; (2) otoritas *patriarkalisme*, yaitu pengawasan dalam tangan satuan

kekerabatan yang dipegang oleh seorang individu tertentu dengan otoritas warisan, (3) otoritas *patrimonial*, yaitu otoritas yang memiliki administrasi dengan terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan pemimpinnya. Apabila melihat teori Weber ini untuk mempelajari kekuasaan birokrasi Indonesia di tingkat politik lokal, nampaknya otoritas *patrimonial* sedang menguat. Akibat pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, kepala daerah terpilih menempatkan orang-orang yang memiliki jasa dalam pemenangannya sebagai pejabat administrasi. Akibatnya jabatan birokrasi pemerintah daerah belum memperhatikan kompetensi atau keahlian, tetapi berdasarkan jasanya dalam pemilu.

Kedua, kekuasaan kharismatik, yaitu kekuasaan yang diperoleh seseorang karena dipandang memiliki kualitas kepribadian individu yang luar biasa dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi kekuatan-kekuatan dan kualitas supranatural (*adiduniawi*), suprahuman (*adiinsani*), dan *exceptional* (pengecualian). Sebagai contoh kekuasaan Tuan Guru di Lombok. Bagi masyarakat Lombok yang mayoritas muslim tradisional menempatkan posisi ulama (Tuan Guru) sebagai pameran sentral dalam kehidupan sosial keagamaan

mereka. Tuan Guru tidak hanya berperan sebagai transformasi nilai dan ajaran agama, lebih dari itu Tuan Guru juga memiliki peran-peran sosial. Tuan Guru sebagai tempat masyarakat menyampaikan segala permasalahan kehidupan mereka, sehingga sejak lahir sampai meninggal dunia, masyarakat Lombok “diurus” oleh Tuan Guru. Peranan sosial keagamaan yang begitu besar pada Tuan Guru memberi kontribusi terhadap kekuasaan kharismatik Tuan Guru. Kekuasaan kharismatik tersebut menjadi sumber daya kekuasaan yang penting dan arena itu di panggung politik Tuan Guru sangat diperhitungkan.

Ketiga, kekuasaan legal-yuridis, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas komitmen terhadap seperangkat aturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Sebagai contoh, Bupati dipatuhi perintahnya oleh PNS karena kewenangan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan. Demikian halnya dengan seluruh organisasi modern. Pengaturan kekuasaan dalam organisasi modern ditentukan berdasarkan peraturan-peraturan formal yang telah disepakati, dan seluruh anggota organisasi kemudian menaati peraturan organisasi tersebut. Maka orang akan mendapatkan kekuasaan hanya apabila ia memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan

yang telah disusun secara rinci dalam organisasi. Apabila ada beberapa orang yang memenuhi kriteria, biasanya anggota organisasi akan menentukan pilihannya atas pertimbangan-pertimbangan rasional, bukan karena faktor tradisi atau faktor karisma.

Di arena politik, ketiga tipologi kekuasaan di atas seringkali bukan bersifat dikotomis, melainkan saling fungsional satu dengan yang lain. Di panggung pemilu misalnya, politisi akan berusaha memiliki tiga sumber kekuasaan di atas sebagai sumber daya politik yang dikelola secara maksimal. Politisi membutuhkan kekuasaan tradisional ketika mereka menasar masyarakat pemilih yang masih memegang kuat tradisi dan budaya mereka. Politisi juga akan berusaha menunjukkan *performance* sebagai sosok yang kahrismatik ketika merekahadir di tengah-tengah pemilih kelas menengah dan pemilih-pemilih religius. Namun pada saat bersamaan, politisi juga akan berusaha mematuhi segala aturan permainan ketika sedang berkontestasi. Misalnya politisi akan berusaha mematuhi aturan-aturan pemilu yang telah disebutkan dalam undang-undang pemilu atau aturan-aturan teknis pemilu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Demikianlah pandangan beberapa ahli sosiologi tentang kekuasaan.

B. Kekuasaan Dalam Perspektif Sosiologi dan Ilmu Politik

Kekuasaan, merupakan konseptualisasi yang dapat ditelisik dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu. Psikologi, manajemen, sosiologi dan ilmu politik, merupakan disiplin ilmu yang paling banyak memperbincangkan kekuasaan. Sudah barang tentu masing-masing disiplin ilmu ini memiliki cara pandang masing-masing, bisa berbeda tetapi juga bisa memiliki beberapa kesamaan Sub judul ini bukan memperdebatkan cara pandang masing-masing ilmu ketika memperbincangkan tema tersebut, tetapi difokuskan pada bagaimana sosiologi dan ilmu politik sebagai dua disiplin ilmu yang paling dekat dalam membicarakan tema kekuasaan. Mengapa dua ilmu yang lainnya tidak digunakan ? Bagi penulis meskipun psikologi dan manajemen juga memperbincangkan kekuasaan, namun keduanya lebih dominan membahas bagaimana teknis pelaksanaan manajemen dibandingkan bagaimana perspektif dan tata kelola kekuasaan. Sosiologi dan ilmu politik di sisi lain dipandang mampu menyuguhkan beragam perspektif dan tata kelola sehingga dapat menjadi pisau analisis yang dibutuhkan dalam jangka panjang.

Sosiologi sebagai disiplin ilmu yang menyediakan perspektif, bukan menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu

yang baik atau buruk. Sosiologi tidak memiliki kapasitas untuk membuat penilaian baik atau buruk atas suatu objek kajiannya. Tugas utama sosiolog hanyalah melakukan sketsa tentang fenomena kekuasaan. Selanjutnya bagaimana teknis kekuasaan dilakukan agar kekuasaan itu memberi manfaat untuk rakyat, bukan kajian sosiologi. Argumentasi ini diperkuat oleh karya Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati. Kedua tokoh senior sosiologi Indonesia ini menjelaskan, “..sosiologi tidak melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Karena kekuasaan memiliki sifat netral, maka baik atau buruk tergantung penggunaannya dan keperluannya”.³⁰ Apabila kekuasaan digunakan untuk menindas rakyat, mempertajam ketimpangan sosial, menciptakan kemiskinan struktural, dan menimbulkan ketakutan rakyat, maka kekuasaan itu adalah keburukan. Demikian sebaliknya, apabila kekuasaan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial, maka kekuasaan sudah menghasilkan kebaikan.

Dari pandangan di atas, nampaknya tugas sosiolog berbeda dengan tugas hakim, pemuka agama atau tokoh budaya. Jika mereka memandang segala fenomena dari sisi baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, maka sosiolog melihat fenomena apa

³⁰ Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, *ibid*, hlm.227

adanya. Tugas sosiolog tidak lebih dari membuat deskripsi mendalam tentang fenomena yang teramati sebagai referensi bagi pengambil keputusan. Sosiolog tidak ingin terlalu jauh melihat kekuasaan kedalam nilai baik atau buruk. Meskipun demikian, bukan berarti sosiolog tidak mampu memberikan solusi dan nasehat para praktisi politik. Hasil kajian sosiologi bahkan kerap digunakan sebagai prespektif tata kelola kekuasaan. Dalam menunjang profesi ini, para sosiolog diuntut kemahirannya dalam menyuguhkan data dan informasi secara utuh sambil berusaha menjauhkan diri dari subjektivitas.

Pertanyaan terakhir kemudian bagaimana ilmu politik memandang kekuasaan?. Ilmu politik hingga saat ini diyakini publik sebagai disiplin ilmu tentang kekuasaan. Yang benar adalah, ilmu politik bukan ilmu kekuasaan melainkan disiplin ilmu yang mempelajari seputar bagaimana kekuasaan itu dikelola. Ilmu politik diidentikkan dengan ilmu tentang kekuasaan, seperti bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dipertahankan, dan diperluas. Yang senyatanya adalah kekuasaan bukan satu-satunya kajian ilmu politik, tetapi kekuasaan hanya salah satu saja dari sekian banyak kajian ilmu politik. Bahkan Elfirza dalam bukunya *Kekuasaan Politik*, menyebutkan fokus kajian ilmu politik adalah mengenai

pengaturan dari proses pembuatan kebijakan.³¹ Oleh karena dalam proses itu ada kontestasi kekuasaan diantara aktor politik, maka ilmu politik dipandang sebagai disiplin ilmu yang memiliki kajian terhadap kekuasaan.

Secara spesifik, ilmu politik mempelajari semua pengaturan dari proses pembuatan kebijakan, termasuk bagaimana pengaturan yang dibuat oleh penguasa kepada masyarakat. Akan tetapi secara makro, apa yang dikaji oleh ilmu politik pada dasarnya adalah segala fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Bagi ilmuwan politik, di dalam sebuah negara, ada pengaturan oleh penguasa terhadap masyarakat atau ada pengaturan yang dibuat untuk negara. Misalnya saja tentang pajak. Pengaturan pajak kepada masyarakat dimaksudkan untuk membangun ketertiban masyarakat dalam membayar pajak dan memperbesar alokasi pembangunan yang dibiayai dari pembayaran pajak oleh masyarakat. Pada sisi yang berbeda, pengaturan pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dari penjelasan ini, nampaknya bagi ilmuwan politik, kekuasaan itu bisaberupa pengaturan negara untuk masyarakat, atau pengaturan untuk

³¹ Efirza, *Kekuasaan Politik: Perkembangan Konsep, Analisis dan Kritik* (Malang, Intrans Publising, 2016), hlm.2

negara. Apabila politisi menggunakan cara berpikir yang pertama, maka orientasi perilaku politiknya adalah membuat kebijakan untuk membangun dan melindungi masyarakat. Akan tetapi apabila konseptualisasi yang kedua digunakan maka pengaturan pajak itu untuk meningkatkan pendapatan negara

Dari seluruh uraian di atas, nampaknya ilmu politik mengkaji kekuasaan hanya dalam kaitannya dengan negara. Kajian kekuasaan dalam ilmu politik dibatasi pada seputar pembagian kekuasaan antar negara beserta hubungannya, termasuk efek kekuasaan negara untuk masyarakat dan untuk negara itu sendiri. Dengan demikian, tidak semua fenomena kekuasaan menjadi garapan kajian ilmu politik. Sedangkan sosiologi lebih fokus pada kajian terhadap karakteristik kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. .

C. Pengelolaan Kekuasaan Elitis

Seperti halnya sumber daya ekonomi ataupun sumber daya sosial, sumber daya kekuasaan juga memerlukan tata kelola yang efektif agar tepat sasaran dan berhasil guna. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola kekuasaan?. Setiap bangsa memiliki cara yang berbeda mengelola kekuasaan, tentu

saja disesuaikan dengan perubahan sosial dan karakteristik sistem sosial yang terus mengalami dinamisasi. Bagian ini mengupas bekerjanya metode pengelolaan kekuasaan dengan model elit.

Di negara-negara yang baru lahir, masih tradisional dan kehidupan masyarakatnya primitive, boleh jadi kekuasaan dikelola dengan cara kekerasan. Di negara-negara miskin, pengelolaan kekuasaan acapkali dilakukan dengan mobilisasi, baik mobilisasi dengan kekerasan, mobilisasi dengan kekuatan ekonomi, atau mobilisasi dengan menggunakan ideologi. Namun seiring perkembangan industrialisasi dengan pertumbuhan kelas menengah yang begitu cepat, masyarakat semakin kritis, mereka semakin menyadari hak-hak politik dan hukum, maka pengelolaan kekuasaan pun mengalami pergeseran. Pengelolaan kekuasaan perlahan meninggalkan cara-cara kekerasan dan berganti menjadi cara-cara pluralis yang berpedoman pada prinsip dan prosedur demokrasi.

Pada negara-negara yang sedang mengalami proses perluasan industrialisasi dan pembangunan ekonomi, pengelolaan kekuasaan cenderung dilakukan dengan birokratik otoritarian. Pada model ini, kekuasaan ditangani oleh rezim dan tidak memberi peluang partisipasi. Negara tampil secara

mandiri dalam mengelola kekuasaan dan tidak memberi peluang partisipasi pada elemen-elemen luar negara. Negara mengatur secara ketat tata kehidupan politik warganya. Seluruh kegiatan berorganisasi warga dibatasi dengan berbagai instrument. Singkatnya, organisasi masyarakat tidak boleh berkontestasi dalam kekuasaan dengan negara.

Pada pengelolaan kekuasaan model elit birokrasi otoritarian muncul monopoli kekuasaan. Para elit akan terus terobsesi untuk memperkuat dominasi. Elit selalu berada pada situasi khawatir terhadap keaktifan politik massa. Maka elit akan berusaha memperlemah dan membungkam elemen-elemen masyarakat yang muncul dipermukaan. Pada tahapan ini, pengelolaan kekuasaan cenderung menggunakan apa yang disebut Althusser³² sebagai *Represif State Apparatus* (RSA) dan *Ideological State Apparatus* (ISA). Yang pertama menggunakan aktor-aktor formal negara, seperti militer dan birokrasi, hingga lembaga-lembaga pendidikan. Dan yang kedua, menggunakan aktor-aktor informal, seperti elit agama, elit budaya, atau tokoh-tokoh adat.

Dalam menjelaskan pengelolaan kekuasaan model elit sebagaimana penjelasan di atas, Gramsci mencoba menjelaskan

³² Zainuddin Maliki, *ibid*, hlm.29

konsep “*rule*” (*dominio*) dan *hegemony*.³³ *Rule*, adalah kekuasaan politik yang terekspresikan melalui cara-cara koersi. Penguasa memobilisasi alat-alat kekerasan untuk menundukkan massa. Berbeda dengan *rule*, *hegemony* merupakan kekuasaan yang diekspresikan melalui jalinan politik, sosial, dan budaya. Yang menarik adalah Gramsci menjelaskan tentang “wajah ganda negara”. Negara seringkali menampilkan diri dalam dua wajah sekaligus, yaitu *dominio*--- atau dominasi atas dasar kekerasan, dan *direzione*-----otoritas yang diperoleh atas dasar legitimasi.

Ketika membaca praktek kekuasaan Indonesia dalam tiga zaman (orde lama, orde baru, dan orde reformasi), maka disemua zaman ini polarisasi *dominio*, *hegemony*, dan *direzione* model Gramsci terlihat dengan terang benderang. Baik Soekarno, Soeharto, SBY, Gus Dur, Megawati dan Joko Widodo menggunakan *dominio*, *hegemony*, dan *direzione*. Soekarno misalnya menggunakan konstitusi untuk membangun hegemoni dimana ia ingin menjadi Presiden seumur hidup, Soeharto menggunakan A, B, G (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) untuk melakukan *dominio*, Gusdur menggunakan *hegemony* melalui jalinan sosial dan budaya, Megawati juga sama dengan

³³ *Ibid*, hlm.34

Gus Dur, SBY melakukan *direzione*, tampil dengan legitimasi langsung dari rakyat tetapi juga membiarkan pelaku-pelaku kekerasan masa lalu bebas. Joko Widodo yang akhir-akhir ini tampil dengan dua wajah yaitu *dominio* dan *direzione*. Beberapa ormas yang dipandangnya radikal dibekukan, dan saat yang bersamaan terus mencari legitimasi dengan menggunakan pancasila sebagai topeng memperkuat kekuasaan.

D. Model *Powercube* (Kubus Kekuasaan)

Di antara penulis yang cukup rapi membahas kekuasaan dengan menggunakan cara pandang teori kontemporer adalah Abd.Halim, seorang pengajar di FDIK UIN Sunan Ampel Surabaya. Halim, dalam bukunya *Politik Lokal*, mencoba membuat potret kekuasaan dengan menggunakan tiga teori, yaitu teori *powercube*, modal, dan panggung. Tulisan ini meminjam konsepsi yang terbangun dalam teori *powercube* untuk menjelaskan fenomena kekuasaan.

Teori *powercube*, dicetuskan oleh John Gaventa, tetapi akar teori ini sesungguhnya berasal dari Lukes dalam bukunya

Power: A Radical View.³⁴ Disini Lukes menawarkan teori tiga dimensi dalam memandang kekuasaan. Teori ini merupakan sintesis atas teori kekuasaan satu dimensi dan teori kekuasaan dua dimensi. Teori satu dimensi, melihat kekuasaan hanya fokus pada satu hal; tindakan para aktor dalam mengambil keputusan (*decision making*). Maka aspek pengambil keputusan merupakan satu-satunya yang dilihat oleh teori satu dimensi ketika membaca kekuasaan.

Teori dua dimensi dalam pandangan Lukes juga mengandung beberapa kelemahan. Teori ini memang melihat aspek yang lebih luas dalam memandang dimensi kekuasaan, yaitu *decision making* maupun *non- decision making*. Yang dimaksud oleh Lukes adalah bahwa kekuasaan berjalan bukan hanya di level pengambilan keputusan, tetapi juga di luar pengambilan keputusan. Teori ini mendasarkan dirinya pada paham tindakan (*behaviorisme*) dalam memandang kekuasaan.

Menurut catatan yang diberikan oleh Halim, ide teori *powercube* muncul dari kegiatan workshop yang diselenggarakan *Institute of Development Studies* (IDS) pada

³⁴ Dr.H.Abd.Halim, M.A., Politik Lokal Pola Aktor Dan Alur Dramatikalnya, (Yogyakarta, Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa/LP2B, 2014), hlm. 49

Juni 2009. Hasil workshop ini menggagas penjelasan kekuasaan dengan teori *powercube*. Pertanyaannya, apa sesungguhnya pandangan teori *powercube* tentang kekuasaan?. Meskipun pertanyaan ini sangat mendasar, tetapi jawaban atas pertanyaan ini justru menjadi rujukan atas analisis teori *powercube* dalam seluruh kajiannya. Teori *powercube* sendiri didefinisikan sebagai suatu kerangka pemikiran untuk membuat analisis tiga dimensi kekuasaan, yaitu; level, ruang, dan bentuk, serta hubungan di antara tiga dimensi tersebut.³⁵ Secara umum kata Gaventa, kekuasaan tiga dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Dimensi *level* (dimensi tingkatan), menjelaskan kekuasaan terdiri atas tiga level, yaitu global, nasional, dan lokal.
2. Dimensi *space* (dimensi ruang), yang menjelaskan kekuasaan terdiri atas ruang tertutup (*closed*), ruang yang diperkenankan (*invited*), dan ruang yang diciptakan atau diklaim (*claimeted/created*)
3. Dimensi *form* (dimensi bentuk), yaitu kekuasaan dilihat dari tiga bentuk; bentuk yang terlihat (*visible*), bentuk

³⁵ Ibid, hlm.51

tersembunyi (*hidden*), dan bentuk tidak terlihat (*invisible*).

Ketika, Halim mencoba menterjemahkan teori *powercube* dalam menjelaskan fenomena kekuasaan politik lokal, maka ada tiga dimensi kekuasaan di tingkat politik lokal Indonesia, yaitu kekuasaan yang terlihat, tidak terlihat, dan tersembunyi. Yang dimaksud dengan kekuasaan yang terlihat adalah kontestasi kepentingan yang terlihat di ruang-ruang publik atau lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Beberapa contoh bentuk kekuasaan yang terlihat, seperti; eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, termasuk organisasi masyarakat. Lembaga-lembaga ini merupakan tempat diproduksi kebijakan publik, yang tentu saja disana ada aktor-aktor pembuat kebijakan beserta beragam kepentingannya. Kontestasi aktor, kebijakan, dan kepentingannya merupakan fenomena kekuasaan yang terlihat.

Menurut catatan Halim, ada tiga asumsi yang melandasi kekuasaan terlihat. *Pertama*, dalam pendekatan *visible power* berlaku sebuah asumsi bahwa akses terhadap arena pembuatan kebijakan relative terbuka bagi kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan. *Kedua*, dengan melihat siapa yang berpartisipasi dalam kontestasi dan pergulatan kepentingan,

hasil akhirnya adalah ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Pihak yang menang adalah pihak yang aspirasi dan kepentingannya diakomodir untuk diterapkan sebagai kebijakan publik. Dan yang kalah adalah pihak yang aspirasi dan kepentingannya tersingkir sehingga tidak bisa masuk dalam kebijakan publik. Pertarungan untuk memenangkan kepentingan dalam kebijakan publik ini menandakan adanya kekuasaan di lembaga produksi kebijakan publik.

Selain sebagai cermin kekuasaan yang terlihat, panggung politik lokal juga menjadi cermin kekuasaan yang tersembunyi. Bagi Gaventa, kekuasaan tersembunyi merupakan kekuatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan ini muncul dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan dan *privilege* dari kepentingan-kepentingan. Untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan, maka diciptakanlah halangan-halangan dan gangguan-gangguan yang bisa membendung partisipasi kritis rakyat.

Ada banyak contoh kekuasaan tersembunyi di tingkat politik lokal. Salah satunya adalah proses pembahasan APBD baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. APBD merupakan dokumen yang mendeskripsikan rencana sekaligus anggaran semua produk kebijakan untuk satu tahun anggaran. APBD tidak

hanya menggambarkan program pemerintah, tetapi APBD juga menggambarkan besaran peruntukan bagi elit birokrasi dan elit politik di DPRD. Dalam penyusunan APBD aktor yang bertarung bukan hanya eksekutif dan legislatif, tetapi di muncul juga pertarungan di internal eksekutif dan internal legislative. Di internal eksekutif adalah pertarungan antara SKPD, sedangkan di internal DPRD yang terjadi adalah pertarungan antar partai politik. Agar pertarungan kekuasaan tersebut tidak mengemuka di publik, maka seluruh aktor-aktor yang bertarung dijaga privasinya dan pertanyaan-pertanyaan rakyat di batasi untuk dikatakan tidak boleh muncul. Fenomena ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun di daerah. Bahkan semenjak undang-undang memberikan otonomi kepada daerah pertarungan kekuasaan di arena politik anggaran APBD semakin menguat. Adapun kekuasaan tidak terlihat, pada prinsipnya adalah kelanjutan dari kekuasaan tersembunyi.

E. Ringkasan

Kekuasaan merupakan fenomena lama, artinya ada pada setiap orang dan pada setiap zaman. Kata Thomas Hobbes, kekuasaan merupakan instrument yang dapat menjadikan kehidupan seseorang yang memilikinya menjadi lebih bagus.

Daya guna kekuasaan itu menyebabkannya selalu diperbutkan banyak orang. Dalam perebutan kekuasaan itu, Hobbes menyatakan, manusia merupakan srigala bagi manusia yang lain. Muhtar Haboddin mencoba membagi makna kekuasaan menjadi dua, yaitu kekuasaan sebagai paksaan dan kekuasaan sebagai pengaruh.

Ahli lainnya seperti Montesquieu membagi kekuasaan menjadi empat tipologi, yaitu demokrasi, aristokrasi, monarki, dan despotis. Masing-masing bentuk kekuasaan memiliki karakter pemerintahan, ukuran pemerintahan, semangat kebangsaan, dan tingkat stabilitas yang berbeda, meskipun beberapa memiliki kesamaan. Penjelasan Nampak pada tabel 4.1.

Dalam pandangan para sosiolog, sosiologi tidak melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau buruk, lasannya karena kekuasaan itu bersifat netral. Maka wajah kekuasaan ditentukan oleh bagaimana penggunaannya. Jika kekuasaan digunakan untuk menindas, mempertajam ketimpangan sosial, menciptakan kemiskinan, dan menciptakan ketakutan rakyat, maka kekuasaan itu berwajah buruk. Sebaliknya, apabila kekuasaan dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, maka kekuasaan berwajah baik.

Sedangkan ilmu politik melihat kekuasaan pada dua cakupan, yakni kekuasaan untuk memperkuat masyarakat atau kekuasaan untuk memperkuat negara. Maka dalam pandangan ilmu politik, segala peraturan yang di buat negara (sebagai bentuk kekuasaan) dapat memperkuat atau memperlemah salah satu objek kekuasaan (negara atau masyarakat) di atas.

Ada banyak model kekuasaan negara, dan pada negara-negara yang sedang berkembang, model pengelolaan kekuasaan cenderung dilakukan oleh elit. Pengelolaan kekuasaan oleh elit dapat dilakukan dengan domonio, hegemoni, dan direzione. Dalam sejarah kepemimpinan politik Indonesia, semua cara tersebut pernah diterapkan. Teori lain yang relevan untuk memotret kekuasaan adalah teori powercube (kubus kekuasaan). Teori ini menawarkan cara memandang kekuasaan melalui tiga dimensi, yaitu level (tingkatan), space (ruang), dan form (bentuk).

Bab 5

SOSIALISASI POLITIK

Setiap diri dan kedirian yang muncul dari manusia merupakan representasi sekaligus manifestasi dari lingkungan sosialnya. Melalui lingkungan sosial, yaitu keluarga, kelompok bermain, rekan kerja, lembaga pendidikan, organisasi, bahkan negara. Manusia mendapatkan referensi yang diaktualisasikan dalam persepsi, sikap dan tindakan. Karena itu, penulis hingga saat ini meyakini bahwa kedirian manusia adalah produk lingkungan sosial, hasil asuhan dari lingkungan, atau hasil rekayasa dari lingkungan sosial.

Meskipun penulis belum memiliki data statistik yang lengkap, namun dari fenomena yang teramati secara sederhana, kuat dugaan penulis bahwa sebagian besar orang memeluk agama tertentu karena lingkungannya dan hanya sedikit karena bekerjanya faktor diri. Ketika seorang muslim yang taat beragama, kesehariannya dalam rumah tangga mensosialisasikan nilai-nilai dan praktek ajaran Islam pada istri

dan anak-anak mereka, maka anak mereka akan terus meniru perilaku dan cara berpikir orang tuanya. Sampai akhirnya si anak juga akan menjadi seorang muslim yang taat. Demikian sebaliknya, ketika orang tua melakukan praktek kekerasan terhadap anaknya, potensi anak untuk melakukan kekerasan setelah dewasa sangat besar. Dalam konteks ini, manusia sering di sebut sebagai penerima warisan yang taat. Manusia adalah penerima sekaligus pemelihara warisan. Apapun yang disosialisasikan oleh lingkungan akan membentuk kedirian manusia itu sendiri.

Demikianlah, sosialisasi memainkan peran penting dalam membentuk kedirian manusia. Sosialisasi, mentransformasi semua nilai, norma, dan kebiasaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sehubungan dengan begitu besarnya peran sosialisasi dalam kedirian manusia, maka tulisan ini ingin membahas pengertian sosialisasi, pengertian sosialisasi politik, agen sosialisasi politik, media sosialisasi politik, dan perkembangan sosialisasi politik. Sebagai referensi akademis, penulis menyarankan pembaca mendalami konsep terkait tema ini dengan membaca bukunya Damsar yang berjudul Pengantar Sosiologi Politik tahun 2013. Damsar merupakan Guru Besar yang member focus kajiannya pada Sosiologi Ekonomi dan

Sosiologi Politik. Karena itu penulis berpendapat karya-karyanya layak untuk menjadi referensi mahasiswa dan dosen yang mempelajari perihal Sosiologi Politik.

A. Definisi Sosialisasi

Pada dasarnya manusia lahir dalam keadaan kosong informasi dan pengetahuan. Manusia yang baru lahir hanyalah memiliki naluri. Karena itu sesungguhnya begitu lahir manusia merupakan makhluk tak berdaya. Mulailah manusia diperkenalkan cara minum air susu ibu (ASI) oleh ibunya, setelah itu manusia diperkenalkan dengan mandi, berpakaian, makan, berbicara, merangkak, berdiri, jalan, dan akhirnya berlari. Proses hidup dengan berbagai pengalaman yang diajarkan ataupun diperoleh sendiri secara alami, menyebabkan manusia mulai membuat pertimbangan atau membuat pilihan ketika berperilaku. Manusia mulai mempertimbangkan makanan yang dapat dimakannya dengan aman, pakaian yang layak untuknya, dan seterusnya. Melalui proses kehidupan yang dilaluinya manusia juga mengenal etika, estetika, dan ilmu pengetahuan. Dalam perilakunya, manusia tidak lagi diuntut hanya oleh naluri melainkan oleh etika, estetika, dan ilmu pengetahuanyang dimiliki.

Apabila hewan hanya di tuntut oleh naluri, sehingga ketika hewan melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja ia mau sesuai nalurinya. Maka manusia mengenal beberapa sistem pernikahan, baik yang diperolehnya melalui norma agama, budaya, atau regulasi negara tempat ia tinggal. Ketika manusia telah berperilaku berulang-ulang sesuai etika atau norma pada akhirnya perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat menjadi nilai. Dan lahirlah kebiasaan-kebiasaan dalam berbagai kehidupan manusia, semisal kebiasaan dalam ekonomi, kebiasaan dalam agama, kebiasaan dalam keluarga, kebiasaan dalam politik. Kamanto Sunarto menyebut proses pembiasaan manusia itu sebagai sosialisasi.³⁶

Pertanyannya kemudian apa definisi sosialisasi ?. Ada banyak ahli sosiologi, komunikasi, maupun psikologi yang telah mendefinisikan konsep ini. Pada tahun 1978, Peter Berger (dalam Kamanto Sunarto) mendefinisikan sosialisasi sebagai *“a process by which a child learns to be a participant member of society”*. Oleh Kamanto Sunarto diterjemahkan sebagai “proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang

³⁶ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*, (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004) hlm23.

anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat”. Definisi di atas nampaknya memberikan fokus konseptual tentang sosialisasi pada dua ranah, yakni proses dan tujuan. Sebagai proses, sosialisasi mentransformasi nilai-nilai dan peran-peran dalam suatu masyarakat. dan sebagai tujuan, sosialisasi mengharapkan adanya partisipasi anggota masyarakat yang disosialisasikan.

Nilai politik dapat dipahami sebagai perilaku politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum etika, norma, dan pandangan negara yang tertulis dalam perundang-undangan. Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disingkat LUBER dan JURDIL, merupakan nilai politik dalam pemilu demokratis di Indonesia. Maka ketika ada orang yang terlibat dalam politik uang, baik peserta pemilu ataupun pemilih, tentu dapat dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai politik. Tugas utama agen sosialisasi pemilu kemudian adalah melakukan transformasi tentang pemilu bersih dan berintegritas kepada peserta pemilu maupun pemilih. Tujuannya adalah agar peserta pemilu dan pemilih tidak melakukan praktek politik uang.

Politik uang dalam pemilu di Indonesia telah menjadi gejala yang memprihatinkan. Hampir semua jenis pemilu (pemilu presiden, pemilu DPR/D, pemilu gubernur, bupati/wali

kota, hingga pemilihan kepala desa, bahkan pemilihan kepala dusun) tidak luput dari gurita politik uang. Politik uang seolah telah menjadi budaya pemilu di tanah air ini. Di beberapa kasus pemilu kerap ditemukan pemilih tidak bersedia menggunakan hak pilihnya hanya karena belum mendapatkan uang atau barang dari peserta pemilu. dan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) partisipasi memilih sangat tinggi karena motivasi memilih mereka adalah bentuk kompensasi atas sejumlah uang atau barang yang mereka terima dari peserta pemilu.

Jika ditelisik lebih lanjut, praktek politik uang memberi beragam dampak. Dua diantara dampak politik uang adalah merusak mentalitas pemilih menjadi pemilih pragmatis, dan melahirkan motivasi korupsi pemimpin politik terpilih. Politik uang menyebabkan biaya politik yang harus dikeluarkan peserta pemilu menjadi tinggi. Pada akhirnya biaya politik tinggi itu dikembalikan oleh pemimpin politik terpilih dengan cara penyalahgunaan kekuasaan. Dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan tersebut adalah korupsi.

B. Definisi Sosialisasi Politik

Dalam kerja paling sederhana cara mendefinisikan sosialisasi politik adalah dengan menggabungkan makna sosialisasi dan makna politik. Meskipun demikian, penggabungan ini tidak sederhana karena definisi politik yang dikemukakan para ahli masih beragam. Damsar sendiri mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses trenaformasi pengetahuan, sikap, dan nilai politik kepada masyarakat agar masyarakat mampu berpartisipasi politik secara efektif. Sebagai misal, selama beberapa kali penyelenggaraan pemilu masyarakat yang tidak memilih bersalan mereka tidak mendapatkan undangan memilih dari penyelenggara pemilu.

Persoalannya adalah tidak semua masyarakat mengetahui solusi yang ditawarkan oleh undang-undang pemilu. Masyarakat yang tidak mendapatkan undangan memilih dari petugas penyelenggara pemilu berpikir jika mereka tidak terdaftar dalam DPT maka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Rupanya aturan itu sudah tidak berlaku atau sudah diganti oleh undang-undang yang lain. Dalam perundang-undangan pemilu yang baru, ada semangat untuk menyelamatkan hak pilih setiap warga negara. Manifestasi dari semangat itu adalah perundang-undangan pemilu

memperbolehkan warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan hak pilihnya, namun dengan beberapa ketentuan. Misalnya, orang yang bersangkutan harus menunjukkan KTP atau identitas kependudukannya, dan mereka harus memilih setelah seluruh pemilih dalam DPT menggunakan hak pilihnya.

Agar masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan normatif yang diatur undang-undang pemilu dan akhirnya mereka berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, maka diperlukan sosialisasi politik oleh aparatur penyelenggara pemilu. Dengan demikian, sosialisasi politik dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan membangun partisipasi anggota masyarakat dalam kehidupan politik. Tugas utama dari aktor sosialisasi politik adalah menggalang proses pembelajaran peran.

Pertanyaan yang muncul kemudian, secara tekstual apa yang dimaksud dengan sosialisasi politik ?. Ada banyak ahli yang memberikan kontribusi terhadap pendefinisian sosialisasi politik. Damsar sendiri mengutip tiga pandangan ahli dalam mendefinisikan sosialisasi politik, sebagai berikut:

1. M.Rush dan P.Althoff. dalam bukunya yang diberi judul Sosiologi Politik, tahun 2005, mereka mengatakan sosiologi politik adalah suatu proses kerja terhadap dua

hal; *pertama*, memperkenalkan sistem politik kepada peserta sosialisasi politik; *kedua*, meminta respon atau tanggapan mereka tentang gejala-gejala politik.

2. A.Thio. Dalam bukunya *Sociology: An Introduction*, tahun 1989, Thio mengatakan sosiologi politik sebagai proses melalui mana individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan, dan sikap politik.
3. Gabriel A.Almond. sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang secara khusus membentuk nilai-nilai politik,yang menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik.³⁷

Paparan definisi sosialisasi politik di atas mempertegas, kerja sosialisasi politik pada dua aspek, yaitu ; aspek yang berhubungan dengan proses dan aspek yang berhubungan dengan tujuan. Pada aspek pertama, kerja sosialisasi politik merupakan transformasi nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap politik, serta harapan politik. Adapun aspek kedua, merujuk pada sesuatu yang diperlukan oleh individu agar mampu berpartisipasi efektif dalam aspek politik dan kehidupan masyarakat.

³⁷ Prof.Dr.Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), ibud, hlm.153

Untuk memudahkan pemahaman makna sosialisasi politik di atas, mari kita melihat studi kasus sosialisasi pemilu oleh suatu badan penyelenggara pemilu, misalnya oleh KPU. Bayangkan saja KPU akan menyelenggarakan sosialisasi pemilukada. Pada aspek pertama, KPU harus mentransformasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilu, seperti kesetaraan, kebebasan, keadilan, pemilu yang LUBER dan JURDIL. Di samping itu KPU juga harus mentransformasi fungsi pemilu, pentingnya ikut memilih pemimpin politik, alasan pemilu harus diselenggarakan secara langsung oleh rakyat, dan lain-lain. Pada aspek kedua, KPU bisa memperlihatkan masyarakat cara mengetahui apakah namanya sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau belum, apabila belum juga harus bagaimana caranya agar bisa terdaftar. Dan agar masyarakat mampu berpartisipasi secara baik, barangkali KPU menyelenggarakan simulasi pemungutan suara bersama warga. Dengan demikian, disamping masyarakat mengetahui pentingnya ikut serta dalam pemilu, masyarakat juga mengetahui cara menggunakan hak pilih dengan benar.

C. Agen Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik dapat dilakukan oleh berbagai aktor, baik individu, kelompok atau organisasi. Damsar sendiri membuat identifikasi terhadap empat agen strategis, yakni; keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, dan media massa. Menurut Damsar, agen-agen ini paling penting perannya dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensi manusia.³⁸ Apa yang dirumuskan oleh Damsar tidak lebih sebagai salah satu penaduan bagi setiap ahli untuk merumuskan identifikasi agen-agen lainnya. Penulis berpandangan ada banyak agen lain yang dapat mengambil peran dalam sosialisasi politik, seperti elit informal (kyai, buya, atau tuan guru, termasuk tokoh-tokoh budaya), organisasi-organisasi masyarakat (ormas), dan lembaga swadaya masyarakat.

1. Keluarga

Di dalam keluarga, sosialisasi politik dapat berjalan melalui dua bentuk, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatif. Bentuk sosialisasi politik ini sangat ditentukan oleh karakteristik orang tua, karena orang tua merupakan aktor

³⁸ Ibid, hlm.154

paling dominan dalam pembentukan peran anggota keluarga. Pada tahapan yang ekstrim bahkan muncul asumsi bahwa watak dan perilaku anak merupakan potret dari watak dan perilaku orang tua. Damsar mendefinisikan sosialisasi represif sebagai sosialisasi yang lebih menekankan pada kepatuhan anak dan pemberian hukuman terhadap perilaku yang keliru. Misalnya, orang tua yang mengharuskan anak untuk taat terhadap apapun yang diperintahkan orang tua, atau anak dilarang makan sebelum orang tua makan, melarang anak ikut berdiskusi ketika orang tua sedang mendiskusikan suatu hal, dan memberikan hukuman bagi anak yang melanggar. Sedangkan sosialisasi partisipatif, menunjuk pada sosialisasi yang menekankan pada otonomi anak, dan biasanya memberikan imbalan pada anak yang baik. Apabila pada pola sosialisasi represif, anak mendapatkan tekanan yang begitu hebat hingga tidak diperbolehkan nimbrung dalam diskusi orang tua, maka pada pola sosialisasi partisipatif, berlaku pakem yang sebaliknya, orang tua cenderung melibatkan anaknya dalam mendiskusikan hampir semua rencana-rencana yang akan dilakukan.

Pola sosialisasi anak yang diperoleh melalui keluarga diyakni para ilmuwan sosial akan memberi *impack* pada sikap

dan perilaku politik anak ketika menjadi dewasa. Ketika politisi yang waktu anak-anak mendapatkan sosialisasi politik represif besar kemungkinan ia akan tumbuh menjadi politisi yang diktator. Sebaliknya, karekter politik demokratis seorang politisi, biasanya muncul karena pola sosialisasi politik di kuarga yang partisipatif. Damsar mencoba membuat rumusan bentuk sosialisasi politik yang berbeda ini, sebagaimana tabel 5.1.

Tabel 5.1. Bentuk Sosialisasi Politik

Sosialisasi Represif	Sosialisasi Partisipatif
<ul style="list-style-type: none"> • Menghukum perilaku yang keliru • Hukuman dan imbalan material • Kepatuhan anak • Komunikasi sebagai perintah • Komunikasi nonverbal • Sosialisasi yang berpusat pada orang tua • Anak memperhatikan keinginan orang tua • Keluarga merupakan <i>significant other</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi imbalan bagi perilaku yang baik • Hukuman dan imbalan simbolis • Otonomi anak • Komunikasi sebagai interaksi • Komunikasi verbal • Sosialisasi yang berpusat pada anak • Orang tua memperhatikan keperluan anak • Keluarga merupakan <i>generalized other</i>

Sumber : Damsar, hlm.155

Pada masyarakat pedesaan sekitar tahun 1990 ke belakang, hampir semua orang tua menerapkan pola sosialisasi represif pada anak. Kebetulan penulis tinggal dan besar dilingkungan

pedesaan dan masa kecil penulis dalam keluarga banyak kekurangan secara ekonomi, sebagaimana juga jamak terjadi pada masyarakat pedesaan saat itu. Ikan tongkol (sejenis ikan laut) waktu itu merupakan makanan yang mewah, dan setiap makanan mewah, maka yang didahulukan adalah orang tua. Jadi ada tuntutan bagi setiap anak dipeesaan untuk memperhatikan keinginan orang tua sebagai bentuk kepatuhan anak terhadap orang tua.

Penulis berpandangan, fenomena pola sosialisasi represif dalam keluarga menyebabkan hampir semua pemimpin politik di pada saat itu tampil dengan pola-pola diktator, mulai dari kepala desa hingga presiden. Maka perilaku politik masyarakat juga cenderung mengamini pemimpin-pemimpin yang dipandang kuat secara fisik. Disitulah area subur bagi legitimasi politik militer dan birokrasi, sehingga karekteristik politik di sekitar tahun 1990 ke belakang, menurut penulis adalah politik teknokratik, yaitu sistem politik yang dikuasi militeri dan birokrasi. Kekuasaan presiden Soeharto, misalnya ketika itu di topang oleh mesin politik A, B, G (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Mesin politik ini bekerja dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Warga masyarakat kemudian di tutntut kepatuhannya terhadap penguasa, dan

menyebabkan Soeharto mampu berkuasa 32 tahun, sebagai presiden paling lama dalam sejarah politik Indonesia.

2. Sekolah

Pertanyaannya, mengapa sekolah menjadi agen penting sosialisasi politik ?. Sedikitnya ada dua faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebabnya, yaitu karena sekolah sebagai sistem sosial dan karena di sekolah, guru merupakan figur sentral bagi siswa. Yang dimaksud dengan sekolah sebagai sistem sosial adalah, sekolah merupakan wadah di mana didalamnya ada sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang hubungan timbale baliknya kurang lebih bersifat konstan. Di sekolah hubungan social antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru, dan guru dengan Kepala Sekolah, semuanya bersifat konstan atau relatif permanen. Sifat konstanitas hubungan sosial di sekolah memberi ruang yang efektif untuk proses sosialisasi politik.

Guru, merupakan agen sosialisasi yang penting untuk proses sosialisasi politik. sudah barang tentu karena guru merupakan figur yang tidak hanya berfungsi sebagai transformasi nilai-nilai dan transformasi ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, guru menjadi model bagi tindak-tanduk, cara

berpikir, dan sikap siswa. Penampilan (*performance*) guru, menjadi rujukan utama siswa. Oleh karena itu, ucapan, nasehat dan perintah guru menjadi “fatwa” yang wajib ditaati oleh siswa. Dalam posisi social yang demikian, guru menjadi penyampai pesan sosialisasi yang paling strategis di sekolah.

Gaya kepemimpinan guru, merupakan faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas siswa di ruang kelas. Damsar membagi tiga jenis gaya kepemimpinan guru yang kemudian dapat mempengaruhi proses sosialisasi politik melalui agen sekolah, yaitu; otokratik, demokratik, dan *laisser-fair*.³⁹ Yang pertama merujuk pada. Gaya kepemimpinan guru yang relevan dengan sosialisasi politik adalah gaya kepemimpinan demokratik. Gaya kepemimpinan demokratis akan membangun sikap kritis sekaligus konstruktif bagi siswa. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan demokratik merupakan solusi pendidikan sepanjang zman. Dengan demikian, apabila sekolah masih dipandang efektif sebagai agen sosialisasi politik, maka kompetensi guru tentang kepolitikan menjadi kebutuhan untuk dihadirkan.

³⁹ Ibid, hlm.162

3. Kelompok teman sebaya

Dalam tradisi sosiologi, kelompok teman sebaya (*peer group*), didefinisikan sebagai suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama, dengan siapa seseorang itu bergaul atau berhubungan. Biasanya kelompok teman sebaya merupakan kelompok rujukan (*reference group*) dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang berhubungan dengan politik.

Sosialisasi politik melalui kelompok teman sebaya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi cara yang paling efektif melaksanakan sosialisasi di kelompok teman sebaya adalah dengan sosialisasi informal dan tatap muka langsung. Sosialisasi politik melalui teman sebaya banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga public. Salah satu lembaga public yang memiliki program sosialisasi politik melalui teman sebaya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah pemilih yang tinggi dibandingkan jumlah pegawai KPU yang terbatas, menjadi salah satu motivasi KPU membentuk komunitas pemilu dan demokrasi. KPU membuat pengelompokan segmentasi pemilih, salah satu segmen yang paling cepat pertumbuhannya adalah pemilih pemula. Untuk menjangkau pemilih pemula dalam sosialisasi pemilu, KPU melakukan

rekrutmen terhadap pelajar dan mahasiswa. Kedua kelompok pemilih ini diberikan kurusus pemilu dan selanjutnya mereka diberi tugas untuk melaksanakan sosialisasi pemilu pada kelompok teman sebaya mereka, misalnya teman-teman mereka yang ada di dalam sekolah atau kampus. Fenomena ini menunjukkan peran penting dari kelompok teman sebaya sebagai agen sosialisasi politik.

4. Media massa

Pada masyarakat komunikasi seperti era ini, media massa memiliki peran paling strategis sebagai agen sosialisasi politik. Media di era ini telah berfungsi mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, cara bertindak, dan sikap politik seseorang. Pengaruh media massa saat ini bersifat massif, berskala besar, bahkan segera. Apa yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dalam hitungan menit melalui media. Oleh karena peran media yang begitu penting, semua partai politik mendekati media sebagai agen sosialisasi poltiik yang mereka lakukan. Media di zaman ini telah menjadi satu-satunya agen yang dapat mempengaruhi masyarakat, misalnya terhadap kandidat tertentu. Tengoklah misalnya pemilukada DKI yang baru lalu. Pada pemilukada DKI 2017 yang berkontestasi

ketika itu, bukan hanya para kandidat, bahkan juga ada pertarungan media. ,Media dapat menyediakan citra baik sekaligus citra buruk bagi politisi. Oleh karena itu, setiap momentum pemilu di Indonesia, media harus digandeng agar menulis tema-tema tentang kepemiluan

Pemilahan agen-agen sosialisasi politik yang dibuat oleh Damsar memiliki kemiripan dengan pemilahan yang dilakukan oleh Elly M.Setiadi dan Usman Kolip. Mereka membagi dua kelompok agen sosialisasi, yaitu *secondary group* dan *primary group*. Kelompok pertama terdiri dari pemerintah, sekolah, media massa, dan partai politik. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari teman sebaya (*peer groups*) dan keluarga.⁴⁰

Agen yang baru baru dari Setiadi dan Kollip adalah peran partai poltiik sebagai agen sosialisasi politik. Peran partai politik sebagai agen sosialisasi politik memang kerap dibahas dalam literatur-literatur yang menulis tentang partai politik. diantaranya buku yang di tulis Koirudin tahun 2004 dengan judul Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi. Dalam bab 3 buku ini penulis memaparkan lima fungsi partai politik, yakni fungsi artikulasi kepentingan, fungsi agregasi

⁴⁰ Elly M.Setiadi & Usman Kollip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta, Kencana Prenadammedia Group, 2013), hlm.171

kepentingan, fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik, dan fungsi komunikasi politik.⁴¹

Sosialisasi politik sebagai suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap politik, dan etika politik memerlukan intervensi partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Setiap partai politik memiliki target terhadap sosialisasi politik. Memang ada banyak target partai politik melakukan sosialisasi politik, namun yang paling riil dari target partai politik adalah mengkonstruksi kembali perilaku politik masyarakat dalam memilih. Untuk konteks Indonesia saat ini, perilaku sebagian besar pemilih masih emosional dan tradisional. Kondisi pemilih yang demikian dapat berdampak pada lahirnya lembaga-lembaga dan suprastruktur politik yang juga tradisional. Maka tugas utama partai politik dalam melaksanakan sosialisasi politik adalah memperbaharui konstruksi perilaku memilih dari emosional menjadi rasional. Oleh karena itu, partai politik kemudian tidak boleh menjadi agen yang justru memelihara perilaku pemilih emosional atau tradisional.

⁴¹ Koirudin, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 86.

D. Ringkasan

Pada awalnya manusia lahir dalam kondisi kurang informasi dan pengetahuan. Seiring usia dan hubungan-hubungan sosial, manusia informasi maupun pengetahuan manusia terus bertambah. Dalam hubungan-hubungan social, manusia mendapatkan proses pembaharuan. Dalam hubungan sosial itu, manusia mendapatkan proses pembiasaan. Seorang ahli sosiologi bernama Peter L. Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai proses melalui mana seseorang belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.

Definisi di atas menggambarkan pembahasan tentang sosialisasi mencakup dua posisi, yakni sosialisasi sebagai proses dan sosialisasi sebagai tujuan. Sebagai proses, sosialisasi mentransformasikan nilai-nilai dan peran-peran dalam masyarakat. Sedangkan sebagai tujuan, sosialisasi mengharapkan adanya partisipasi anggota masyarakat yang disosialisasikan.

Dari definisi sosialisasi di atas, dapat dirumuskan definisi sosialisasi politik sebagai proses transformasi pengetahuan, sikap, dan nilai politik kepada masyarakat agar mampu berpartisipasi politik secara efektif. Sama halnya dengan kerja

sosialisasi yang lain, kerja sosialisasi politik juga mengandung dua aspek, yakni sosialisasi politik sebagai nilai dan sosialisasi politik sebagai tujuan. Pada aspek pertama, dapat disuguhkan contoh, sosialisasi pemilu dimaksudkan untuk melakukan transformasi nilai-nilai politik tentang kesetaraan, kebebasan, dan keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilu demokratis. Sebagai tujuan, sosialisasi pemilu dimaksudkan agar masyarakat berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Sosialisasi politik dapat diselenggarakan oleh berbagai peran agen. Para ilmuwan sosiologi politik menyusun identifikasi agen-agen sosialisasi politik menjadi empat, yaitu; keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, dan media massa. Dalam keluarga orang tua menjadi agen utama sosialisasi politik, dimana ada dua model peran yang dimainkan oleh orang tua dalam sosialisasi politik, yaitu peran represif dan peran partisipatif. Dalam sekolah, guru merupakan agen sosialisasi politik yang utama karena guru merupakan figur yang berfungsi sebagai transformasi nilai-nilai dan transformasi ilmu pengetahuan, termasuk nilai dan pengetahuan politik.

Sosialisasi dengan agen teman sebaya menjadi penting, mengingat kelompok teman sebaya merupakan kelompok rujukan (*reference group*) dalam mengembangkan sikap dan

perilaku yang berhubungan dengan politik. Sosialisasi politik melalui kelompok teman sebaya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi cara yang paling efektif melaksanakan sosialisasi di kelompok teman sebaya adalah dengan sosialisasi informal dan tatap muka langsung. Sedangkan alasan pentingnya sosialisasi dengan menggunakan agen media massa, karena media massa di era ini telah berfungsi mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, cara bertindak, dan sikap politik seseorang. Pengaruh media massa saat ini bersifat massif, berskala besar, bahkan segera.

Bab 6

PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik merupakan tema yang harus mendapatkan perhatian khusus pada negara-negara dengan sistem politik demokrasi. Alasan utama tema ini harus diperbincangkan adalah karena fenomena a-politik (ketidakpedulian masyarakat terhadap politik) di era ini sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan. Dalam kasus pemilu misalnya, beberapa negara menunjukkan angka Golput dalam pemilu mereka sudah sampai pada kondisi yang berbahaya. Berikut penulis menggambarkan kondisi golput di beberapa negara.⁴² Di kawasan Asia, misalnya Thailand menjadi negara paling tinggi angka golput-nya. Pada pemilu bulan Februari tahun 2014, warga negara Thailand yang berpartisipasi dalam pemungutan suara hanya 46,79 %, artinya angka golput mencapai 53,21 %. Di kawasan Eropa Timur, negara Lithuania

⁴²<http://kumpulan-berita-unik.blogspot.co.id/2014> (dikutp tanggal 25 Februari 2017)

yang memiliki populasi 2,9 juta, pada, pemilu tahun 2012, angka partisipasi pemilih hanya 35,91 %, maka artinya golput mereka mencapai 64,09 %.

Sementara itu, di kawasan Amerika Utara, negara Haiti dari 3,5 juta rakyat yang terdaftar dalam daftar pemilih, hanya 28,31 % yang berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2006. Maka artinya angka golput mencapai 71,69 %. Di kawasan Benua Afrika, Nigeria pada pemilu 2011, dari 73,5 juta penduduk terdaftar, hanya 28,9% yang menyalurkan suaranya. Ini artinya angka golput mencapai 71,1%. Dan pada pemilu 2012 hanya 19,44% rakyat mencoblos dari 796,9 ribu pemilih terdaftar. Artinya angka golput mencapai 80,56%.

Data-data di atas menunjukkan rendahnya partisipasi memilih masyarakat atau tingginya angka golput di banyak negara sudah berada pada posisi yang mengawatirkan secara politik. Di beberapa negara, rata-rata angka golput sudah berada di atas angka partisipasi pemilih. Artinya warga negara yang tidak menggunakan hak pilih lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan hak pilih. Fenomena ini sekaligus menandakan tumbuhnya gejala a-politik masyarakat. Bagi masyarakat, politik bukan lagi urusan mereka. Politik tidak memberikan *impack* langsung bagi masyarakat, politik tidak

memberikan pengaruh ekonomi bagi masyarakat. Politik hanyalah merupakan urusan elit.

Di Indonesia angka golput masih dalam posisi yang proporsional. Pada pemilu anggota DPR dan DPD tahun 2014, misalnya dari 187.852.992 warga negara terdaftar dalam daftar pemilih, yang menggunakan hak pilihnya 75,55%, atau angka golput adalah 24,45%.⁴³ %.⁴⁴ Data ini memperlihatkan secara nasional angka partisipasi pemilih Indonesia masih lebih tinggi apabila dibandingkan beberapa negara lain.

A. Definisi Partisipasi Politik

Definisi partisipasi politik yang dikemukakan para ahli masih memperlihatkan keberagaman. Meskipun demikian hampir semua buku yang membicarakan sosiologi politik menyisihkan satu bab untuk membahas partisipasi politik. Berikut ini penulis paparkan definisi partisipasi politik dari tiga sumber referensi. Harapannya, paparan definisi ini menyadarkan kita bahwa hingga kini belum ada makna tunggal tentang definisi partisipasi politik. meskipun demikian, para

⁴³ Komisi Pemilihan Umum, Buku Data dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI Tahun 2014, hlm 27

⁴⁴ Komisi Pemilihan Umum, Buku Data dan Infografik Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014, hlm. 67

pemikir memiliki maksud yang hamper sama, yang berbeda hanya narasi mereka.

Buku yang di tulis oleh Basrori, dkk mengutip pendapat beberapa ahli dalam berusaha merumuskan definisi partisipasi politik. dari penelusurannya mereka menarik simpulan tentang makna partisipasi politik sebagai ketersediaan (baik yang berkaitan dengan sikap maupun perbuatan nyata) dalam kegiatan penyusunan rencana, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, evaluasi, dan bahkan dalam memikul resiko dan tanggung jawab suatu program.⁴⁵ Jadi esensi partisipasi adalah pada bentuk sikap dan perbuatan masyarakat dalam hubungannya dengan kepolitikan

Tabel 6.1. Definisi Partisipasi Politik Basrori, Sukidin & Suko Susilo

Pemikir	Definisi
Dusseldorp (1981)	Partisipasi adalah kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktivitas untuk mencapai sutau kemanfaatan secara optimal
Cohen dan Upholf (1979)	Partisipasi adalah keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program

⁴⁵ Basrowi, Sukidin, Suko Susilo, Sosiologi Politik (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 65

Pemikir	Definisi
Davis (1977)	Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong dirinya untuk memberi sumbangan bagi tercapainya tujuan dan membagi tanggung jawab di antara mereka

Sumber : Basrori, Sukidin & Suko Susilo, 2012, hlm.65

Damsar mencoba merumuskan definisi partisipasi politik dari tafsir terhadap makna partisipasi dan makna poltiik. Dan dari dua konsepsi ini Damsar mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan public (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik, kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).⁴⁶ Damsar juga mengutip pendapat para pemikir lain dalam melihat definisi partisipasi politik sebagaimana pada tabel 6.2.

⁴⁶ Damsar, Prof.,Dr., Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 179-181

Tabel 6.2. Definisi Partisipasi Politik Dari Damsar

Pemikir	Definisi
Keith Fauls (1999)	Partisipasi politik adalah keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan
Herbert McClosky	Partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan kebijakan umum
Samuel P Huntington & Joan M Nelson	Partisipasi adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.
Michael Rush & Philip Althoff (2003)	Partisipasi politik adalah keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik

Sumber: Prof.Dr.Damsar, 2013, hlm. 179-181

A.A. Said Gatara & Moh.Dzulkih Said merupakan dua pemikir yang memiliki konsentrasi membahas sosiologi politik ini mencoba membuat identifikasi para pemikir yang pernah berbicara tentang partisipasi politik. Dari pandangan para ahli tersebut mereka kemudian menyusun beberapa substansi untuk digunakan sebagai “rambu-rambu” mendefinisikan partisipasi politik. lebih jelasnya nampak pada tabel 6.3.

Tabel 6.3. Definisi Partisipasi Politik Dari Gatara & Said

Pemikir	Definisi	Indikator
Samuel P.Huntington & Joan M.Nelson (1984)	“kegiatan warga permanen (<i>private citizen</i>) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah”	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan, bukan sikap dan kepercayaan • Memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan publik • Dilakukan oleh warga permanen
Michael Rush & Philip Althoff (2003)	“keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik”	<ul style="list-style-type: none"> • Berwujud keterlibatan individu dalam politik • Memiliki tingkatan-tingkatan
Herbert McClosky (dalam Miriam Budiardjo, 1994)	“kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum”	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa kegiatan-kegiatan sukarela • Dilakukan warga negara • Warga negara terlibat dalam proses-proses politik
Kevin R.Hardwic (dalam Frank N.Magill, 1996)	“partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut”	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah • Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik
Miriam Budiardjo,	“kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa kegiatan individu atau

(1994)	ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (<i>public policy</i>)”	kelompok <ul style="list-style-type: none"> • Bertujuan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pemimpin publik atau mempengaruhi kebijakan publik
Ramlan Surbakti (1992)	“keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.....sesuai dengan istilah partisipasi, (politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik”	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik • Dilakukan oleh warga negara biasa

Sumber : A.A.Said Gatra & Moh.Dzulkiyah Said, 2007: hlm.90-91

Dari definisi di atas, dapat ditelusuri rambu-rambu untuk mendefinisikan partisipasi politik ke dalam sejumlah komponen.⁴⁷

1. Kegiatan-kegiatan nyata, yaitu kegiatan-kegiatan yang bisa diamati secara kasat mata, bukan sikap-sikap atau orientasi;

⁴⁷A.A.Said Gatra & Moh.Dzulkiyah Said, Sosiologi Politik Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), hlm.92

2. Bersifat sukarela, yaitu kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri, bukan digerakkan oleh pihak-pihak lain seperti bayang-bayang pemerintah. Jika pemicunya adalah pihak lain, kecenderungannya bukan partisipasi, melainkan mobilisasi politik;
3. Dilakukan oleh warga negara baik individu atau kelompok, artinya ini menjadi isyarat bahwa, partisipasi menutup rapat kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh non-warga negara biasa dalam kehidupan politik;
4. Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan/atau mencari jabatan politik, yaitu tujuan partisipasi politik itu adalah ikut serta dalam kehidupan politik sebagai penggerak untuk mendapatkan kesukarelaan dalam berpartisipasi;
5. Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi, yaitu keterlibatan individu-individu berbanding lurus dengan bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia dalam sistem dan struktur politik yang ada. Dari yang paling bawah sampai tingkatan yang paling tinggi, dan dari paling luas cakupannya sampai yang paling sempit.

B. Tipologi Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki beberapa tipologi. A.A. Said Gatara dan Moh.Dzulkih Said membagi partisipasi politik kedalam beberapa tipologi, sebagai berikut⁴⁸

1. Partisipasi politik aktif dan pasif

Yang termasuk dalam partisipasi politik aktif seperti mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang di buat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintah. Sedangkan yang termasuk dalam partisipasi pasif dapat berupa kegiatan mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah

2. Berdasarkan jumlah pelaku

Berdasarkan jumlah pelaku, tipologi partisipasi politik dapat berupa partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi politik individual adalah kegiatan warga negara secara perseorangan terlibat dalam kehidupan politik. Partisipasi politik kolektif adalah

⁴⁸ A.A.Said Gatara & Moh.Dzulkih Said, *ibid*, hlm. 98

kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilu.

Apabila dilihat dari perbedaan kedua tipologi di atas, maka tipe partisipasi aktif menunjukkan kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Di samping itu biasanya ada sejumlah orang atau kelompok yang tidak termasuk dalam tipe partisipasi aktif atau pasif, dimana mereka menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Mereka ini disebut sebagai kelompok apatis atau a-politik. Biasanya kelompok ini memandang politik bukan urusannya, politik itu urusan elit, sementara urusan mereka adalah ekonomi, sosial, agama, budaya. Atau mereka biasanya orang-orang yang dikecewakan oleh perilaku aktor politik, misalnya mereka kecewa dengan fenomena korupsi atau berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang kerap mereka saksikan sehari-hari.

C. Bentuk dan Hirarki Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik ada beraneka ragam, Gabriel A. Almond (dalam A.A.Said Gatra & Moh.Dzulkiyah Said) membaginya kedalam dua kelompok, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Yang pertama adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern, sedangkan yang kedua adalah kegiatan ilegal bahkan penuh kekerasan dan revolusioner. Adapun beberapa wujud dari kedua bentuk partisipasi politik ini sebagaimana tabel 6.4.

Tabel 6.4. Bentuk Partisipasi Politik Versi Almond

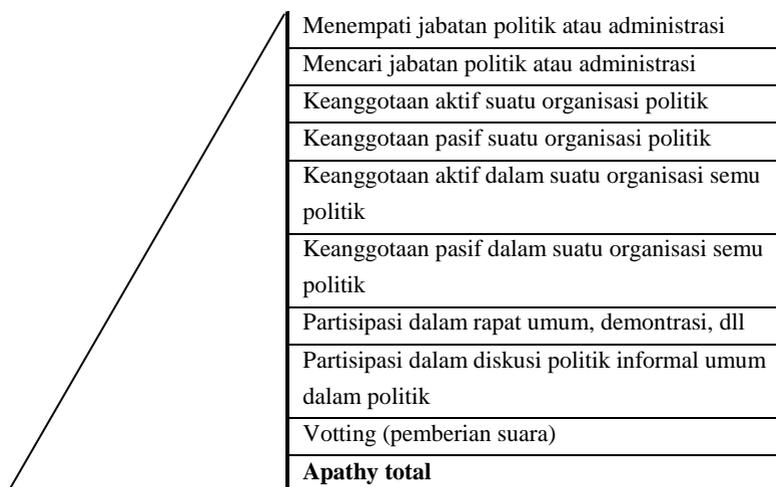
Konvensional	Non-Konvensional
<ul style="list-style-type: none">• Pemberian suara• Diskusi politik• Kegiatan kampanye• Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan• Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengajuan petisi• Berdemonstrasi/unjuk rasa• Konfrontasi• Mogok• Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran)• Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)• Perang gerilya

Sumber : Sumber : A.A.Said Gatra & Moh.Dzulkiyah Said, 1997, hlm.98

Selain dapat dilihat dari bentuknya, partisipasi politik juga dapat dilihat dari hirarkinya. Russh Althoff (dalam A.A.Said

Gatra & Moh.Dzulkih Said) menggambarkan hirarki partisipasi politik sebagaimana gambar 7.1.

Gambar 6.1.Tingkatan Partisipasi Politik



Sumber : A.A.Said Gatra & Moh.Dzulkih Said, 1997, hlm.95

Dari gambar 6.1. nampak bagaimana ikut serta dalam pemberian suara (*votting*) merupakan hirarki partisipasi politik yang paling minimal. Sebagai warga negara, ikut memilih merupakan bagian dari komitmen terhadap kepemimpinan politik dan menentukan langsung pemimpin politik merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Secara moral, ikut memilih merupakan tangga pertama untuk partisipasi politik selanjutnya. Seorang warga negara yang tidak ikut memilih

secara moral sesungguhnya tidak etis terlibat dalam diskusi-diskusi politik, demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah, apalagi meminta jabatan-jabatan politik atau administrasi. Kira-kira seperti itu alasan mengapa pemberian suara menjadi tangga pertama partisipasi politik.

D. Alasan Apatisme Politik

Untuk membahas alasan mengapa orang tidak berpartisipasi dalam politik, penulis menggunakan bukunya Prof.Damsar sebagai referensi utama.Di dalam bukunya Damsar ditemukan pandangan dua pemikir yang memberikan alasan mengapa orang bersikap apatis dalam politik, yaitu Morris Rosinberg (1954) serta Rush dan Althoff (2003). Mereka menyatakan ada tiga alasan mengapa orang bersikap apatis dalam politik. ⁴⁹ *Pertama*, aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Biasanya setiap aktivitas politik memiliki resiko, ketika seseorang memandang bahwa keterlibatannya dalam aktivitas politik akan mendatangkan resiko bagi dirinya atau keluarga atau kelompoknya, maka apatis menjadi pilihan terbaik bagi dirinya. *Kedua*, boleh jadi aktivitas politik dipandang sebagai

⁴⁹ Damsar, *ibid*, hlm.191

suatu kerja yang sia-sia. Interpretasi individu terhadap realitas politik sebagai sesuatu yang bermanfaat atau sebaliknya sebagai sesuatu yang sia-sia, akan memberi pengaruh terhadap keterlibatan seseorang dalam politik. Ketika interpretasi seseorang terhadap realitas politik mengatakan sebagai aktivitas sia-sia, maka dia akan menjadi apatis dalam politik. *Ketiga*, ketiadaan faktor untuk “memacu diri untuk bertindak”, salah satu faktor utama adalah factor material. Biasanya ketika tidak ada factor material yang diperoleh dari aktivitas politik, maka orang cenderung menjadi apatis, demikian sebaliknya.

Apabila pertanyaannya kemudian di balik, mengapa orang mau berpartisipasi dalam politik. Jika merujuk pada pendapat Morris di atas, maka dapat di duga ada tiga alasan orang berpartisipasi dalam politik. *Pertama*, keterlibatan dalam politik bukan merupakan ancaman bagi kehidupan orang yang bersangkutan. Beberapa orang justru merasa mampu menikmati kehidupannya sebagai politisi, terlepas dari ia menduduki jabatan public atau tidak. Penulis menemukan beberapa orang secara aktif menjadi tim sukses dalam pemilu atau menjadi pengurus partai politik meskipun mereka tidak

menjadi anggota parlemen. Dan yang mereka dapatkan hanyalah kepuasan.

Kedua, aktivitas politik di lihat sebagai sesuatu yang bermanfaat. Konsep sebagai sesuatu yang bermanfaat bersifat relatif, masing-masing orang memiliki ukuran yang berbeda. Misalnya ketika seorang yang baru menyelesaikan studi doktor ilmu politik dan belum mendapat pekerja, berbeda manfaat menjadi calon anggota legislatif dibandingkan pengusaha sukses. Boleh jadi seorang doctor mudal ilmu politik mendaftar sebagai calon anggota legislatif manfaatnya untuk menguji teori-teori politik yang dimilikinya dilapangan, sedangkan bagi pengusaha menjadi calon anggota legislatif bermanfaat untuk membangun jaringan bisnis. Meskipun ukurannya berbeda, tetapi prinsipnya sama, yaitu mereka mereka berpartisipasi dalam politik karena mereka mendapatkan manfaat.

Ketiga, aktivitas politik memenuhi kebutuhan material atau kebutuhan immaterial bagi kehidupannya. Dalam teori pertukaran sosial, seorang aktor adalah merupakan sosok yang rasional yang selalu mempertimbangkan untung rugi apabila melakukan sesuatu, termasuk apabila mereka terlibat dalam kehidupan politik. Boleh jadi seseorang menjadi tim sukses dalam suatu kompetisi pemilu karena mendapatkan upah dari

sang kandidat, atau pemilih memberikan suaranya dalam pemilu karena diberikan uang atau barang oleh kandidat. Pada saat pemungutan suara pemilu legislative tahun 2014, penulis sempat bertanya pada seorang pemilih seputar apa alasan mereka datang ke TPS memberikan suara. Ada pemilih yang memberikan jawaban karena ingin membayar hutang. Lantas penulis bertanya lebih lanjut apa yang dia maksudkan dengan hutang. Si pemilih tersebut mengatakan beberapa hari yang lalu sudah menerima sejumlah uang dari salah satu tim sukses agar memilih salah seorang calon anggota legislative yang sudah beritahukan nama dan partainya. Maka bagi si pemilih tadi datang lebih cepat ke TPS dia sudah dipenuhi kebutuhan materilnya oleh peserta pemilu.

E. Ringkasan

Paparan definisi partisipasi politik yang dikemukakan para ahli secara berbeda-beda menyadarkan kita bahwa hingga kini belum ada makna tunggal tentang definisi partisipasi politik. Meskipun demikian, para pemikir memiliki maksud yang hampir sama, yang berbeda hanya narasi mereka. Bahwa partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela dalam

urusan-urusan politik. Fokus perhatian kajian partisipasi politik adalah aktivitas atau kegiatan politik bukan pada sikap atau pikiran.

Partisipasi politik memiliki beberapa tipologi, yakni; (1) partisipasi aktif dan pasif; (2) partisipasi partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Dilihat dari perbedaannya, partisipasi aktif menunjukkan kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Adapun partisipasi individual menunjuk pada aktivitas politik secara perorangan/individu, sedangkan partisipasi politik kolektif merujuk pada partisipasi politik secara berkelompok.

Bentuk partisipasi politik dapat dikelompokkan menjadi dua yakni konvensional dan non-konvensional. Yang termasuk konvensional adalah; pemberian suara, iskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Yang termasuk non-konvensional adalah; pengajuan petisi, berdemonstrasi/unjuk rasa, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran),idak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya.

Bab 7

TEORI SOSIOLOGI POLITIK

Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang menyediakan perspektif. Oleh karena itu, dalam mempelajari objek kajiannya, sosiologi menggunakan paradigma dan teori. Paradigma sebagai konsep, pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn tahun 1962, melalui bukunya *The Structure of Scientific Revolution*. Menurut Zamroni, konsep yang diperkenalkan oleh Kuhn ini kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs tahun 1970.⁵⁰ Lebih lanjut Zamroni memaparkan, bahwa inti tesis Kuhn, sebagai berikut;

“bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bukan terjadi secara kumulatif tetapi secara revolusioner. Ilmu pengetahuan pada waktu tertentu didominasi oleh paradigma tertentu, yakni paradigma yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan, namun para ilmuwan tidak dapat mengelakkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan (*anomalies*). Selama memuncaknya

⁵⁰ Zamroni, Dr., *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* (PT.Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992), hlm. 21.

penyimpangan suatu krisis akan timbul, dan paradigma itu mulai disangsikan validitasnya. Kemudian akan muncul revolusi dan akan muncul paradigma baru yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi”⁵¹

Pertanyaan mendasarnya kemudian, apa yang dimaksud dengan paradigma?. Hingga saat ini memang tidak ada definisi tunggal tentang makna paradigma. Namun bukan berarti ilmuwan tidak memiliki batasan tentang apa yang dimaksud dengan paradigma. Robert Friedrichs sendiri kemudian mencoba mendefinisikan paradigma sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Jika demikian halnya, maka dapat diasumsikan bahwa setiap disiplin ilmu memiliki sejumlah paradigme untuk mempelajari objek kajiannya.

Sosiologi sebagai disiplin ilmu mandiri memiliki sejumlah paradigma. Karena itu, George Ritzer menilai sosiologi itu terdiri atas kelipatan beberapa paradigma (*multiple paradigm*).⁵² Para ahli sosiologi klasik mengelompokkan teori-teori sosiologi kedalam tiga paradigma, yakni; paradigma fakta

⁵¹ Ibid, hlm.21

⁵² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, judul aslinya *Sociology: a multiple paradigm science*, (PT RajaGrafindo, 2002), hlm.9

sosial, paradigma definisi sosial dan paradigma perilaku sosial. Yang termasuk dalam kelompok paradigma fakta sosial adalah teori struktural fungsional, teori struktural konflik, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Termasuk dalam kelompok paradigma definisi sosial adalah; teori aksi (*action theory*), teori interaksionisme simbolik (*symbolic interactionism*), dan fenomenologi (*phenomenology*). Sedangkan yang termasuk dalam kelompok paradigma perilaku sosial adalah; teori *behavioral sociology* dan teori *axchange*. Dalam kaitannya dengan tema besar buku ini, penulis tidak bermaksud membahas seluruh teori sosiologi, namun akan diambil beberapa teori yang dipandang memiliki relevansi dengan pembahasan politik.

Sebelum membahas beberapa teori sosiologi yang memiliki relevansi dengan politik, terlebih dahulu dipaparkan definisi tentang teori. Kerlinger tahun 1973 (dalam Zamroni)⁵³ mendefinisikan teori sebagai “sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling kait mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang terkait dalam

⁵³ Zamroni, Dr., *ibid*, hlm.1

fenomena, dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut”. Dengan demikian, teori merupakan instrument untuk menjelaskan fenomena yang digunakan oleh peneliti atau akademisi. Ketika peneliti ilmu sosial mendatangi objek kajian, diharapkan membawa teori, namun tidak diperbolehkan memaksa keberlakuan teori. Lantas pertanyaan berikutnya, apa fungsi teori ?

Zamroni menyebutkan setidaknya ada tiga fungsi teori dalam ilmu-ilmu sosial, yakni; (1) untuk sistematisasi pengetahuan; (2) untuk eksplanasi, prediksi, dan kontrol sosial; (3) untuk mengembangkan hipotesa. Yang dimaksud oleh fungsi pertama adalah, setiap konsep dapat digunakan untuk kategorisasi dan klasifikasi. Misalnya “peserta pemilu”, dapat diklasifikasikan menjadi pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah pemilih.

Fungsi kedua, misalnya kita lihat eksplanasi berhubungan dengan peristiwa yang telah terjadi. Prediksi berhubungan dengan peristiwa yang akan terjadi. Sedangkan kontrol sosial berhubungan dengan usaha untuk menguasai atau mempengaruhi peristiwa yang akan terjadi tersebut. Misalnya ada fenomena perilaku memilih dimana pemilih memberikan

pilihannya kepada kandidat tertentu berdasarkan ikatan keluarga, kesamaan geopolitik, dan kesamaan ideologi. Pada pemilu tahun sebelumnya (sebagai ekplanasi) pemenang pemilu adalah pengguna simbol agama (ideologi), pemilu tahun ini pemenangnya juga adalah kandidat yang menggunakan simbol-simbol agama. Maka pemilu yang akan datang dapat diprediksi kandidat yang menggunakan simbol-simbol agama akan menjadi pemenang. Dalam mempelajari perilaku memilih masyarakat, runtutan peristiwa ini dapat dijelaskan melalui mashab sosiologis.

A. Karl Marx (1818-1883)

Karl Marx adalah tokoh sosiologi klasik berkebangsaan Jerman. Marx lahir tahun 1818 dari keluarga kelas menengah yang sukses. Ayah Marx berprofesi sebagai pengacara yang di pandang sukses di negaranya. Ibu Marx, berasal dari keluarga Rabi Yahudi, namun ketika profesi ayahnya sebagai pengacara mulai terusik oleh situasi politik di negaranya, ayah dan keluarga Marx pindah agama ke Protestan. Marx muda menyelesaikan gelar doktor bidang filsafat dari Universitas Berlin tahun 1841. Universitas ini, merupakan perguruan tinggi

yang pemikirannya dipengaruhi oleh Hegel. Oleh karena itu, pemikiran Marx banyak dipengaruhi oleh ajaran Hegelian.

Dalam beberapa buku yang menulis tentang pikiran Hegel, nampaknya terbaca bahwa Hegel merupakan penulis kritis dijamannya. Buku yang di tulis oleh Anthony Giddens dengan judul *Classcs, power, and conflict* yang kemudian dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia tahun 1987 oleh Vedi R.Hadiz, terlihat pernyataan Hegel sebagai berikut;

“bahwa kreasi diri manusia merupakan suatu proses. Kreasi diri tersebut mencakup proses objektifikasi, di mana manusia kehilangan objeknya dan mengalami proses pengasingan diri, dan kerja sebagai esensi manusia”⁵⁴

Bagi Karl Marx, apa yang dipikirkan oleh Hegel di atas, dalam rangka ingin menggambarkan bagaimana kerja merupakan hakekat manusia, dan manusia objek adalah manusia sebagai hasil pekerjaannya sendiri. Dalam pikiran Hegel, orientasi hidup manusia hanyalah kerja, dan ketika kerja sebagai objek, maka sesungguhnya manusia itu sendiri adalah objek. Oleh karena itu, manusia mengalami persaingan dengan manusia lainnya.

⁵⁴ Anthony Giddens & David Held, *Perdebatan Klasik Dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, diterjemahkan oleh Vedi R.Hadiz (Jakarta, CV.Rajawali, 1987), hlm.13.

Karl Marx kemudian menuduh bahwa Hegel hanya melihat kerja sebagai orientasi manusia dari sisi positif belaka, tetapi Hegel kata Marx tidak melihat sisi negatif dari kerja. Marx sendiri menjelaskan bahwa kerja yang berasal dari diri manusia berada dalam kondisi keterasingan. Maka kata Marx, manusia pekerja sesungguhnya adalah orang yang terasing. Dari pergolakan pemikiran ini kemudian Marx memperkenalkan konsep ekonomi politik.

Penjelasan ekonomi Karl Marx dimulai dari ekonomi kontemporer. Rumusan kalimat yang menarik dari penjelasan Marx, sebagai berikut:

“semakin miskin keadaan pekerja, semakin banyak kekayaan yang diproduksinya. Dan semakin banyak kekayaan yang diproduksi oleh si miskin tadi, semakin besar kekuasaan yang dibentuk oleh borjuis. Sedangkan pekerja atau tenaga kerja hanya menjadi komoditi murah. Dan semakin murah komoditi itu, semakin banyak barang yang dihasilkannya. Kerja tidak hanya menciptakan benda-benda, tetapi juga menciptakan kerja itu sendiri, dan pekerja sebagai suatu komoditi dalam proporsi yang sama dengan produksi barang-barang”⁵⁵

Penjelasan Marx di atas memperlihatkan ada hubungan yang tidak seimbang antara pekerja dan borjuis. Pekerja atau

⁵⁵ Ibid, hlm.14-16

dalam bahasa Marx di sebut proletariat selalu berada dalam posisi bergantung pada borjuis, dan borjuis selalu berpikir untuk mengeksploitasi para pekerja agar mendapatkan produksi sebanyak-banyaknya. Dan dengan produksi itu, borjuis mampu menguasai proletariat. Dalam dialektika yang demikian, proletariat terus-menerus menciptakan sumber kekuasaan (produksi) bagi borjuis untuk menguasai proletariat itu sendiri. Dengan perkataan lain, sesungguhnya setiap produk yang dihasilkan pekerja adalah senjata bagi borjuis untuk menguasai para pekerja.

Ada beberapa persepektif yang ditawarkan oleh Karl Marx sebagai inspirasi para akademisi membaca fenomena politik. Empat diantaranya adalah pendekatan matrialisme historis, teori alenasi, teori perubahan sosial, dan tentang agama.⁵⁶

1. Pendekatan Matrialisme Historis

Terdapat empat konsep untuk menjelaskan pendekatan matrialisme historis model Marx, yakni; *means of production* (cara produksi), *relations of production* (hubungan produksi), *mode of productions* (mode produksi), dan *force of productions*

⁵⁶ Damsar, Prof.,Dr., *Pengantar Sosiologi Politik Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.22-24

(kekuatan produksi). Yang pertama merujuk pada apa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan material manusia. Pada masyarakat tradisional adalah pertanian, sedangkan pada masyarakat modern adalah pabrik atau industri. Yang kedua merujuk pada hubungan antara cara suatu masyarakat memproduksi dan peranan social yang terbagai kepada individu-individu dalam produksi. Pada masyarakat tradisional, pemilik tanah memegang peranan sebagai borjuis, dan penggarap lahan memegang peranan sebagai proletariat. Pada masyarakat modern yang memegang peranan sebagai borjuis adalah pemilik pabrik, sedangkan proletariat adalah buruh.

Yang ketiga merujuk pada elemen dasar dari suatu tahapan sejarah dengan memperlihatkan bagaimana basis ekonomi membentuk hubungan sosial, seperti masa kuno, feodal, atau kapitalis. Baik pada masyarakat tradisional (feodal) maupun masyarakat modern (kapitalis), hubungan antara borjuis dan proletariat adalah hubungan eksploitasi, karena sifat hubungan mereka adalah hubungan ketergantungan. Borjuis menyadari betul bahwa yang berada pada posisi menggantung adalah proletariat, karena itu seluruh produksi yang dihasilkan proletariat berkontribusi memperkuat posisi borjuis untuk terus

mengeksploitasi proletariat. Yang keempat merujuk pada kapasitas dalam benda-benda dan orang yang digunakan bagi tujuan produksi. Pada masyarakat feodal tuan tanah akhirnya selalu berada pada posisi politik strategis. Biasanya tuan tanah memegang posisi sebagai kepala desa, perangkat desa, dan menguasai peran-peran sosial lainnya. Di era sekarang ini, pemilik media massa dan perusahaan lainnya sekaligus menjadi ketua umum partai politik dan menguasai parlemen.

Dari seluruh paparan di atas, dapat disimpulkan pemikiran Marx tentang materialisme historis ingin menjelaskan bahwa sejarah masyarakat selalu ditandai dengan perjuangan kelas antara pemilik modal dan pekerja atau buruh. Dalam bahasa Marx antara borjuis dan proletariat. Dengan demikian, realitas ekonomi masyarakat membentuk perilaku manusia. Dan kebutuhan material manusia menjadi motivasi yang harus terpenuhi sebelum terpenuhinya kebutuhan yang lain.

2. Teori Alienasi

Kata Marx, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah kerja. Hanya manusia yang mampu melakukan kerja. Dan melalui kerja, kemudian manusia menjadi produsen. Pertanyaannya adalah, kalau manusia itu produsen, bagaimana

mungkin manusia kehilangan kekuasaan atas produknya sendiri?. Atau pertanyaan lebih ekstrim lagi, bagaimana mungkin produk itu mendapat kekuasaan atas produsennya?. Inilah yang disebut dengan alienasi (keterasingan).

Karl Marx menuduh, kapitalisme sebagai penyebab manusia mengalami alienasi, karena hasil kreaktifitas produsen menjadi terasing, atau diasingkan dari produsen itu sendiri. Dalam catatan Zamroni disebutkan, ada dua bentuk alienasi, yakni; (1) produk di luar kontrol dari produsen seperti jenis, kualitas, harga, dan pemasaran produk; (2) produsen, harus menyesuaikan diri dengannya seperti mengikuti kapasitas produksi mesin.

3. Teori Perubahan Sosial

Dalam bukunya yang diberi judul *The Communist Manifesto*, Marx menyatakan “sejarah dari semua masyarakat hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas”. Sejarah perjuangan kelas berasal dari suatu kondisi dimana adanya pembagian kerja dan pemilikan pribadi. Ketika masyarakat sudah mengenal pembagian kerja dan pemilikan pribadi, maka manusia mulai mengenal kontradiksi antara kelompok yang memiliki atau pemilik dan kelompok yang tidak memiliki.

Pada saat bersamaan, kondisi ini menyebabkan timbulnya stratifikasi sosial, yaitu kelas pemilik dan kelas bukan pemilik.

Pada masyarakat tradisional terjadi kontradiksi antara pemilik lahan dan bukan pemilik lahan. Proses kontradiksi ini kemudian melahirkan kapitalisme. Pada masyarakat kapitalisme pun demikian, terjadi kontradiksi antara kelas borjuis dan kelas proletariat. Pergolakan perjuangan antar kelas ini kata Marx yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Namun demikian, pergolakan akan terjadi manakala kelompok proletariat telah sampai pada kesadaran kelas. Dengan demikian, apabila menginginkan perubahan sosial, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menciptakan kesadaran kelas kelompok proletariat. Dan Marx termasuk tidak percaya jika perubahan sosial datang dari kelompok borjuis, karena borjuis adalah kelompok yang selalu akan mempertahankan kelas. Cara agar tercipta pertahanan kelas adalah stabilitas sosial dan politik, bukan dinamika seperti yang diharapkan proletariat.

4. Tentang Agama

Dalam melihat agama, Marx termasuk sosiolog yang beraliran fungsionalisme. Alasannya, karena Marx melihat

agama dari fungsinya. Catatan kecil yang ditemukan dalam karya Sindung Haryanto tahun 2015 memaparkan pemikiran Marx tentang posisi agama, sebagai berikut;

“agama merupakan instrumen untuk memanipulasi dan menindas kelas subordinat dalam masyarakat. Bahkan Marx mengatakan, pada masyarakat kapitalis, agama dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi buruh. Pemilik modal menggunakan fatwa-fatwa dari gereja untuk melegitimasi kerja lembur malam hari termasuk bagi buruh perempuan. Kaum buruh juga di buai dengan ideologi-ideologi yang membius, misalnya, kerja keras merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan, dan bahwa kekayaan dan kemiskinan merupakan sesuatu yang di atur Tuhan. Maka, kata Marx, agama dapat menjadi penghalang perubahan, karena agama merupakan bentuk kontrol sosial yang menyebabkan kelas buruh berada dalam kondisi kesadaran palsu”⁵⁷

Pandangan Marx di atas merupakan pikiran yang paling kontradiktif, banyak ahli memberikan kritik pedas sampai Marx dituduh sebagai pemikir yang tidak meyakini agama. Apabila dicermati lebih mendalam, sesungguhnya Marx hanya ingin mengatakan doktrin agama itu dapat disalahgunakan oleh pemilik modal untuk menindas proletariat (buruh). Jadi bukan agama yang menindas, tetapi kapitalis yang dalam pikiran

⁵⁷ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern* (Jakarta, Ar-Ruzzmedia, 2015), hlm.66-67

Marx menggunakan doktrin agama untuk menindas. Karena itu, penekanan Marx adalah “doktrin agama disalahgunakan oleh borjuis ataupun kapitalis untuk mengeksploitasi buruh”. Meskipun demikian, menurut hemat penulis, pikiran Marx ini harus dipahami secara hati-hati. Karena pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan keburukan khususnya Islam. Dan Marx menurut penulis, harus bertanggungjawab atas pernyataannya tersebut.

B. Individualisme, Holisme, dan Sistemisme

Perilaku manusia merupakan kajian universal dari ilmu sosial. Sosiologi, Antropologi, Psikologi, Ilmu Hukum, ilmu Administrasi Publik, dan ilmu politik, merupakan disiplin ilmu yang pada prinsipnya mempelajari manusia atau menempatkan manusia sebagai objek yang dipelajarinya. Ada banyak cara melihat perilaku manusia, John T. Ishiyana dan Marjike Breuning, dalam bukunya Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Referensi Panduan Tematis, menyebutkan ada tiga perspektif untuk memahami perilaku manusia, yakni; individualism, holisme, dan sistemisme. Dimana sistemisme

merupakan konsep yang berada di antara individualism dan holisme.⁵⁸

Individualisme

Perspektif ini memfokuskan kajiannya pada pentingnya peran individu dalam masyarakat. Postulat yang dibangun oleh perspektif individualisme adalah masyarakat ada demi untuk memenuhi kepentingan (manfaat) individu, dan individu tidak boleh dihambat oleh intervensi negara atau menjadi sub-ordinat bagi kepentingan kolektif. Setiap manusia memiliki tujuan akhir untuk mencapai kepentingan diri sendiri dan kebahagiaan adalah tujuan moral manusia. Demikian dikatakan oleh ahli filsafat Ayn Rand.⁵⁹ Lebih jauh perspektif individualisme menempatkan posisi sistem sosial sebagai kumpulan individu-individu. Perspektif individu menempatkan posisi individu sebagai manusia yang rasional dan otonom. Manusia itu sendiri yang paling mengetahui kebutuhannya dan paling tahu cara memenuhi kebutuhan tersebut. Pemerintah dan kolektivitas lainnya, seperti organisasi dan lembaga-lembaga sosial tidak perlu melakukan intervensi terhadap kebutuhan dan cara

⁵⁸ John T. Ishiyama & Marjike Breuning, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21* Jilid 1 (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 46

⁵⁹ *Ibid.* hlm.46

pemenuhan kebutuhan individu tersebut. Tugas utama negara hanya memberi jaminan terhadap kebebasan individu dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam rumusan yang disederhanakan, Ishiyama dan Breuning mengakhiri pembahasan tentang perspektif individualisme, dengan mengatakan bahwa ada tiga fokus perspektif individualisme, yaitu; (a) melindungi kebebasan dan hak-hak alamiah manusia; (b) mengupayakan pembangunan masyarakat yang memberi kemanfaatan bagi individu; (c) mendukung kapitalisme dengan meminimalisir peran pemerintah.

Holisme

Kritik yang sering dituduhkan kepada individualisme adalah, perspektif ini terlalu menafikan peran pemerintah. Sementara ada banyak permasalahan yang muncul ketika peran individu terlalu ditonjolkan dan peran pemerintah dibatasi. Dari beberapa kelemahan individualisme, perspektif holisme hadir untuk mengatasi permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh individualisme. Secara tegas, holisme berpendapat bahwa “masyarakat harus dianalisis sebagai suatu keseluruhan sistem

ketimbang semata-mata dalam konteks komponen individual”.⁶⁰

Holisme membangun postulat bahwa masyarakat harus diletakkan pada posisi sebagai kesatuan kolektif atau kebaikan yang lebih besar secara keseluruhan. Karena itu peran pemerintah harus disokong, dan intervensi pemerintah diposisikan bagi kebaikan bersama yang lebih besar. Dari postulat ini, nampaknya holisme memberikan perhatian peran institusi politik, dan penerapannya cenderung pada totaliterianisme. Pemikiran holisme dipengaruhi oleh pemikir-pemikir sosiologi klasik, seperti Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber. apabila dicermati, pemikir-pemikir ini dipengaruhi oleh cara berpikir strukturalisme dan kelas sosial.

Sistemisme

Holisme sebagai sebuah perspektif hadir bukan tanpa kelemahan. Ketika peran institusi politik menjadi begitu kuat dan melahirkan totaliterisme, maka kebebasan individu menjadi miskin. Individu akan menjadi manusia yang tidak inovatif, tidak kreatif, tidak dinamis, dan berada pada situasi

⁶⁰ Ibid, hlm..47

“terperangkap dalam kandang harimau”. Sistem sosial dan politik yang demikian tentu dalam jangka panjang kurang menguntungkan bagi perkembangan masyarakat. Ada banyak negara yang mengalami masalah ketika menerapkan secara ajek holisme dalam sistem politik negaranya.

Indonesia memiliki pengalaman holisme yang cukup lama pada masa pemerintahan Orde Baru (1965-1998). Presiden Soeharto ketika itu menerapkan sistem pemerintahan sentralistis dan membatasi segala kebebasan individu. Motto pemerintahan yang bangun yaitu stabilitas politik dan ekonomi, seolah menjadi legitimasi negara untuk melakukan perbuatan membatasi kebebasan masyarakat dan mengabaikan hak-hak sipil. Indonesia dilarang berbicara tentang perbedaan ras, suku, agama. Akibatnya, masyarakat tidak pernah belajar berbeda pendapat, berbeda pikiran bahkan berbeda pilihan. Sementara itu, pluralisme atau kemajemukan, merupakan karekteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat ditolak.

Di era reformasi, seiring pertumbuhan demokrasi yang begitu cepat, masyarakat mendapatkan angin kebebasan berbicara, berpendapat, dan berorganisasi. Di era ini kemudian terjadi kontestasi banyak organisasi dan ideologi. Dampak kontestasi tersebut salah satunya adalah konflik sosial.

Indonesia hari ini seolah terbelah menjadi bermacam-macam pecahan, seolah siap menaklukkan pecahan yang lain. Jika dirunut dari akar masalah, maka nampaknya fenomena Indonesia hari ini merupakan hal yang harus di bayar oleh kelemahan sistem holisme di masa yang lalu. Indonesia baru belajar tentang perbedaan, dan proses belajar ini tidaklah instan, membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu, pemerintah sebaiknya jangan terlalu panik, dan terburu-buru ingin kembali menerapkan sistem politik Orde Baru.

Sistemisme menuduh baik individualisme maupun holisme memiliki kelemahan. Pertama, kata sistemisme, individualism gagal dalam mengenal eksistensi masalah-masalah social sistemik, seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, holism disat sisi, tidak melihat tindakan individu sebagai sumber perubahan sosial. Maka sistemisme adalah pendekatan moderat di antara kedua ekstrem, dan pendekatan ini mengambil, kemudian menyarikan elemen-elemen dari pendekatan individualisme dan holisme.

Sistemisme memiliki beberapa postulat; (1) segala sesuatu, apakah kongkrit atau abstrak adalah suatu sistem atau suatu komponen aktual atau potensial dari suatu sistem; (2) sistem memiliki cirri-ciri sistemtis; (3) semua masalah seharusnya

didekati secara sistem ketimbang secara sektoral; (4) semua gagasan seharusnya ditempatkan bersama dalam sistem; (5) pengujian sesuatu, apakah gagasan atau artefak, mengasumsikan validitas hal-hal lain, yang di anggap sebagai patokan atau sekurang-kurangnya untuk sementara.

C. Fungsionalisme Struktural

Secara historis, teori fungsionalisme struktural berasal dari studi tentang struktur dan fungsi masyarakat. Studi ini memiliki asal-usul dari penemu sosiologi yakni Auguste Comte yang sedari awal mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang pranata sosial (struktur) dan dinamika sosial (proses/fungsi).⁶¹ Dalam melihat sosiologi sebagai struktur Comte, menempatkan kajian sosiologi sebagai statika sosial. Konsep statika sosial merujuk pada pemikiran yang melihat masyarakat berada dalam kondisi yang statis (stabil) tidak mengalami perubahan. Sebaliknya dinamika social, merupakan pemikiran yang melihat masyarakat selalu dalam kondisi berubah (dinamis). Premis yang dibangun oleh Comte dalam memandang masyarakat menyebutkan “masyarakat adalah

⁶¹ Margaret M.Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 23.

laksana organisme hidup”. Premis ini kemudian menjadi ide dasar munculnya teori sistem yang diperkenalkan oleh Herbert Spencer dipertengahan abad ke-19.

Meskipun demikian, lahirnya fungsionalisme struktural sebagai perspektif, dipopulerkan oleh ahli sosiologi berkebangsaan Prancis Emile Durkheim. Cara berpikir Durkheim memiliki kemiripan dengan Spencer, dimana ia melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organis yang mempunyai realitas tersendiri. Di dalam masyarakat itu kata Durkheim, terdapat seperangkat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang lain sebagai anggotanya. Jika ada kebutuhan dari bagian-bagian itu tidak terpenuhi atau dis-fungsional, maka akan muncul patologi.⁶² Penulis membayangkan konsep yang dibangun Durkheim, seperti organ tubuh manusia, yang terdiri dari bagian-bagian (suborgan), seperti mata, telinga, kaki, tangan, hati, jantung, dan seterusnya. Apabila salah satu dari suborgan tersebut disfungsional, maka organ-organ yang lainnya akan ikut terganggu. Oleh karena itu, agar manusia menjadi sehat, seluruh suborgannya harus fungsional satu dengan yang lainnya.

⁶²*Ibid*, hlm.25

Kajian-kajian terhadap teori fungsionalisme struktural terus berkembang, khususnya dikalangan pemikir-pemikir sosiologi kontemporer. Ada banyak ilmuwan baik sosiologi, antropologi, hukum, ekonomi, dan ilmuwan politik yang berusaha mengembangkan pemikiran teori ini. Keberagaman kajian tersebut menyebabkan teori fungsionalisme structural nyaris kehilangan landasan dasarnya. Meskipun demikian, menarik untuk menyimak pandangan Graham C.Kinloch dalam buku aslinya berjudul *Sociological Theori: Its Development and Majer Paradigms*, dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dan dieditor oleh Dadang Kahmad, Guru Besar IAIN SGD Bandung tahun 2005. Kinloch menjelaskan;

“Pendekatan fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai bentuk yang sistemik saling berhubungan, saling bergantung, berubah, keseluruhan yang berorientasi, dan menggambarkan kebutuhan-kebutuhan sistem atau fungsi yang mendasarinya.”⁶³

Pandangan di atas semakin menegaskan posisi fungsionalisme struktural dalam melihat masyarakat. Bagi teori ini setiap struktur dalam masyarakat adalah fungsional terhadap struktur yang lain. Struktur sosial, misalnya pranata

⁶³ Graham C.Kinloch, *Perkembangan Dan Paradigma Utama Teori Sosiologi* (Bandung, CV.Pustaka Setia, 2005), hlm.186

beragama, adalah fungsional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pranata beragama juga fungsional terhadap pilihan-pilihan politik warga negara. Bahkan pada tataran ekstrim, fungsionalisme struktural memandang kemiskinan itu juga fungsional. Persoalannya adalah fungsional bagi siapa ?. Tentu saja bagi kelompok miskin, disfungsional, tetapi kemiskinan fungsional bagi kelas menengah perkotaan. Misalnya kemiskinan menyediakan tenaga-tenaga kerja kasaran. Dapat dibayangkan jika dalam suatu kota kecil tidak ada orang miskin, lantas siapa yang membersihkan sampah. Dan apabila sampah tidak dibersihkan dalam satu atau dua hari, sampah tersebut bisa memunculkan banyak masalah baru, seperti penyakit, rasa tidak nyaman warganya, dan seterusnya. Singkat kata, fungsional struktural memandang seluruh bagian adalah fungsional terhadap bagian yang lain.

D. Feminisme

Sebagian kalangan melihat feminisme sebagai gerakan sosial, sebagian yang lain melihatnya sebagai teori. Tulisan ini tidak menempatkan dua perdebatan tersebut secara dikotomis, melainkan menempatkannya sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Argumentasinya, meskipun secara historis

femenisme hanya suatu konsep (teori), namun dalam perkembangannya fenemisme telah mewujud menjadi gerakan sosial. Maka keduanya harus diletakkan secara sama.

Sebagai teori, Josephine Donovan tahun 2000, membagi teori feminis kedalam tiga gelombang.⁶⁴ Gelombang pertama, bergulir ada abad ke-18 hingga abad ke-20, gelombang kedua, bergulir dari dekade tahun 1960-an hingga 1980-an, dan gelombang ketiga bergulir tahun 1990-an hingga saat ini. Fokus perhatian dalam masing-masing gelombang memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun demikian, sifat dari fokus masing-masing gelombang adalah berkelanjutan. Sudah pasti pemilihan fokus dalam setiap gelombang sesuai isu yang berkembang pada jamannya.

Pada gelombang pertama, teori femisnisme dipengaruhi oleh gerakan liberalisme yang sangat mendominasi isu pada abad ke-19. Dominiasi yang begitu besar dari liberalisme, menyebabkan liberalism ketika itu mewujud menjadi ideologi sentral yang berada di antara ideologi sosialisme dan konservatisme. Oleh para ilmuwan sosial, liberalisme telah diyakini berhasil membantu lahirnya feminisme dan menjaral di dunia Barat. Feminisme liberal, selalu tampil memberikan

⁶⁴ Sindung Haryanto, *ibid*, hlm. 99

kritik terhadap ide-ide pencerahan. Dan akhirnya, pengaruh feminisme liberal mulai rapuh sejak memasuki tahun 1960-an.

Ideologi sosialisme berasal dari teori Karl Marx. Meskipun ada kesulitan untuk menemukan definisi sejati tentang sosialisme, namun karya Ian Adams menggambarkan sosialisme yang berkembang pada awal abad ke-19 hadir sebagai respons atas pengaruh industrialisasi. Industrialisme telah di tuduh menghancurkan mata pencaharian banyak orang, dengan kehadiran pabrik-pabrik telah memaksa buruh bekerja dalam waktu yang sangat lama demi memperoleh gaji kecil dan hidup dalam kondisi yang buruk. Fenomena ini terjadi secara jamak di kota-kota industri baru. Pada saat bersamaan, usaha buruh untuk mengorganisirkan diri guna memperbaiki kehidupan mereka, ditekan secara brutal.

Maka sosialisme hadir dengan keyakinan, bahwa apa yang membuat rakyat menderita bukan ketamakan para majikan, bukan pula konspirasi kelas penguasa, tetapi sifat dari sistem kapitalis itu sendiri. Kata ajaran sosialisme, sistem kapitalis merupakan sebuah sistem yang mengandung unsur eksploitasi, karena itu sistem kapitalisme harus segera diakhiri, dan diganti

oleh sistem sosialisme. Sistem baru ini akan menghasilkan kebersamaan, kerjasama, harmoni, dan keadilan.⁶⁵

Adapun konsep konservatisme, pertama kali digunakan untuk menunjukkan pandangan politik yang dibedakan dengan politik ideologis. Meskipun demikian, Roger Eatwell dan Anthony Wright mendefinisikan konservatisme, sebagai ideologi yang melibatkan usaha untuk membangun kenyataan-kenyataan alternatif yang tidak memberikan kelonggaran pada keterbatasan-keterbatasan yang inheren dalam manusia. Mereka menyebutkan, konservatisme tidak dipertentangkan dengan perubahan; apa yang dipertentangkan dengan konservatisme adalah perubahan yang didukung berdasarkan alasan-alasan ideologis yang dirumuskan sebelumnya.⁶⁶

Kelompok feminisme liberal merupakan kelompok yang paling konsisten memperjuangkan isu-isu tentang hak pilih universal, yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan di pilih, tanpa membedakan suku, agama, dan jenis kelamin. Tokoh-tokoh utama kelompok ini berasal dari Amerika Serikat,

⁶⁵ Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, Dan Masa Depan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Political Ideology Today* (Yogyakarta, Qalam, 2004), hlm. 159-160

⁶⁶ Roger Eatwell & Anthony Wright, *Ideologi Politik Kontemporer*, diterjemahkan dari buku aslinya *Contemporary Political Ideologies* (Yogyakarta, Jendela, 2004), hlm.69

di mana mereka mengadakan pertemuan di New York tahun 1948. Tujuan gerakan mereka adalah memperjuangkan hak kebebasan berbicara di muka publik, hak milik, dan hak politik bagi perempuan. Puncak perjuangan mereka adalah pada tahun 1920-an, ketika Amademen Konstitusi Amerika Serikat yang ke-19. Amademen ini mengesahkan hak pilih bagi perempuan.

Di sekitar tahun 1960-an, beberapa tokoh feminis, seperti Bella Abzug, Betty Friedan, dan Gloria Steinem,⁶⁷ mendirikan organisasi-organisasi feminis yang berhasil meningkatkan kesadaran gender. Fokus gerakan mereka adalah perjuangan untuk memperoleh kesamaan upah bagi buruh perempuan, akses pekerjaan, dan pendidikan, pengakuan terhadap pekerjaan rumah tangga tanpa upah, serta pengurangan beban ganda perempuan. Kelompok-kelompok feminis ini kemudian bergabung dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan perubahan sistem politik melalui organisasi politik yang mereka bentuk.

Femenisme gelombang ketiga, terdiri dari eksponen yang merupakan keturunan atau eksponen femanisme gelombang pertama dan kedua. Isu yang mereka perjuangkan diantaranya, pengasuhan atau penitipan anak sebagai akibat kesibukan

⁶⁷ Sindung Haryanto, *ibid*, hlm. 100

orang tua meniti karier. Disamping itu, mereka juga memperjuangkan pencapaian posisi yang menentukan dalam perusahaan dan birokrasi pemerintahan, dan kepekaan gender pada tingkat global. Karena mereka masuk di area global, maka gaung feminisme gelombang ketiga ini lebih kencang dibandingkan feminisme gelombang sebelumnya.

Dikalangan sosiolog sendiri, perhatian akademik terhadap isu feminisme mulai mendapatkan tempat sejak tahun 1960-an. Menurut Haryanto, pada sekitar tahun 1960-an, muncul kesadaran di kalangan sosiolog mainstream, bahwa studi-studi tentang gender dan teori feminisme didalamnya. Salah satu yang dilupakan adalah isu bagaimana mengukur kelas social untuk menentukan posisi social perempuan (istri) “yang tidak bekerja”. Haryanto mengutip pendapat Turner, yang menyatakan gender menjadi persoalan dalam sosiologi di Inggris, pada mulanya di bawah payung sosiologi perkawinan dan keluarga.⁶⁸

⁶⁸ Ibid, hlm.101

E. Pierre Felix Bourdieu

Pada awalnya ada pertentangan antara kubu objektivisme versus subjektivisme di kalangan para sosiolog. Kelompok sosiolog yang termasuk pemikir objektivisme adalah Emil Durkheim (positivism), Levi Strauss (strukturalisme), Karl Marx (materialisme historis), dan Max Weber (Calvinisme). Kelompok sosiolog yang termasuk pemikir subjektivisme adalah Alfred Schutz (fenomenology), Blumer (interaksionisme simbolik), dan Granfinkel (etnometodologi). Kelompok objektivisme memandang individu berada dalam bayang-bayang struktur sosial. Sedangkan kelompok subjektivisme memandang perilaku individu bersifat otonom. Pierre Felix Bourdieu hadir dalam mengkritisi dualisme pemikiran di atas.

Di kalangan ilmuan sosial, Pierre Felix Bourdieu dikenal sebagai sosiolog, antropolog, etnolog, sekaligus filsuf. Bourdieu, lahir di Denguin, Prancis tanggal 1 Agustus 1930. Ia berasal dari keluarga kelas menengah-bahawah, dimana ayahnya bekerja sebagai tukang pos. ia berhasil masuk di salah satu perguruan tinggi terkenal di Prancis yaitu Ecole Normale Superieure tahun 1951. Di perguruan tinggi ini Bourdieu

bertemu dengan pemikir-pemikir senior, seperti Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Emanuel Le Roy Ladurie.

Bourdieu remaja yang berasal dari keluarga sederhana, dan tiba-tiba masuk di perguruan tinggi bergengsi di Kota Paris, merasa seperti berada di ruang atau lingkungan borjuis dan intelektual kelas atas. Kondisi ini sempat membuatnya merasa tertekan. Ia sering dilecehkan oleh kelompok borjuis kelas atas, akibatnya ia merasa dendam pada kalangan intelektual Paris. Perasaan tertekan dan dendam ini ia ekspresikan melalui kritiknya pada dunia pendidikan di Prancis. Tahun 1955, ia menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh ijazah filsafat. Selanjutnya Bourdieu pindah ke Aljazair, menjadi asisten dosen pada Fakultas Sastra Universitas Aljiers.

Selama tinggal di Aljazair, didukung oleh profesinya sebagai akademisi, ia banyak mengamati berbagai fenomena di ruang publik. Ia aktif mengamati petani, lingkungan universitas, buruh, majikan, wartawan, dan lain-lain. Pengalamannya di Aljazair dan di Prancis, menjadi bekal luar biasa yang mempengaruhi kariernya sebagai intelektual terkenal hingga seluruh dunia. Karya-karya Bourdieu, selalu berusaha membongkar fenomena dominasi sosial melalui perangkat konseptual. Demikian dinarasikan oleh Ahyar Yusuf

Lubis dalam bukunya yang diberi judul *Postmodernisme Teori dan Metode* tahun 2014.

Pada awal-awal karyanya Bourdieu banyak dipengaruhi oleh strukturalisme, karena dipengaruhi oleh para intelektual Prancis tahun 1940-an hingga 1950-an. Akan tetapi sejak tahun 1960-an Bourdieu mulai meninggalkan strukturalisme, dan beralih ke epistemologi dan metodologi, dari teori-teori sosial seperti Karl Marx tentang kesadaran palsu. Pikiran Marx ini mempengaruhinya dalam menyusun konsep tentang “pengenalan yang keliru”. Selain itu, Bourdieu dipengaruhi oleh sosiologi interpretatif yang diperkenalkan Max Weber, termasuk pemikiran Emile Durkheim

Pada tahun 1960 Bourdieu kembali ke Paris, dan mulai mengawali karirnya di Paris sebagai dosen di Sorbonne. Di perguruan tinggi ini Bourdieu mulai serius dengan kajian-kajian budaya. Tahun 1963 ia menerbitkan bukunya yang membahas budaya kerja petani Aljazair. Pada tahun 1979 Bourdieu menerbitkan bukunya yang berjudul *La Distinction* (Perbedaan), dan karya ini merupakan karya Utama Bourdieu. Buku ini yang kemudian berhasil mengangkatnya sebagai peminan tertinggi Departemen Sosiologi di College de France tahun 1982. Dan sejak itu karya-karya Bourdieu terus

membanjir dan member pengaruh terhadap intelektual hingga di Amerika Serikat. Dan sampai saat ini, karya Bourdieu masih digandrungi dikalangan postmodernisme.

Dalam teorinya tentang habitus, Bourdieu mengakui jika konsep ini banyak dipengaruhi oleh Hegel, Husserl, dan Durkheim. Konsep habitus merupakan upaya untuk mensintesis dualisme antara aktor atau agen atau subjek versus objek atau struktur atau atauran atau model. Dari sini kemudian Bourdieu merumuskan ulang konsep strukturalisme. Menurutnya “struktur itu ibarat sutradara yang menentukan peran dan gerakan aktor (agen). Bagi Bourdieu, agen-agen sosial, baik pada masyarakat tradisional maupun modern bukanlah agen yang bersikap sebagai mesin yang bergerak seperti jam. Pada praktek ritual, atau relasi sosial, individu-individu menjalankan prinsip-prinsip yang terbatinkan dan menjadi habitus.⁶⁹

Di lihat dari sejarahnya, teori habitus lahir dari hasil penelitian Bourdieu terhadap masyarakat Kabyle Aljazair, pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Pada waktu itu Boudiue melihat ada pertarungan simbolis antara beberapa habitus. Di

⁶⁹ Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme Teori dan Metode* (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.112

masyarakat ada pertarungan pengaruh ekonomi perkotaan dan kapitalisme yang menggeser kebiasaan dan spontanitas masyarakat. Boudieu melihat ada hubungan dialektika antara unsur yang datang dari luar dan yang ada di dalam, atau antara habitus yang menguasai dan yang dikuasai. Demikian diceritakan Lubis.⁷⁰ Fenomena ini banyak terjadi di hampir semua masyarakat termasuk di Indonesia. Pada awal pemerintahan Joko Widodo atau dikenal dengan Jokowi, ada kebijakan pemerintah untuk melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada semua lembaga negara termasuk pemerintah daerah untuk mengadakan rapat di hotel. Dengan asumsi menghemat keuangan negara, pemerintah Jokowi memerintahkan untuk rapat-rapat kerja pemerintah diselenggarakan di kantor, kecuali apabila kantor tidak memiliki fasilitas yang memadai.

Habitus yang berlaku di birokrasi Indonesia, memperlihatkan bahwa aktivitas rapat sudah dipandang sebagai bagian dari kerja yang orientasinya adalah material. Ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan penyelenggaraan rapat di hotel. Misalnya saja, panitia dapat melakukan kerjasama terselubung dengan pihak hotel untuk

⁷⁰ Ibid, hlm.114

mendapatkan keuntungan. Perilaku yang demikian dipandang sebagai tradisi yang sudah berjalan sejak lama. Dan perilaku “mencari keuntungan material” dibalik kegiatan tersebut, bukan dipandang sebagai hal yang tabu, bahkan telah menjadi habitus dikalangan birokrat dan pengusaha. Ketika ada kebijakan baru yang “mengganggu” habitus birokrat, muncul dialektika terhadap kebijakan tersebut. Banyak pemerintah daerah yang mengajukan keberatan, dan akhirnya pemerintah memberi kelonggaran. Dan nampaknya pemerintah Jokowi belum berhasil membangun habitus “hidup hemat” dikalangan birokrasi Indonesia.

Untuk mempertegas pandangan teorinya, Bourdieu mengatakan “tindakan individual tidak dapat dilepaskan dari struktur atau kolektif/sosial”. Maka sintesis dan dialektika antara struktur objektif dan fenomena subjektif inilah yang di sebut sebagai habitus. Menjawab bagaimana hubungan dialektika antara struktur (dimensi objektif) dan keagenan (agen) atau dimensi subjektif terlihat melalui praktek. Oleh Bourdieu, penjelasan terhadap fenomena ini di sebut sebagai konsep “konstruktivisme strukturalis” atau “strukturalisme genetik”.

Lantas apa sebenarnya pemaknaan habitus ?. Kata Bourdieu, habitus adalah konsep yang menjelaskan pembatiran nilai-nilai sosial-budaya dan rasa permainan (*feel for the game*) yang melahirkan berbagai macam bentuk gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. Setiap nilai dan aturan yang telah dibatirkan akan membuat seseorang bertindak sesuai nilai aturan itu. Dalam mengendarai kendaraan, misalnya setiap pengendara akan berhenti apabila lampu merah menyala. Dan tindakan yang dianggap rasional adalah apabila orang berhenti ketika lampu merah menyala (sesuai dengan nilai dan aturan). Baik pengendara, Polisi, maupun pengamat (di luar pengendara dan Polisi) akan menggunakan aturan itu sebagai indikator rasionalitas.

F. Erving Goffman

Sepanjang sejarah sosiologi klasik, perilaku individu dilihat sebagai respons terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Manusia dipandang sebagai bentukan lingkungan dan akan melakukan tindakan sesuai “cetakan lingkungan”. Ibarat orang membuat batu-bata, lingkungan merupakan cetakan dari manusia. Maka penampilan manusia, merupakan terjemahan dari lingkungan. Pandangan ini

misalnya mendapat pengaruh besar dari teori fungsional struktural.

Pengaruh pemikiran fungsional struktural tidak mudah hilang. Erving Goffman sebagai teoritis sosiologi yang masuk di abad modern pun termasuk yang pikirannya banyak dipengaruhi oleh postulat-postulat di atas. Dalam bukunya yang tersohor *The Presentation of Self in Everyday Life*, tahun 1959. Teori Goffman yang sampai saat ini di kenal dengan teori dramaturgi, menganggap individu (bukan struktur yang lebih besar) sebagai satuan analisis. Dalam bukunya Poloma, penulis menemukan pernyataan Goffman, sebagai berikut;

“..dalam situasi sosial, seluruh kegiatan dari partisipan tertentu disebut sebagai suatu penampilan (*performance*), sedang orang-orang lain yang terlibat di dalam situasi itu di sebut sebagai pengamat atau partisipan lainnya. Para aktor adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan atau penampilan rutin (*routine*)”.⁷¹

Dalam menjelaskan postulat teorinya, Goffman menggunakan analogi pertunjukan drama di atas panggung. Kata Goffman, setiap individu pada dasarnya selalu

⁷¹ Margaret M. Poloma, *ibid*, , hlm.232. Goffman menggunakan konsep “routine” sebagai pola tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya, terungkap di saat melakukan pertunjukan dan yang juga bisa dilakukan atau diungkapkan dalam kesempatan lain.

menyajikan pertunjukan (*show*) bagi orang lain. Dan, orang lain dipandang sebagai pengamat (penonton) yang akan menerima kesan atas pertunjukan si aktor. Goffman membedakan dua jenis panggung, yakni panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan adalah bagian penampilan individu yang secara teratur berfungsi di dalam mode yang umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu. Di atas panggung itu ada penampilan dan gaya. Penampilan akan berfungsi untuk memberitahukan kepada halayak akan status sosial si aktor. Sedangkan gaya berfungsi untuk mengingatkan halayak akan peranan interaksi yang diharapkan aktor untuk dimainkan pada situasi mendatang.

Setiap aktor, pada dasarnya ingin mendapatkan kesan yang terbaik dari halayak. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka setiap aktor akan menampilkan sosok dirinya sebagai yang paling ideal seperti harapan halayak. Dan si aktor akan berusaha menyembunyikan semua hal negatif (yang kurang baik) pada dirinya. Walaupun seseorang memiliki *routine*, tetapi dia akan menyembunyikan hal tersebut, dan *routine* yang ditampilkan saat ini yang terpenting.

Apabila pikiran-pikiran Goffman di atas digunakan untuk melihat fenomena kepolitikan, maka pertama-tama perlu diidentifikasi yang dimaksud dengan aktor adalah politisi dan pengamat adalah masyarakat pemilih. Dalam kehidupan di atas panggung politik, politisi biasanya akan selalu *show* sesuai harapan pemilih. Karakteristik sistem social suatu wilayah turut menentukan bagaimana *show* para politisi. Di panggung depan (ruang publik), politisi akan berusaha *show* yang paling ideal. Sebagai misal, di wilayah-wilayah yang masyarakatnya mayoritas muslim, maka begitu memasuki bulan Ramadhan, maka akan menjamur kontestasi baliho dengan symbol-simbol agama. Politisi menampilkan foto dan ucapan “selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan” di sepanjang jalan, melalui baliho maupun spanduk. Demikian halnya dengan aspek *routine*, biasanya politisi tiba-tiba menjadi rajin mengunjungi masjid-masjid untuk member bantuan social dan ceramah keagamaan. Semua *show* di ruang public bisa jadi berbeda dengan *routine* politisi tersebut yang sebenarnya, tetapi mereka ingin meyakinkan masyarakat pemilih bahwa *routine* sekarang adalah yang sebenarnya.

Bab 8

PMEKIRAN POLITIK ISLAM

A. Mazhab Islam Tentang Politik

Membincangkan pandangan Islam tentang politik, idealnya merujuk pada teks-teks Al-Quran karena didalamnya terkandung sejumlah prinsip politik, seperti konsep tentang keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak dan kewajiban, *amar ma`ruf dan nahi munkar*, kejujuran dan penegakan hukum. Demikian diingatkan oleh Ayi Sofyan dalam bukunya Etika Politik Islam.⁷² Selain Al-Quran, rujukan perbincangan politik dalam Islam tutur Sofyan adalah praktek politik Nabi Muhammad SAW. Dua sumber normatif ini menjadi pondasi atau pandangan sekaligus falsafah politik dalam Islam.

⁷²Ayi Sofyan, Drs.,M.Si, Etika Politik Islam (Bandung, CV.Pustaka Setia, 2012), hlm.15

Sejarah politik Islam merupakan sejarah dakwah, semangatnya menabur penyebran *amar ma`ruf nahi munkar* (menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran). Berpijak dari sini, kita bisa melihat praktik politik pemerintahan Nabi Muhammad SAW merepresentasikan sebuah upaya penegakan kebajikan di muka bumi. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah kepemimpinan moral yang sangat peduli pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Nabi Muhammad SAW juga tercatat dalam sejarah sebagai pemeritahan yang sangat mengedepankan toleransi. Tengoklah misalnya *Piagam Madinah*, yang pada pokoknya menjelaskan penghormatan pada pemeluk agama yang berbeda, hidup bertetangga secara damai, kerja sama dalam keamanan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang teraniaya.⁷³ Dokumen *Piagam Madinah* sangat kontekstual untuk dijadikan referensi politik hingga saat ini. Dengan demikian menurut penulis, perdebatan terhadap keterlibatan Islam dalam politik, serta bagaimana seharusnya Islam melihat politik di Indonesia sesungguhnya sudah tuntas. Islam merupakan agama yang sangat toleran dan pandai hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok lain. Maka

⁷³Ibid, hlm.16

berkembangnya kelompok-kelompok radikalisme yang mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara boleh dikatakan merupakan gerakan yang sebaiknya dihentikan karena tidak sejalan dengan identitas dan sikap politik Islam yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Mari kita melihat sejarah peran Islam dalam politik Indonesia. Sesungguhnya peran Islam dalam politik Indonesia telah terlihat semenjak masa perjuangan mengusir kolonial. Menurut Imam Suprayogo, keterlibatan Islam melalui peran kyai di masa perjuangan tidak hanya terlibat secara fisik melalui peperangan, tetapi juga dalam bentuk diplomasi. Dan keterlibatan kyai ini berlangsung baik menjelang maupun setelah proklamasi kemerdekaan.⁷⁴ Secara fisik misalnya kyai yang terlibat dalam perjuangan salah satunya Pangeran Diponegoro. Demikian halnya di awal kemerdekaan, para kyai merintis dan mengembangkan banyak organisasi politik Islam. Suprayogo membuat identifikasi kyai yang terlibat membentuk organisasi sosial yang memberi pengaruh besar dalam bidang politik. Misalnya ada nama KH.Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama, kemudian KH.Ahmad Dahlan membentuk

⁷⁴ Imam Suprayogo, Prof.Dr.,H., *Kyai Dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai* (Malang, UIN-Malang Press, 2009), hlm.2

Muhammadiyah. Beberapa partai politik Islam juga sempat muncul di awal kemerdekaan, misalnya Masyumi, dan PSII.⁷⁵

Meskipun peran elit politik Islam seperti Kyai di Madura, Buya di Sumatra, dan Tuan Guru di Lombok, namun perdebatan tentang posisi Islam di politik hingga saat ini masih berlangsung. Isu yang banyak diperdebatkan dikalangan Islam Indonesia adalah tentang ideologi Pancasila. Dalam sejarah politik Indonesia seharusnya perdebatan tentang Ideologi bangsa sudah tuntas dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam merumuskan dasar negara, dimana mereka tergabung dalam Badan Panitia Persiapan untuk Penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah sepakat dengan Pancasila yang termaktub dalam mukadimah UUD 1945. Dan mereka sepakat dengan tanpa menyebutkan kalimat “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

Kesepakatan para pendiri bangsa di atas, rupanya belum utuh dilaksanakan dalam praktek bernegara kita. Beberapa bulan terakhir ini, perdebatan tentang ideologi Pancasila semakin menguat seiring dengan bergulirnya gerakan-gerakan Islam radikal yang berusaha menolak Pancasila. Beberapa di

⁷⁵ Ibid, hlm.3

antara mereka bahkan bergerak lebih jauh yaitu ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa atau sekurang-kurangnya mereka menolak Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Tingginya gerakan ini menyebabkan pemerintah mengalami kepanikan. Untuk mencegah gerakan-gerakan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Sejak ditetapkannya Perpu tersebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan oleh pemerintah karena dipandang tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam perdebatan akademik, Zuly Qodir mencoba mengelompokkan tiga mazhab Islam tentang politik, yakni; formalisme Islam, substansialisme Islam, dan sekularisme Islam.⁷⁶ Ketiga mazhab ini mengalami perdebatan yang tiada henti hingga saat ini. Perdebatan ketiga mazhab ini seputar keberadaan Pancasila sebagai ideologi, yang menurut hemat penulis semsetinya perdebatan ini sudah tuntas setelah Indonesia sebagai bangsa majemuk mengambil konsensus menggunakan Pancasila sebagai ideologi bernegara, karena

⁷⁶ Zuly, Qodir, DR., 2012, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, 2012): hlm.9-59

Pancasila sesungguhnya telah mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Persoalan bagaimana memahami Tuhan, maka tentu saja diserahkan kepada masing-masing agama. Berikut penjelasan Qodir tentang pandangan tiga mazhab Islaam di atas.

1. Formalisme Islam

Pandangan ini pada dasarnya menghendaki adanya dasar Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut mazhab ini, Pancasila itu buatan manusia yang masih bisa di buat perubahan kapan saja. Sementara Islam di Indonesia adalah agama mayoritas dan menghuni seluruh wilayah nusantara. Maka sudah seharusnya Indonesia memiliki dasar negara Islam bukan yang lain. Bagi mazhab ini, Pancasila itu masih sekuler dan tidak memiliki kejelasan tentang ajaran kebenaran mutlak dari Tuhan. Berbeda dengan Islam, kata mazhab ini Islam adalah ciptaan Tuhan yang tidak mungkin salah. Pada tataran yang lebih ekstrim, bahkan mazhab ini mengatakan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara adalah perilaku kesyirikan dan kekafiran. Perilaku mempertahankan Pancasila kemudian dihubungkan dengan kemakmuran. Menurutny, jika Pancasila di rubah dengan

Syariat Islam, maka akan turun berkah Tuhan dan segera turun kemakmuran, yang disebut dengan prinsip *baldatun tayibatun warabun ghafur*.⁷⁷

Tokoh Islam Indonesia yang di tulis oleh Qodir salah seorang yang memperbincangkan mazhab ini adalah Muhammad Nasir. Menurut Nasir, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan; *ladiniyah* dan *diniyah*. Pancasila adalah *ladiniyah*, oleh karena itu Pancasila menjadi sekuler, tidak bersedia mengakui wahyu sebagai sumbernya. Jika dasar negara diasumsikan harus digali dari akar masyarakat, maka disini Nasir mengatakan Islam sebagai agama memiliki akar yang kuat dalam masyarakat Indonesia, karena di anut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Maka tidaklah salah apabila dasar negara Indonesia adalah Syariat Islam, bukan Pancasila.

2. Substansialisme Islam

Mazhab ini lebih toleran terhadap perbedaan atau lebih menerima pularisme. Mazhab ini beranggapan bahwa negara tidak perlu secara resmi menjadi negara agama, seperti hanya Indonesia tidak perlu menjadi negara Islam. Yang lebih penting dari sekedar bentuk menurut mazhab ini adalah pada etika

⁷⁷*Ibid*, hlm.10

agama (Islam) dalam memberikan sumbangan pada peran-peran kenegaraan. Bagi mazhab ini, Islam itu pada dasarnya satu tetapi memiliki warna yang beragam.

Dalam mengupas pandangan substansialisme Islam ini, Qodir merujuk pada pikiran salah seorang cendikiawan asal Pakistan yang merupakan profesor Islamic studies di Chicago University, yaitu Fazlur Rahman. Menurutnya, apabila merujuk pada al-Quran, maka di dalam Islam ada dua wilayah, yaitu ada wilayah yang *non-ijtihadiyah* atau yang dapat di rombak, dan ada wilayah yang dapat di rombak. Yang *ijtihadiyah* ini jumlahnya tidak kurang dari 20 % dari seluruh isi kitab suci al-Quran, sedangkan yang 75 % membutuhkan ijtihad karena al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang bersifat mujmal.⁷⁸

Dari pemikiran ini kemudian berkembang pandangan untuk meletakkan Islam dalam posisi yang substansial. Yang lebih diutamakan adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu diejawantahkan dalam kehidupan politik, bukan terjebak pada formalisme sebagaimana mazhab pertama. Kata lainnya mazhab substansial memberikan kritik pada mazhab formalism sebagai mazhab yang hanya melihat tampilan luar, bukan

⁷⁸*Ibid*, hlm.22

mempersoalkan isi dalamnya. Ibarat rumah, formalism hanya melihat tampilan luar rumah, catnya seperti apa, hiasan di halaman bagaimana. Sementara bagi mazhab substansial tidak penting luar rumah itu seperti apa, yang lebih penting adalah bagaimana penghuni didalam rumah itu melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam al-Quran dan al-Hadist. Maka tidak penting Indonesia ini menggunakan Pancasila atau symbol lain, yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan bernegara, seperti misalnya membangun pemerintahan yang bersih, toleransi, humanis atau responsive, menjunjung tinggi asas keadilan.

Kelompok mazhab substansial mencoba membuat evaluasi terhadap kekalahan-kekalahan politik Islam, seperti kekalahan dalam pemilu, birokrasi dan fisik. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali sebuah Islam Indonesia yang mampu mengobati kekecewaan-kekecewaan umat Islam dalam sejarah. Caranya adalah dibutuhkan metode politik Islam yang lebih simpatik dan apresiatif, sehingga dunia modern bisa dihadirkan dalam Islam Indonesia. Apabila Islam Indonesia tampil dengan lebih komunikatif, humanis, aspiratif, dan santun, maka tidak ada alasan bagi rezim yang berkuasa untuk menekan apalagi melarang kegiatan-kegiatan kelompok Islam. Demikian

sebaliknya ketika kelompok Islam tampil dengan mengedepankan kekerasan fisik, memaksakan kehendak dengan mengganggu kebebasan orang lain, menimbulkan keresahan sosial, apalagi menentang ideologi negara, maka menjadi alasan negara untuk hadir hingga membuat keputusan-keputusan yang bersifat memaksa, seperti melakukan pembubaran terhadap organisasi yang dipandang radikal.

Menurut Qodir, gagasan mazhab substansial diatas setidaknya terbangun melalui empat argumentasi. *Pertama*, tidak ada bukti yang tegas bahwa al-Quran dan sunnah mewajibkan kaum muslim untuk mendirikan negara Islam. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah memproklamasikan negara Islam. Ketika penandatanganan piagam madinah misalnya, piagam madinah bukan penegasan terbentuknya negara Islam. Qodir memahami piagam madinah merupakan kesepakatan masyarakat Arab untuk bermasyarakat dalam keberagaman etnis-suku. *Kedua*, kelompok substansial mengakui bahwa Islam memberikan seperangkat prinsip-prinsip social-politik. Islam memberikan prinsip-prinsip negara, seperti; keadilan (*justice*), kejujuran (*honesty*), terbuka (*transparency*), tanggung jawab (*responsible*), musyawarah (*agreement*).*Ketiga*, karena Islam dipandang sebagai agama

yang kekal, maka pemahaman kaum muslim terhadap Islam tidak boleh dibatasi hanya kepada pengertian formal dan legalnya. Islam, harus dibangun di atas dasar pemahaman yang menyeluruh. Petunjuk tekstual dan doktrin Islam harus mampu menjawab situasi kontemporer. *Keempat*, kelompok substansial meyakini bahwa Allah mengetahui kebenaran mutlak. Maka tidak boleh ada seorang muslim yang mengklaim pemahamannya tentang Islam adalah yang paling benar dan paling otoritatif. Disinilah kemudian sikap toleransi beragama diperlukan, baik secara internal maupun eksternal.

3. Sekularisme Islam

Mazhab ini secara tegas memisahkan antara urusan Islam dengan urusan negara. Islam mengurus soal ibadah kepada Tuhan. Sedangkan negara memiliki urusan tentang soal dunia, seperti kemiskinan, keamanan, pendidikan, kesehatan. Negara tidak ikut-ikutan mengurus soal ibadah atau keimanan masyarakat. Agar tidak terjadi distorsi, maka urusan kedua institusi ini harus ditangani sendiri-sendiri. Maka mazhab ini memberikan solusi, agar dipisahkan mana urusan agama (Islam) dan mana urusan negara. Oleh karena pandangannya yang terlalu ekstrim, maka paham ini sering diidentikan dengan

paham yang “tidak bertuhan” atau meninggalkan agama. Oleh karena paham ini tidak lazim, maka mazhab ini seringkali dipandang sebagai paham yang tidak islami. Bahkan dalam catatan Qodir, tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menempatkan paham sekulerisme Islam dalam posisi haram.⁷⁹

Demikian pandangan tiga mazhab Islam dalam perdebatan tentang politik. Penulis tidak mengambil posisi tentang mazhab mana yang paling ideal, namun penulis bermaksud memberikan perspektif untuk membaca fenomena kepolitikan Indonesia dalam sejarah politik hingga saat ini. Tentu saja pemahaman terhadap perdebatan tiga mazhab ini masih terus diperlukan guna menemukan pemahaman yang lebih komprehensif, dan boleh jadi akan ditemukan mazhab-mazhab yang lain.

B. Teori Kelompok Politik: Ibn Qutaibah

Secara akademik, pada masa-masa awal pemikiran Islam menganggap perbedaan manusia tidak ada hubungannya dengan nilai moral individu dan kemuliaan di akhirat. Meskipun demikian, secara syaria`ah Al-Quran sesungguhnya

⁷⁹ Ibid, hlm. 51

mengakui adanya tingkatan manusia itu. Dapat diperiksa kembali misalnya (Q.S.43:32), menyebutkan “bahwa Allah telah mengangkat derajat sebagian kalian atas sebagian lainnya sehingga dapat saling membantu”.

Para ahli sosiologi Islam klasik kemudian mencoba membuat analisa sosiologis dengan membagi empat kelompok manusia, yakni; (1) raja; (2) wazir; (3) kelas kaya; (4) kelas menengah. Diluar empat kelompok ini ada kelas bawah yang hanya memikirkan makanan dan tidur. Kata Suntana, ada juga sosiolog Islam yang membagi kelompok sosial menjadi empat, yaitu; (1) kelas bangsawan dan pangeran; (2) teolog dan ilmuwan (ulama); (3) tabib, sastrawan, dan para ahli perbintangan; (4) petani dan perajin.

Lebih lanjut Ija Suntana menceritakan bahwa analisa kelompok sosial di atas pernah ditulis oleh Al-Firdausi dalam bukunya At-Taj. Al-Firdausi menyatakan bahwa stabilitas masyarakat dan pemerintah bergantung pada perbedaan kelompok masyarakat yang terus dipelihara agar setiap orang tetap memainkan perannya masing-masing. Pandangan ini hampir sama dengan pemikir-pemikir sosiologi konvensional seperti pemikiran Emile Durkheim tentang teori fungsional struktural. Bagi Durkheim, semua struktur sosial adalah

fungsional, bahkan ia mengatakan kemiskinan juga fungsional. Persoalannya adalah fungsional bagi siapa? Tentu saja bagi kelompok kemiskinan tersebut jawabannya tidak. Tetapi bagi kelompok menengah dan atas, kemiskinan fungsional bagi penyediaan tenaga kerja. Kata Durkheim hampir sama dengan kata Al-Firdausi bahwa agar sistem sosial dapat berfungsi, maka setiap komponen harus dipelihara agar setiap orang dapat memainkan perannya masing-masing.

Qutaibah membuat pengelompokan masyarakat menjadi empat, yakni; (1) kaum terpelajar pengusung agama atau ulama; (2) tentara yang menjadi penjaga tahta; (3) para penulis atau pengarang yang menjadi penghias kerajaan; (4) para petani yang memakmurkan tanah. Bagi Qutaibah, masing-masing kelompok tersebut memiliki kontribusi atau dalam bahasa Durkheim fungsional satu dengan yang lain. Bahkan Qutaibah menegaskan keberpihakannya pada fungsionalitas kelompok tersebut dengan membuat pernyataan, *“hendaklah Anda bersikap baik kepada para petani. Anda akan sejahtera, selama mereka sejahtera”*. Pernyataan ini sesungguhnya ingin mengatakan bahwa kelompok petani sebagai kelompok yang dipandang paling rendah sekalipun memiliki fungsi bagi tiga kelompok. Maka menjadi sangat keliru, misalnya tatkala

pemerintah hanya membuat kebijakan yang berpihak pada kelas menengah ke atas, seperti birokrat, tentara, akademisi, politisi dan pemodal, sementara kehidupan para petani tidak mendapat tempat dalam perhitungan kebijakan publik yang dibuat para penguasa pemerintah.

Bahkan Ibn Qutaibah menyusun pernyataan patrimonialisme agraris dengan mengatakan *“tidak ada kekuasaan kecuali oleh rakyat, dan rakyat hanya akan bertahan dengan kekayaan. Tidak ada kekayaan kecuali pertanian. Tidak ada pertanian tanpa pemerintahan yang baik dan adil”*. Pernyataan ini kemudian dikenal dengan konsep lingkaran kekuasaan. Bagi Qutaibah, pemerintah merupakan bagian penting dari tatanan sosial. Ia mengatakan *“jangan tinggal di wilayah yang tidak memiliki lima hal, yakni; penguasa yang kuat, hakim yang adil, pasar yang stabil, ahli medis yang cakap, dan sungai yang mengalir”*. Bagi penulis, konsepsi Qutaibah di atas merupakan tipe ideal sebuah kondisi negara sejahtera.

C. Teori Fungsi Sosial Dan Masyarakat Politik: Ibn Sina

Ibn Sina, merupakan pemikir Islam yang jenius. Pikiran-pikirannya banyak berpengaruh pada bidang filsafat dan

kedokteran pada abad ke-17. Ia pernah menjadi penasihat penguasa Samaniyah, sehingga dikenal sebagai filsuf yang memiliki pengalaman politik praksis. Bukunya yang paling populer adalah *Asy-Syafa An_Nafs* di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Teori ilmu sosial Ibn Sina di bangun di atas tesis yang menyatakan “*sudah menjadi sifat dasar manusia untuk hidup saling bergantung dan saling melengkapi. Maka merupakan suatu keiscayaan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari orang lain, bahkan makhluk lain, dan begitu juga sebaliknya*”.⁸⁰ Pernyataan Ibn Sina di atas bagi penulis sebagai ungkapan betapa Ibn Sina menyadari betul sifat dasar manusia sebagai makhluk social. Maka tidak ada satupun manusia yang bias hidup sendiri meskipun ia adalah seorang kaya raya.

Terhadap hukum dan pemerintahan, Ibn Sina mengatakan, “*manusia hanya akan mematuhi hukum apabila penyusunnya lebih unggul dari manusia pada umumnya*”. Maka untuk menjamin ketaatan masyarakat terhadap hukum, harus dinyatakan bahwa hukum tersebut sakral dan didapatkan dari kekuatan Yang Mahaagung. Hukum yang diatasnamakan agama harus ada. Tetapi yang dibutuhkan disini adalah ajaran

⁸⁰Ibid, hlm.25

agama yang sederhana, sebab ajaran yang terlalu rumit akan membuat manusia masuk ke dalam pertikaian dan perselisihan yang menghalangi munculnya keadilan.

Terhadap fungsi dasar pemerintah, Ibn Sina memaparkan tentang dua fungsi paling pokok, yakni; sebagai pengatur dan distributor kekayaan dari kelompok produktif (petani, perajin, dan pedagang). Dalam bahasan politik modern, fungsi pemerintah sebagai pengatur dimanipestasikan oleh kewenangan pemerintah membuat undang-undang. Dalam fungsi ini terlihat peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Disini pemerintah memiliki fungsi politik atau fungsi mengatur dan mengalokasikan seluruh sumber daya negara (keuangan, alam, dan manusia). Sedangkan fungsi pemerintah sebagai distributor dapat dimanipestasikan oleh kewenangan pemerintah menarik pajak dan fungsi-fungsi bulog. Pada fungsi ini, pemerintah melakukan dua peran yakni retributor atau menarik pajak dan restributor atau mendistribusikan hasil pajak kepada masyarakat. Fungsi-fungsi ini sering disebut sebagai fungsi pelayanan publik. Adapun fungsi lain dari pemerintah yang berbentuk pelayanan publik adalah fungsi keamanan, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena kesemua fungsi yang disebutkan di atas merupakan fungsi dasar, maka seharusnya

pemerintah tidak boleh menarik biaya atas pelaksanaan fungsi tersebut, dan harus bersifat inklusif atau diberikan kepada seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

D. Teori Perubahan Sosial: Ibn Khaldun

Nama lengkap Ibn Khaldun adalah Abdurrahman bin Khaldun, lahir di Tunisia tahun 1332 dan wafat tahun 1406. Pada saat masuk usia 17 tahun atau masa remaja, orang tuanya meninggal dunia, sehingga kehidupannya dalam perjuangan keras. Meskipun orang tuanya sudah meninggal, Khaldun tetap mendapatkan pendidikan yang cukup.

Pemikiran-pemikiran Khaldun memang sering “nyeleneh”, boleh jadi sebagai sifat bawaan dari kecerdasannya. Ketika orang lain sibuk memikirkan sejarah menurut kehendak Tuhan, Khaldun justru membuat identifikasi mengenai faktor-faktor penyebab dalam proses sejarah. Dan semua pikirannya tersebut di tulis dalam bukunya berjudul *Muqaddimah*. Ada dua gagasan Khaldun sebagai inti perbincangan dalam bukunya tersebut, yaitu tentang asosiasi manusia dan peradaban. Peradaban merupakan sebuah keniscayaan, karena pada dasarnya manusia adalah mahluk politik. Maka manusia tidak dapat bertahan tanpa organisasi sosial.

Dalam hal pemikiran sosiologi, Ibn Khaldun memperkenalkan enam prinsip sebagai landasan berpikir sosiologis, sebagai berikut;⁸¹

1. Fenomena sosial mengikuti pola-pola yang sah menurut hukum. Pola tersebut tidak selalu pola yang berlaku dalam alam fisik. Akan tetapi, ia menunjukkan keteraturan yang cukup untuk dapat dikenali dan dilukiskan;
2. Hukum-hukum perubahan berlaku pada tingkat kehidupan masyarakat (bukan pada tingkat individual). Karena itu, individu tidak bisa menghindar dari hambatan yang menimpa perilakunya dari hukum masyarakat;
3. Hukum-hukum proses sosial harus ditemukan melalui pengumpulan banyak data dan dengan mengamati hubungan antara berbagai variabel. Catatan-catatan kecil di masa lalu dan pengamatan di masa sekarang, dapat menjadi data untuk melihat perubahan di masa datang;
4. Hukum-hukum sosial yang serupa, berlaku alam berbagai masyarakat yang serupa strukturnya;

⁸¹Ibid, hlm.34

5. Masyarakat ditandai dengan perubahan. Hanya saja tingkat perubahan antara masyarakat yang satu dengan yang lain mungkin sangat berbeda;
6. Hukum-hukum yang berlaku terhadap perubahan itu bersifat sosiologis, bukan bersifat biologis atau bersifat alamiah. Meskipun demikian, Khaldun juga mengakui adanya pengaruh lingkungan fisik terhadap perilaku manusia, misalnya Khaldun mengamati pengaruh iklim terhadap penduduk di kawasan tropis. Kata khaldun, udara panas menimbulkan kegembiraan. Sedangkan daya dorong sejarah, kata Kahldun harus dipahami menurut fenomena social, seperti; solidaritas, kepemimpinan, mata pencaharian, dan kemakmuran.

Demikialah tiga tokoh Islam klasik telah memberikan sumbangan pemikirannya terhadap ilmu-ilmu sosial. Sudah barang tentu masih banyak pemikir lainnya yang dapat dikembangkan sendiri oleh pembaca. Setidaknya pemaparan di atas menjadi pemicu bagi pembaca untuk terus memeriksa kembali pikiran-pikiran ilmuwan sosial dari kalangan muslim.

E. Ringkasan

Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang menyediakan perspektif. Dalam mempelajari objek kajiannya, sosiologi menyediakan banyak perspektif. Oleh karena itu, sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan berparadigma ganda. Paradigma sebagaimana diperkenalkan oleh Thomas Kuhn, dan dipopulerkan oleh Robert Friedrich, dipahami sebagai pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Bab ini membagi dua kelompok pemikir sosial, yakni pemikir-pemikir konvensional dan pemikir-pemikir Islam.

Di antara pemikir-pemikir konvensional adalah; Karl Marx, John T. Ishiyana dan Marjike Breuning, Emile Durkheim, Josephine Donovan, Pierre Felix Bourdieu, dan Erving Goffman. Marx dan Durkheim merupakan pemikir-pemikir klasik, dan yang lainnya merupakan pemikir-pemikir kontemporer. Sedangkan pemikir-pemikir Islam adalah Ibn Qutaibah, Ibn Sina, dan Ibn Khaldun.

Beberapa pemikiran Marx yang cukup terkenal adalah materialism historis, alienasi, perubahan sosial dan pandangannya tentang agama. Yang disebutkan terakhirnya merupakan pikiran Marx yang paling kontroversial. Dalam

melihat dialektika agama dan kelas social, Marx mengatakan “agama menjadi alat untuk menindas dan memanipulasi kelas subordinat”. Menurut tafsir penulis, Marx tidak sedang menyalahkan agama, tetapi Marx mengekspresikan kekecewaannya terhadap borjuis yang memanfaatkan doktrin agama untuk menindas proletariat.

John T.Ishiyana dan Marjike Breuning, menawarkan tiga cara dalam melihat perilaku manusia, yakni; individualisme, holisme, sistemisme. Yang pertama menempatkan manusia sebagai makhluk otonom yang berusaha mencapai kepentingan dan kebahagiaan sendiri. Dan karena itu, keduanya menjadi tujuan moral manusia. Pemerintah tidak perlu intervensi dalam usaha manusia mencapai tujuannya. Pandangan ini menuai kritik dari holisme. Justru holism menyarankan pentingnya peran institusi politik dan pemerintah bagi kebaikan bersama yang lebih besar. Baik individualisme maupun holisme mendapat kritikan tajam dari sistemisme. Sebagai solusi sistemisme merumuskan lima postulat; (1) segala sesuatu, apakah kongkrit atau abstrak adalah suatu sistem atau suatu komponen aktual atau potensial dari suatu sistem; (2) sistem memiliki cirri-ciri sistemtis; (3) semua masalah seharusnya didekati secara sistem ketimbang secara sektoral; (4) semua

gagasan seharusnya ditempatkan bersama dalam sistem; (5) pengujian sesuatu, apakah gagasan atau artefak, mengasumsikan validitas hal-hal lain, yang di anggap sebagai patokan atau sekurang-kurangnya untuk sementara.

Emile Durkheim memberikan pandangan yang hamper sama dengan sistemisme. Bagi Durkheim, setiap struktur dalam masyarakat adalah fungsional terhadap struktur yang lain. Persoalannya adalah, fungsional bagi siapa ?. kemiskinan, tentu saja disfungsional bagi kelompok miskin itu sendiri, tetapi fungsional terhadap kelas menengah ke atas. Kemiskinan menyediakan tenaga kerja bagi kerja-kerja kasaran, seperti tenaga kebersihan kota atau pembantu rumah tangga.

Bourdieu, memperkenalkan konsep habitus untuk menjelaskan pembatinaan nilai-nilai sosial budaya yang mengkonstruksi perilaku manusia. Postulat yang dibangun adalah setiap nilai dan aturan yang telah ditentukan akan membuat manusia bertindak sesuai nilai dan aturan itu. Meperbutkan sisa makanan seorang ulama dalam suatu acara masyarakat, merupakan habitus pada jaman dulu. Dan boleh jadi perilaku tersebut telah punah seiring dengan munculnya habitus baru.

Ibn Qutaibah Qutaibah dalam teori kelompok sosialnya membuat pengelompokan masyarakat menjadi empat, yakni; (1) kaum terpelajar pengusung agama atau ulama; (2) tentara yang menjadi penjaga tahta; (3) para penulis atau pengarang yang menjadi penghias kerajaan; (4) para petani yang memakmurkan tanah. Bagi Qutaibah, masing-masing kelompok tersebut memiliki kontribusi. Sedangkan dalam melihat tatanan pemerintahan ideal, Qutaibah menyatakan ada lima kondisi untuk menyebut pemerintahan yang ideal, yakni; penguasa yang kuat, hakim yang adil, pasar yang stabil, ahli medis yang cakap, dan sungai yang mengalir.

Ibn Sina membangun teori sosialnya di atas tesis yang menyatakan “*sudah menjadi sifat dasar manusia untuk hidup saling bergantung dan saling melengkapi. Maka merupakan suatu keiscayaan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari orang lain, bahkan makhluk lain, dan begitu juga sebaliknya*”. Terhadap hukum dan pemerintahan, Ibn Sina mengatakan, *manusia hanya akan mematuhi hukum apabila penyusunnya lebih unggul dari manusia pada umumnya*. Dengan demikian, di benak Ibn Sina, hukum harus dibuat oleh orang-orang yang lebih unggul dibandingkan masyarakat biasa. Adapun soal fungsi pemerintah, Ibn Sina menyebutkan hanya

ada dua fungsi dasar pemerintah, yaitu sebagai pengatur dan sebagai distribusi.

Adapun Ibn Khaldun memaparkan dua gagasan penting dalam bukunya berjudul *Muqaddimah*, yaitu tentang asosiasi manusia dan peradaban. Tetapi yang paling besar pengaruhnya dalam studi sosiologi adalah pemikiran Khaldun enam prinsip sebagai landasan berpikir sosiologis, yaitu; (1) fenomena sosial mengikuti pola-pola yang sah menurut hukum; (2) hukum-hukum perubahan berlaku pada tingkat kehidupan masyarakat (bukan pada tingkat individual); (3) hukum-hukum proses sosial harus ditemukan melalui pengumpulan banyak data dan dengan mengamati hubungan antara berbagai variable; (4) hukum-hukum sosial yang serupa, berlaku alam berbagai masyarakat yang serupa strukturnya; (5) masyarakat ditandai dengan perubahan; (6) hukum-hukum yang berlaku terhadap perubahan itu bersifat sosiologis, bukan bersifat biologis atau bersifat alamiah.

Bab 9

PARTAI POLITIK ISLAM

Partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi, selain media massa dan *civil society*. Oleh karena itu, setiap negara penganut demokrasi, sudah dapat dipastikan menggunakan partai politik sebagai kendaraan menjalankan kehidupan politiknya.

Bab ini dimaksudkan untuk membahas secara khusus mengenai partai politik Islam. Alasannya, memasuki era reformasi, Indonesia melakukan perubahan mendasar terhadap beberapa kelembagaan politik sebagai sintesa terhadap kelemahan sistem politik masa Orde Baru. Tesis yang dibangun pada masa Orde Baru yakni stabilitas politik merupakan prasyarat untuk stabilitas pemerintahan dan pembangunan. Sistem multipartai merupakan sistem yang memperburuk stabilitas politik, pemerintahan, dan pembangunan, karena itu harus dihindari. Solusinya kemudian sistem dua partai dan satu partai berkarya. Maka sejak Pemilu

tahun 1971 partai politik yang bertarung yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Perjuangan.

Tesis politik Orde Baru tidak cukup kuat ketika Indonesia dihantam krisis ekonomi asia tahun 1997. Bangunan ekonomi Indonesia yang dikonstruksi oleh praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tiba-tiba ambruk. Tidak ingin mengalami hal yang sama seperti masa Orde Baru, memasuki era reformasi Indonesia memilih bangunan sistem multipartai. Pilihan atas bangunan kepartaian ini melahirkan banyak partai politik Islam, yang hingga saat ini masih eksis.

A. Definisi Partai Politik Islam

Memahami dan mendefinisikan partai politik Islam bukanlah pekerjaan mudah, disebabkan oleh masih terbatasnya literatur yang secara khusus membahas tema ini. Di samping hal tersebut, pengaruh cengkraman ilmu pengetahuan Eropa, menyebabkan terbatasnya ilmuan politik yang secara khusus menekuni tentang partai politik Islam. Metode yang ditempuh pada bab ini kemudian, menelusuri definisi umum tentang partai politik, untuk dihubungkan dengan misi keislaman. Meskipun metode ini masih cukup lemah, setidaknya metode

ini, menawarkan jalan keluar dari kebuntuan perdebatan akademis.

Pada tahun 1984, Robert Huckshorn dalam bukunya berjudul *Political Parties in America*, mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum, dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan.⁸²

Batasan yang diberikan Huckshon di atas terlihat cukup pragmatis, dimana partai politik dipahami memiliki tujuan akhir, yakni ikut sebagai peserta Pemilu. Adapun motivasi partai yang dapat ditangkap dari definisi Huckshon adalah untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan lembaga-lembaga negara. Huckshon mencurigai semua partai politik didirikan dengan tujuan yang sama yakni mendapatkan jabatan kekuasaan pada lembaga pemerintahan khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif.

⁸² Dikutif dari Richard S.Katz & William Crotty, *Handbook of Party Politics*, diterjemahkan menjadi *Handbook Partai Politik* (Bandung, Nusa Media, 2014); hlm. 3

Definisi pragmatis tentang partai politik juga dapat ditemukan pada statemen Sigmound Neumann. Ia mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan, dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan berbagai kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.⁸³

Perspektif lain untuk memahami partai politik dikembangkan oleh Jimly Asshiddiqie. Ia memahami makna partai politik melalui perspektif hukum. Dari perspektif ini, maka partai politik didefinisikan sebagai asosiasi warga negara, dan karena itu dapat berstatus sebagai badan hukum.⁸⁴ Oleh karena itu, anggota partai politik tidak boleh menjadi anggota pada partai politik yang lain, karena setiap partai politik telah memiliki badan hukum.

⁸³ Dikutif dalam Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia* (Malang, Setara Pers, 2012), hlm. 14

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah KONstitusi* (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), hlm. 69

Seorang ahli politik berkebangsaan Amerika, Ware (1996), menawarkan cara untuk memahami partai politik dengan mempelajari karekteristik yang melekat pada diri partai politik tersebut. Menurutnya ada tiga karekteristik dari partai politik. *Pertama*, tujuan partai politik adalah menghantarkan negara pada tujuan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat daripada sekedar merebut kekuasaan. *Kedua*, partai politik dapat dijadikan sebagai strategi untuk meraih kekuasaan sebuah rezim untuk membentuk suatu pemerintahan. *Ketiga*, partai politik dibentuk untuk terlibat dalam kontestasi Pemilu.⁸⁵

Ketiga karekteristik di atas mengindikasikan partai politik memiliki dua misi sekaligus, yakni misi kebangsaan dan misi kekuasaan. Misi kebangsaannya yakni mencapai tujuan bernegara, sedangkan misi kekuasaan yakni menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif.

Meskipun partai politik memiliki motivasi untuk mendapatkan jabatan di lembaga pemerintahan, namun motivasi tersebut tidak tunggal. Untuk memahami lebih

⁸⁵ Sumbangan pemikiran Ware ditemukan dalam Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam; Teori dan Praktik di Indonesia (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), hlm.7

mendalam tentang motivasi pendirian partai politik, dikemukakan oleh Al-Hamdi, sebagai berikut;

1. Partai politik adalah organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu sehingga mereka memiliki kepentingan yang harus diperjuangkan melalui penguasaan struktur dan kekuasaan dalam pemerintahan;
2. Untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, partai politik harus berkontestasi dalam arena demokrasi yang bernama Pemilu;
3. Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang dijadikan media untuk mewujudkan kepentingan rakyat, seperti rasa aman, nyaman, adil, dan sejahtera;
4. Partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan membentuk opini masyarakat, membawa pemimpinnya berkuasa di pemerintahan, serta mengusahakan para pendukungnya mendapat keuntungan dari dukungan tersebut;
5. Partai politik memiliki empat ciri; (a) organisasi yang berjangka panjang; (b) memiliki struktur organisasi yang berjenjang dan adanya pembagian divisi di setiap masing-masing level; (c) memiliki orientasi kekuasaan

sebagai alat untuk mengimplementasikan kepentingan rakyat; (d) memiliki dukungan suara sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas.

6. Dalam pembentukan partai politik, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang telah di atur oleh pihak yang berwenang.⁸⁶

Dari seluruh pendapat para ahli di atas, dapat ditarik rumusan definisi partai politik sebagai, sekumpulan orang yang mengorganisir dirinya secara sukarela atau otonom, membentuk organisasi yang bersifat jangka panjang, digunakan sebagai mesin kontestasi Pemilu, dengan tujuan mendapatkan jabatan kekuasaan pemerintahan. Untuk melaksanakan misinya, partai politik memiliki struktur organisasi secara berjenjang, memiliki anggota, dan memiliki pemimpin. Adapun guna menjaga ketertiban kepartaian, pemerintah membuat undang-undang yang mengatur pesyaratan pendirian partai politik.

Pertanyaan selanjutnya, apa definisi partai politik Islam. Sebelum memberi jawaban atas pertanyaan di atas, terlebih dahulu diterangkan bahwa sebagai konsekuensi negara dengan

⁸⁶ Ridho Al-Hamdi, *ibid*, hlm. 8

bangsa yang plural, kemunculan beberapa basis ideologi partai tidak dapat dihindari. Pada masa Orde Lama, aliran partai politik di Indonesia terbagi dalam sejumlah kelompok ideologis. Ada partai berbasis sosialis, nasionalis, komunis, dan demokrat. Ada pula partai berbasis agama, seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, dan Yahudi.

Pada masa Orde Baru, basis ideologis sebagaimana fenomena Orde Lama, disederhanakan menjadi tiga yakni, basis nasionalis, Islam, dan golongan berkarya. Basis nasionalis bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), basis Islam bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan basis golongan berkarya bergabung dengan Partai Golkar.

Di era reformasi, fenomena basis ideologis kepartaian bersiklus seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. Basis Islam berkembang cukup pesat dengan munculnya beberapa partai politik Islam, seperti PBB, PBR, PAN, PK (sekarang menjadi PKS), PKB, ditambah partai Islam yang sudah eksis pada masa Orde Baru yakni PPP.

Apabila partai-partai di atas dipandang sebagai partai politik Islam, lantas apa yang menjadi dasar ilmuwan politik di Indonesia mendefinisikan partai-partai tersebut sebagai partai

politik Islam. Al-Hamdi memberi petunjuk bahwa ada dua indikator untuk menyebut suatu partai politik disebut sebagai partai politik Islam. *Pertama*, ideologis organisasi, merujuk pada partai politik yang menjadikan Islam sebagai dasar ideologinya. *Kedua*, basis sosio-kultural. Dalam konteks ini, Al-Hamdi membagi partai politik Islam menjadi tiga kategori; (1) partai Islam yang berasas Islam; (2) partai Islam yang berasas Islam dan Pancasila; (3) partai Islam yang berasaskan Pancasila tetapi berbasis massa mayoritas dari kalangan Muslim.⁸⁷

Sumbangan pemikiran Al-Hamdi di atas sekurang-kurangnya menyodorkan jalan keluar atas kebuntuan debat akademik seputar makna partai politik Islam. Meskipun demikian, pemikiran Al-Hamdi terlalu organisatoris dan formalis. Pemaknaan tentang partai politik Islam kekinian seyogyanya dilihat lebih berani mengkritisi ranah praktek. Partai politik Islam seyogyanya dilihat dari apakah partai politik tersebut memperjuangkan isu-isu Islam di parlemen, apakah partai politik tersebut menawarkan visi, misi dan program berbasis Islam kepada pemilih, dan apakah dalam rekrutmen dan pelaksanaan fungsi kaderisasi partai politik

⁸⁷ Ridho Al-Hamdi, *ibid*, hlm. 9

tersebut berpedoman pada kaedah-kaedah Islam. Dengan menggunakan definisi ini, maka boleh jadi partai politik yang tidak menggunakan ideologi Islam dalam organisasi partainya dapat dikategorikan partai politik Islam apabila praktek yang dilakukan partai politik tersebut berbasiskan Islam.

Berdasarkan argumentasi di atas, sebaiknya kategori untuk memahami partai politik Islam yang diperkenalkan Al-Hamdi ditambah satu lagi, yakni praktek keberpihakan dan perjuangan partai politik terhadap isu-isu kebutuhan kelompok Muslim. Beberapa isu Islam misalnya tentang pariwisata halal, perbankan syariah, dan berbagai isu lainnya.

B. Tujuan dan Fungsi Partai Politik Islam

Setelah memahami makna partai politik Islam, pertanyaan selanjutnya apa tujuan dan fungsi partai politik Islam. Untuk membahas tema ini selayaknya pembahasan dimulai dari fungsi partai politik secara umum. Hampir semua ilmuan politik menyepakati, beberapa fungsi utama partai politik, yakni; (1) sebagai rekrutmen politik; (2) sebagai kaderisasi politik; (3) sebagai pendidikan politik; (4) sebagai komunikasi politik; (5) sebagai resolusi konflik; (6) sebagai artikulasi kepentingan.

Keenam fungsi dasar partai politik di atas, mengindikasikan partai politik merupakan satu-satunya organisasi yang efektif menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengekspresikan kehidupan politiknya. Partai politik menjadi organisasi yang mempersiapkan warga negara untuk menjadi pemimpin politik di pemerintahan, maka partai politik menjadi mesin penyedia calon pemimpin bangsa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, partai politik melaksanakan fungsi rekrutmen politik dan kaderisasi.

Partai politik bertanggungjawab terhadap kecerdasan politik warga. Untuk melaksanakan tanggungjawab ini, partai politik melaksanakan fungsi pendidikan politik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh partai politik dalam pelaksanaan fungsi ini, seperti penataran kader, program bela negara, memberikan contoh politik bersih atau bebas korupsi kepada warga negara dengan berbagai inovasi, misalnya menolak praktek politik uang dalam pemilu, memberikan sanksi bagi politisi mereka yang melakukan korupsi.

Sebagai usaha mempertemukan kehendak masyarakat dan rencana kebijakan pemerintah, partai politik melakukan fungsi komunikasi politik. Dasar pemikiran pentingnya fungsi komunikasi politik adalah adanya fenomena yang

menunjukkan tidak semua masyarakat mengetahui rencana kebijakan pemerintah, demikian halnya tidak selalu pemerintah mengetahui aspirasi masyarakat. Untuk mempertemukan hubungan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat, diperlukan fungsi komunikasi politik partai politik. Partai politik kemudian menjadi “penyambung lidah” masyarakat dan pemerintah.

Di tengah perkembangan demokrasi yang semakin membaik, konflik kepentingan antara kelompok tidak selalu dapat dihindari. Sebagaimana ciri demokrasi yang mengedepankan perbedaan bukan keseragaman, maka demokrasi mesti melahirkan perbedaan-perbedaan. Apabila perbedaan tidak mampu dikelola dengan baik, yang muncul kemudian adalah konflik bahkan disintegrasi bangsa. Dalam usaha membangun manajemen konflik kebangsaan menjadi kekuatan dan keutuhan negara, partai politik memiliki dua fungsi sekaligus, yakni fungsi resolusi konflik dan artikulasi kepentingan.

Bagaimana dengan tujuan dan fungsi partai politik Islam ?. Sebagai spirit perjuangan organisasi dan para kadernya, partai politik Islam selayaknya meletakkan cita-cita besar Islam yang terkandung di dalam Al-Qur`an sebagai tujuan perjuangannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Hamdi, dalam Al-Qur`an tujuan bernegara adalah untuk mewujudkan *Baldatun thayyibatun warabbun ghafur*.⁸⁸ Secara sederhana konsep ini mengandung makna bahwa tujuan bernegara itu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridhai Allah SWT. Berdasarkan konsep ini, dapat ditafsirkan ada tiga tujuan utama partai politik Islam, sebagai berikut;

1. Masyarakat yang adil. Indikator keadilan masyarakat, seperti tidak ada masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mengalami marginalisasi, tidak ada masyarakat yang dilanggar hak-haknya sebagai warga negara, ada kebebasan masyarakat untuk hidup, berbicara, melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagainya.
2. Masyarakat yang makmur dan sejahtera. Indikator mengukur makmur yakni kehidupan individu cukup dari segi materi, seperti kecukupan sandang, pangan dan papan. Sedangkan sejahtera diukur dari segi psikis, seperti bahagia berada dalam keluarga, adanya

⁸⁸ Ridho Al-Hamdi, *ibid*, hlm.10

lingkungan sosial yang peduli terhadap sesama, dan sebagainya.

3. Masyarakat yang aman dan nyaman. Konsep nyaman dapat dijelaskan sebagai rasa bahagia dari segi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu. Tujuan partai politik Islam kemudian adalah mewujudkan masyarakat yang merasa nyaman dan aman dari segala macam bentuk kejahatan dan gangguan dari lingkungannya.

Ketiga tujuan partai politik Islam yang dijelaskan di atas, memiliki kesamaan dengan tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pada alenia kedua pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa, “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Dengan begitu, maka tidak ada alasan bagi setiap orang untuk membenturkan partai politik Islam dengan konstitusi Negara. Justru partai politik Islam menempatkan tujuannya sama dengan tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

C. Tipologi Partai Politik Islam

Untuk menjelaskan tipologi partai politik Islam di Indonesia, dapat digunakan beberapa perspektif. Misalnya, Von der Mehden (2008), menjelaskan ada empat kategori kelompok muslim di Indonesia. *Pertama*, tradisional, merujuk pada kelompok Muslim yang dalam praktek beragamanya mengikuti kebiasaan dan tradisi.

Kedua, kelompok modernis, merujuk pada kelompok yang mengambil inspirasi dari gerakan modern Islam. Kelompok ini pada awalnya dipelopori oleh Muhammad Abduh dari mesir. *Ketiga*, Neo-Modernis, merujuk pada kelompok yang mengedepankan nilai-nilai universal dalam Islam, seperti hak asasi manusia dan pluralism agama. *Keempat*, kelompok Islamis, merujuk pada kelompok yang mendorong diterapkannya Islam secara formal dalam kehidupan social maupun politik. Kelompok ini juga cenderung bersifat eksklusif.⁸⁹

Pandangan di atas pernah digambarkan oleh Clifford Geertz, yang menjelaskan pembagian Muslim Inonesia dengan tiga kelompok. *Pertama*, kelompok abagan. Merujuk pada

⁸⁹ Mehden, Von der, Fred R,(2008) dikutip oleh Al-Hamdi, ibid, hlm. 13-14

kelompok Muslim yang perilaku beragamanya dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi dan budaya. Mereka melaksanakan tradisi slametan, percaya terhadap makhluk halus, dan tradisi lainnya. *Kedua*, kelompok santri, merujuk pada kelompok dimana praktek beragamanya berpegang pada ajaran-ajaran yang bersumber dari al-Qur`an dan As-Sunnah, serta kitab-kitab fiqh yang saheh. *Ketiga* kelompok priyayi, merujuk pada kelompok Muslim yang praktek beragamanya diwarnai oleh nilai-nilai etika kebbangsawanan.⁹⁰

Pengelompokan Muslim di atas menggambarkan afiliasi kepertaian Muslim di Indonesia. Pada massa Orde Baru misalnya, kelompok abangan terwakili dalam PDI, kelompok santri terwakili dalam PPP, sedangkan kelompok priyayi terwakili dalam Partai Golkar. Di era reformasi, kelompok abangan diwakili oleh PDIP, kelompok santri diwakili oleh PKB dan PPP, kelompok priyayi diwakili oleh PKS, dan PAN.

Sedangkan apabila menggunakan perspektif Von der Mehden, dapat diklasifikasi, sebagai berikut;

- Kelompok tradisionalis, pada masa Orde Lama diwadahi oleh Partai NU, pada masa Orde Baru PPP,

⁹⁰ Clifford Geertz, *Agama-Agama Jawa; Abangan, Santri, dan Priyayi* (Jakarta, Komunitas Bambu, 2013)

dan pada masa Orde Reformasi PKB, PKU, SUNI, PNU, PKNU, dan PPNUI.

- Kelompok modernis, pada masa Orde Lama diwadahi oleh Parmusi, pada masa Orde Baru Parmusi, dan pada masa Orde Reformasi PKS dan PAN, dan lain-lain.

D. Ringkasan

Pada prinsipnya, partai politik merupakan organisasi yang terbentuk secara sukarela, dengan tujuan mendapatkan kekuasaan di lembaga pemerintah, melalui kontestasi Pemilu. Sedangkan partai politik Islam, merupakan partai politik yang memiliki tiga kriteria, yakni; partai politik yang menjadikan Islam sebagai ideology organisasinya, memiliki basis sosio-kultural dari kelompok Muslim, dan memiliki keberpihakan untuk memperjuangkan isu-isu kebutuhan kelompok Muslim, baik di luar maupun di dalam parlemen.

Fungsi partai politik mencakup; (1) sebagai rekrutmen politik; (2) sebagai kaderisasi politik; (3) sebagai pendidikan politik; (4) sebagai komunikasi politik; (5) sebagai resolusi konflik; (6) sebagai artikulasi kepentingan. Sedangkan tujuan partai politik Islam mencakup; menciptakan masyarakat yang

adil, menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera, serta menciptakan masyarakat aman dan nyaman.

Tipologi partai politik Islam di Indonesia dapat dikelompokkan dengan metode konversi dengan basis kelompok pendukungnya. Merujuk pada studi Geertz, Islam di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yakni; abangan, santri, dan priyayi. Sedangkan menurut studi Von der Mehden, Islam di Indonesia dikelompokkan menjadi empat tipologi, yakni; tradisional, modernis, neo-modernis, dan Islamis. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sederhananya ada dua tipologi partai politik Islam di Indonesia, yakni partai politik Islam tradisional dan partai politik Islam modernis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Ian**, 2004, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Political Ideology Today*, Yogyakarta, Qalam
- Basrowi, Sukidin, Suko Susilo**, 2012, *Sosiologi Politik*, Ghalia Indonesia
- Bachtiar, Wardi**, 2006, *Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parsons* PT.Remaja Rosdakarya
- Budiardjo, Miriam**, 2010, Prof, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, M.Burhan**, 2013, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenada Media Group
- Damsar**, 2013, *Pengantar Sosiologi Politik* Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group
- Darmawan, Ikhsan**, 2015, *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara

- Duverger, Maurice**, 1985, *Sosiologi Politik*, Terjemahan Daniel Dhakidae, Rajawali Press
- Eatwell, Roger & Wright, Anthony**, 2004, *Ideologi Politik Kontemporer*, diterjemahkan dari buku aslinya *Contemporary Political Ideologies*, Yogyakarta, Jendela
- Efirza**, 2016, *Kekuasaan Politik: Perkembangan Konsep, Analisis dan Kritik*, Malang, Intrans Publisng
- Giddens, Anthony & Held, David**, 1987, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, diterjemahkan oleh Vedi R. Hadiz, Jakarta, CV. Rajawali
- Haboddin, Muhtar**, 2017, *Memahami Kekuasaan Politik*, Malang, UB Press
- Halim, Abd. Halim**, 2014, *Politik Lokal Pola Aktor dan Alur Dramatikalnya*, Yogyakarta, Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa/LP2B
- Haryanto, Sindung**, 2015, *Sosiologi Agama dari Klasik Hingga Postmodern*, Jakarta, Ar-Ruzzmedia

- Haywood, Andrew**, 2013, *Politik Edisi Keempat*, Pustaka Pelajar
- Ishiyama John T & Breuning, Marjike** , 2013, *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21* Jilid 1, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Kinloch, Graham C**, 2005, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Bandung, CV.Pustaka Setia
- Lubis, Akhyar Yusuf**,2014, *Postmodernisme Teori dan Metode*,Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada
- Ritzer, George**, 2002, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, judul aslinya Sociology: a multiple paradigm science*, PT RajaGrafindo
- Said Gatara, A.A. Said& Said, Moh.Dzulkiah**, 2007, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian* , Bandung, Pustaka Setia
- Sofyan, Ayi**, 2012, *Etika Politik Islam*, Bandung, CV.Pustaka Setia
- Usman, Sunyoto**, 2012, *Sosiologi Sejarah, Teori, dan Metodologi*, Pustaka Pelajar

Setiadi, M.Elly, & Kolip, Usman, 2013, *Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakda Dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group

Soekanto, Soerjono & Sulistyowati, Budi, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada,

Suko, Susilo, 2012, *Sosiologi Politik*, Ghalia Indonesia

Sunarto, Kumanto, 2000, *Pengantar Sosiologi Edisi Revisi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sukmana, Oman, 2005, *Sosiologi dan Politik Ekonomi*, Malang, UMM Press

Suntana,Ija, 2010, *Kapita Selekta Politik Islam*, Bandung, CV.Pustaka Setia

Suryadi, Budi, 2007, *Sosiologi Politik : Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*, IRCiSoD Jogjakarta

Suprayogo, Imam, 2009, *Kyai Dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, Malang, UIN-Malang Press

Qodir,Zuly, 2012, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2012

Zamroni, 1992, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial* , PT.Tiara Wacana, Yogyakarta

Maliki,Zainuddin, 2010, *Sosiologi Politik Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*, Yogyakarta, Gajdjah Mada University

TENTANG PENULIS



Agus, M.Si, lahir di Desa Batunyalu, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, tanggal 13 Agustus 1974, anak terakhir dari enam bersaudara atas pasangan Sri Ulan (almarhumah) dan H.Muhtar. Nama istri Chandra Rukmi Saraswati, SE, M.Ak, yang saat ini berkarya pada Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Memiliki tiga orang putri, Sayyidah Rahadatul `Aisy, Shakila Khaerun Nisa, dan Shavira Nur Aqila. Menamatkan pendidikan di SD Negeri 1 Batunyalu, SMP Negeri 3 Praya, SMA Negeri 2 Praya, S1 Sosiologi Fisipol UGM, S2 Magister Administrasi Publik Fisipol UGM. Hingga saat ini Agus bekerja sebagai Dosen Tetap UIN.Mataram menjabat sebagai Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Saat ini, Agus juga menjabat sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di NTB. Sebelumnya Agus pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 3 FISIPOL UM. Mataram 2003-2008, Anggota KPU Kab.Lombok Tengah 2003-2008, Ketua KPU Kab. Lombok Tengah 2008-2013, Anggota KPU Provinsi NTB 2014-2016. Buku yang pernah ditulis Agus adalah Demokrasi di Bumi Sasak (2006), Aktor Penyelenggara Pemilu (2013), Manajemen Organisasi (2016), Sosiologi Politik (2017), Politik Elektoral (2018). Selain aktif mengajar, Sosiologi Politik Agus juga aktif menulis di media massa, sebagai narasumber di instansi pemerintah dan swasta, dan dikenal sebagai pengamat politik NTB.



Zakaria Ansori - begitulah nama panjang pemberian kedua orang tuannya yakni H. Ahmad Ahyath dan Madenah - lahir di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, pada tanggal 7 Agustus 1978, anak pertama dari delapan bersaudara. Istri bernama Nurhani Hidayati, S.Hum, yang dulunya pernah mengabdikan diri sebagai seorang pendididk di bangku sekolah di daerah asalnya Temanggung Jawa Tengah, karena beberapa pertimbangan, yakni melihat mendidik anak sendiri lebih diutamakan, maka memutuskan untuk mendermakan hidupnya untuk mengayomi kedua putrinya yang sangat dia cintai yakni Zu Aulal hija Zakaria dan Rozana Al A'la Zakaria. "Jack" sapaan akrabnya menamatkan pendidikan di SD Negeri Gerintuk-Renteng, SMP Negeri 1 Praya, SMA Negeri 1 Praya, S1 Hukum keluarga, S2 Ilmu Filsafat UGM. Hingga saat ini Zakaria Ansori bekerja sebagai Dosen Tetap UIN Mataram di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.